

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**PERANAN SOEKARNO PADA MASA DEMOKRASI  
TERPIMPIN 1959 - 1967**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

**Desri Sermiyati Meda**

NIM : 001314044

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2005**

**SKRIPSI**

**PERANAN SOEKARNO PADA MASA DEMOKRASI  
TERPIMPIN 1959 - 1967**

Oleh :

**Desri Sermiyati Meda**

**NIM : 001314044**

Telah disetujui oleh :

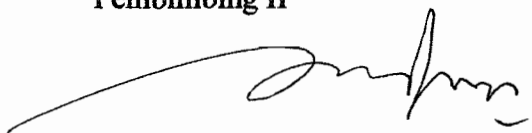
**Pembimbing I**



**Prof. Dr. P. J. Suwarno, S.H.**

**Tanggal 6 September 2005**

**Pembimbing II**



**Drs. Sutarjo Adisusilo J. R., S.Th.**

**Tanggal 23 September 2005**

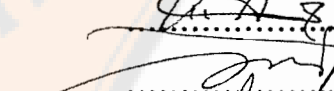
SKRIPSI

PERANAN SOEKARNO PADA MASA DEMOKRASI  
TERPIMPIN 1959 - 1967

Dipersiapkan dan ditulis oleh :  
**Desri Serniyati Meda**  
NIM : 001314044

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
pada tanggal 7 Oktober 2005  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Sutarjo Adisusilo J. R., S.Th.	
Sekretaris	: Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota	: Prof. Dr. P. J. Suwarno, S.H.	
Anggota	: Drs. Sutarjo Adisusilo J. R., S.Th.	
Anggota	: Drs. B. Musidi, M.Pd.	

Yogyakarta, 7 Oktober 2005  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sanata Dharma



Dekan

  
Drs. Tarsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## MOTTO

☞ *Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaKu mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang kamu harapkan.*

(Yeremia 29: 11)

☞ *Jika saya percaya bahwa saya tidak dapat melakukan sesuatu, maka saya tidak akan melakukannya. Tetapi jika saya yakin dapat melakukannya maka saat itu juga saya memperoleh semangat untuk melakukannya walaupun pada awalnya saya tidak berkemampuan untuk melakukannya.*

(Mahatma Gandhi, 1869-1948)

☞ *Kesuksesan bukan milik orang-orang tertentu, sukses milik saya dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan dan memperjuangkan dengan sepenuh hati karena harga dari sebuah kegagalan dan kesuksesan bukan dinilai dari hasil akhir, tetapi dari proses perjuangannya.*

(Andi Wongso)

☞ *"Jasmerah" Jangan melupakan sejarah karena belajar dari pengalaman masa lalu dapat menentukan suatu pilihan yang terbaik dalam kehidupan kita.*

(Bung Karno)

☞ *Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda, jadi belajarlah dari kegagalan itu.*

☞ *Menjadi diri sendiri lebih baik daripada menjadi diri orang lain.*



PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

*Yesus Kristus penyelamatku*

*Mama yang selalu kusayang dan kucintai*

*Kakakku Robin, Yuni, Ani, Ruli dan Adikku Ima, Nita,  
Ama serta Ibu Ropa.*

*Keluarga Besar Ropa: Kel. Om Hendrik, Kel. Om Yulius,  
Kel. Om Leopold, Kel. Hen, Om Veremias, Kel. Besar Rofli  
Rjani, Kel. Besar Laila Mono dan Kel. Besar Wadi Hae.*

*My best friends Mia Rizki, Egi, Yanti S., Titi, Lenny, Inung,  
Merry Cit, dan Widi, senang berkenalan dengan kalian.*

*Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan*

*Amir, Joho dan Lulu, terima kasih atas persembahan*

*semua teman-teman di kelas dan di luar kelas*

*Molly dan teman-teman di kelas*

*Mama, Papa, Beni, Lippo dan Laila, terima kasih atas  
dukungannya. Watvau yang telah membacakan banyak materi  
kepada penulis dan Catur yang selalu membuat kesal tetapi juga  
sering membuat penulis tersenyum, terima kasih atas semuanya.*

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

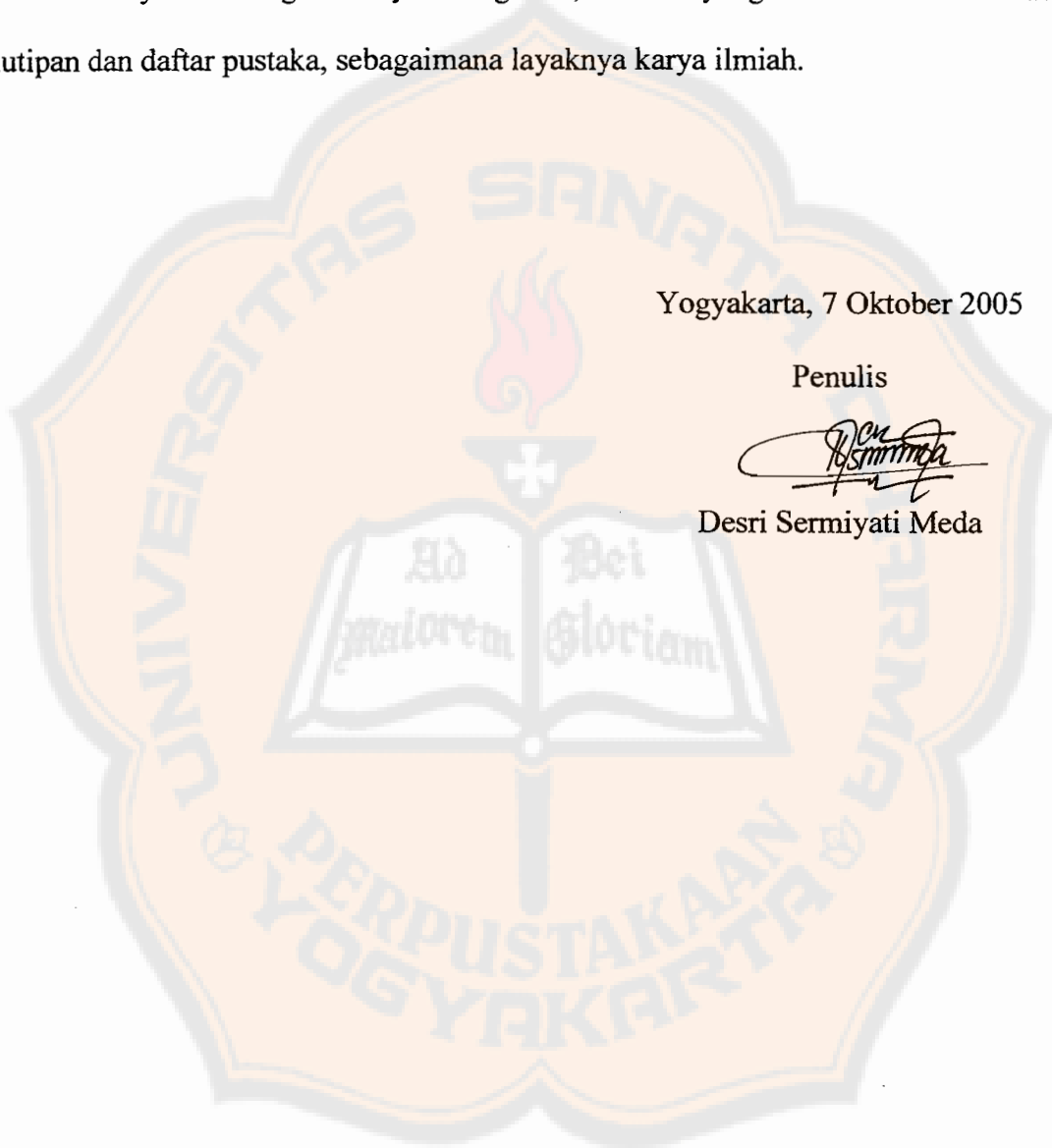
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 7 Oktober 2005

Penulis



Desri Sermiyati Meda





**ABSTRAK**

**Nama : Desri Sermiyati Meda**

**Judul : PERANAN SOEKARNO PADA MASA DEMOKRASI  
TERPIMPIN 1959 – 1967**

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk: pertama, mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang Soekarno menjalin hubungan dengan PKI dan ABRI; kedua, menganalisis hubungan Soekarno dengan PKI waktu Gerakan 30 September meletus; dan ketiga, mengidentifikasi hubungan Soekarno dan Soeharto setelah tahun 1965 – 1967.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dan ditulis secara deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik, sosiologi dan yuridis.

Hasil dari penelitian ini adalah latar belakang Soekarno menjalin hubungan dengan PKI dan ABRI karena Soekarno sangat membutuhkan PKI dan ABRI untuk mengembalikan figurnya sebagai Bapak Pemersatu Bangsa yang mulai pudar pada tahun 1957.

Hubungan Soekarno dengan PKI waktu Gerakan 30 September meletus berjalan dengan baik, sebab Soekarno tidak menyalahkan PKI atas peristiwa yang terjadi sehingga memunculkan keterlibatan ABRI, khususnya TNI-AD dalam peristiwa itu.

Hubungan Soekarno dan Soeharto setelah tahun 1965 – 1967 tidak berjalan dengan baik, sebab Soeharto melakukan kudeta pada tanggal 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan kekuasaan Soekarno sebagai presiden diambil alih oleh Soeharto sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar). Dengan demikian kudeta merangkap yang dijalankan oleh Soeharto dapat berhasil pada tanggal 12 Maret 1967 setelah MPRS memutuskan mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno.

ABSTRACT

**Name : Desri Sermiyati Meda**

**Title : The Role of Soekarno in the Era of Guided Democracy  
1959–1967**

This writing of thesis aimed: first, to describe and to analyze the backgrounds that motivate Soekarno to make relationship with PKI and ABRI (Indonesian Army); second, to analyze the relation of Soekarno with PKI when the 30<sup>th</sup> September Movement erupted; and third, to identify the relationship between Soekarno and Soeharto in 1965–1967.

The used method in this study was historical method, and written in descriptive-analytical way. The used approaches were political, sociological and juridical approaches.

The results of this research showed that the background of Soekarno in making relationship with PKI and ABRI was because Soekarno needed them to recover his figure as the Father of Nation Unifier, which at that time it began to fade on 1957.

Soekarno had good relation with PKI when the September 30<sup>th</sup> Movement erupted, because he did not blame PKI due to the incident, so that it prompted the involvement of ABRI, especially the armed land force, in the incident.

The relationship between Soekarno with Soeharto after the period of 1959–1970 was not good for the fact that Soeharto carried out coup d'état on the 1<sup>st</sup> October 1965. As the consequence of the coup d'état, the power of Soekarno as president was handed over by Soeharto since he issued the Order Letter of 11<sup>th</sup> March (Supersemar) document. The coup d'état carried out by Soeharto succeeded on 12 March 1967, after MPRS decided to deprive the governmental power from Soekarno.



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "PERANAN SOEKARNO PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1959-1967" dengan baik dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Pendidikan, pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Sutarjo Adisusilo J. R., S.Th., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberi bantuan berupa bimbingan, masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Segenap Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang sangat penulis hormati khususnya Dosen Pendidikan Sejarah yang telah banyak memberi bekal pengetahuan dan membimbing penulis selama kuliah.
7. Yang tercinta: Mama yang telah memberikan semangat, dukungan, doa, bantuan baik moril maupun materiil dan cintanya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segalanya.
8. Kakakku: Robin, Yuni, Ani, Yuli dan adikku: Ima, Nopi, Jaya, Ina serta Ama Ropa, yang senantiasa membantu dan menghibur penulis.
9. Keluarga Besar Ropa Gora: Kel. Om Hendrik, Kel. Om Yulius, Kel. Om Leopold, Om Yeremias, Tante Ilen, Kel. Besar Rohi Riwu, Kel. Besar Lawa Mone dan kel. Besar Wadu Hae serta seluruh keluarga. Terima kasih atas dukungannya.
10. My best friend: Mia Riwu, Egy, Yanti S., Tini, Lenny, Inung, Merry CH., dan Wiwin. Terima kasih atas bantuan, dukungan, doa, semangat dan kasih sayang serta sudah menjadi teman baikku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Yogyakarta, 7 Oktober 2005

Penulis,

Desri Sermiyati Meda



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
D. Tinjauan Pustaka .....	15
E. Kajian Teori .....	18
F. Hipotesis .....	20
G. Metode dan Pendekatan .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	23

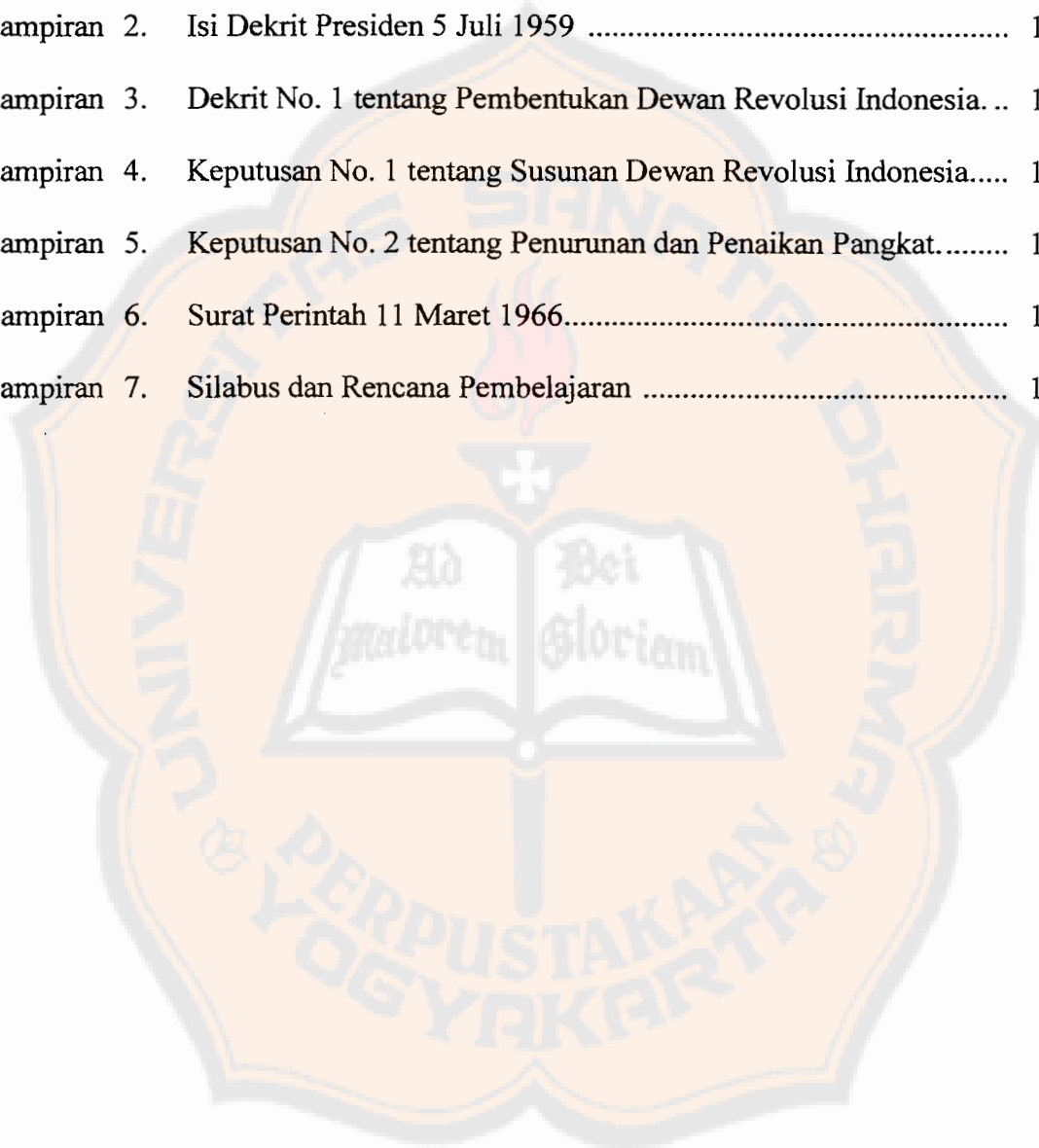
# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II. LATAR BELAKANG SOEKARNO MENJALIN HUBUNGAN DENGAN PKI DAN ABRI .....	25
A. Biografi Soekarno .....	25
B. Partai Komunis Indonesia (PKI) .....	32
C. Latar Belakang Soekarno Menjalin Hubungan Dengan PKI .....	35
D. Kedudukan ABRI Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966.....	43
E. Demokrasi Terpimpin .....	47
BAB III. HUBUNGAN SOEKARNO DENGAN PKI WAKTU GERAKAN 30 SEPTEMBER MELETUS .....	57
A. Sikap Soekarno Terhadap Gerakan 30 September .....	57
B. Hubungan Soekarno dengan ABRI (TNI-AD) Pada Saat Gerakan 30 September Meletus .....	64
C. Hubungan Soekarno dengan PKI Waktu Gerakan 30 September Meletus .....	67
BAB IV. HUBUNGAN SOEKARNO DAN SOEHARTO SETELAH TAHUN 1965-1967 .....	76
A. Hubungan Soekarno dan Soeharto Sebelum Tahun 1965 .....	76
B. Hubungan Soekarno dan ABRI (TNI-AD) Sebelum Tahun 1965	82
C. Hubungan Soekarno dan ABRI (TNI-AD) Setelah Tahun 1965- 1967 .....	86
D. Hubungan Soekarno dan Soeharto Setelah Tahun 1965-1967 .....	88
BAB V. PENUTUP .....	98
DAFTAR PUSTAKA .....	101
LAMPIRAN	



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1. Gambar Soekarno .....	105
Lampiran 2. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 .....	106
Lampiran 3. Dekrit No. 1 tentang Pembentukan Dewan Revolusi Indonesia. ...	107
Lampiran 4. Keputusan No. 1 tentang Susunan Dewan Revolusi Indonesia.....	109
Lampiran 5. Keputusan No. 2 tentang Penurunan dan Peningkatan Pangkat.....	111
Lampiran 6. Surat Perintah 11 Maret 1966.....	112
Lampiran 7. Silabus dan Rencana Pembelajaran .....	114



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Soekarno dilahirkan di Surabaya tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta tanggal 21 Juni 1970. Semasa hidupnya beliau dikenal sebagai seorang negarawan ulung pada masanya dan merupakan seorang pemimpin yang berkharisma, di mana sampai sekarang ini Soekarno masih selalu menjadi bahan kajian yang tidak pernah habis untuk dibicarakan. Pengabdian yang begitu besar telah diberikannya kepada bangsa dan negara, sehingga Soekarno sering disebut sebagai pendiri bangsa Indonesia atau dalam bahasa Inggrisnya “*Soekarno is the founder of the Republic of Indonesia*” atau “*Soekarno is the founder of the Indonesia nation*”.<sup>1</sup>

Harus diakui bahwa Soekarno adalah tokoh pemersatu bangsa.<sup>2</sup> Sikap politiknya banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, adat istiadat dan pendidikan yang ia peroleh. Semangat patriotis sudah ditanamkan oleh orang tuanya dalam diri Soekarno. Kegemaran Soekarno pada cerita-cerita pewayangan juga sangat mempengaruhi kepribadian Soekarno, sebab lakon-lakon yang diceritakan dalam wayang terdapat unsur-unsur pendidikan terutama tentang persoalan kehidupan sosial kemasyarakatan dan kemuliaan pribadi manusia. Kedekatan dan kecintaan Soekarno pada rakyat ditanamkan dalam diri Soekarno oleh Sarinah.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Tito, *Kumpulan Kata-kata Pilihan Bung Karno*, Tridaya, Jakarta, 1979, hlm. 3.

<sup>2</sup> Nazaruddin Syamsuddin. (ed). *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*, Rajawali Press, Jakarta, 1988, hlm. 2.,

<sup>3</sup> Adam, Cindy, “*Sukarno An Autobiography as Told to Cindy Adams*”, diterjemahkan Abdul Barsalim, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1966, hlm. 35.

Kehebatan Soekarno naik ke panggung politik nasional tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan politik yang sudah dilaluinya. Keterlibatan Soekarno dalam Jong Java, PNI dan diskusi politik dengan para gurunya termasuk H.O.S. Tjokroaminoto telah menempa dirinya menjadi sadar akan kemampuan politik.<sup>4</sup> Soekarno kemudian tampil sebagai ketua umum PNI dan mengukuhkan kedudukannya sebagai tokoh sentral organisasi itu. Semangat, gaya pidatonya serta keberaniannya yang terbuka menentang kekuasaan kolonial telah mendorong dirinya diberi julukan “singa mimbar”.<sup>5</sup>

Bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dibacakannya teks Proklamasi Kemerdekaan oleh Ir. Soekarno didampingi oleh Mohammad Hatta. Dan secara bersamaan Sang Merah Putih pun berkibar dengan diiringi Lagu Indonesia Raya. Pernyataan kemerdekaan ini diumumkan ke seluruh penjuru dunia dan mulai saat itu bangsa Indonesia telah berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa merdeka di atas dunia.<sup>6</sup> Dengan mencapai kemerdekaan bukan berarti bangsa Indonesia sudah terlepas dari masalah melainkan bangsa Indonesia harus memulai kehidupan baru dengan mulai menata kembali negara yang sudah diporakporandakan oleh penjajah. Dalam menata kembali negara ini dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat memimpin negara dengan baik. Oleh karena itu pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan diproklamasikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan aklamasi memilih Soekarno sebagai

---

<sup>4</sup> John D. Legge, *Sukarno: Sebuah Biografi Politik*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985, hlm. 72-73.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 113.

<sup>6</sup> Dr. Muhammad Ridhwan Indra, S.H., Sophian Marthabaya, S.H., *Peristiwa-peristiwa di Sekitar Proklamasi 17-08-1945*, Sinar Grafik, Jakarta, 1987, hlm. 1.

presiden pertama Republik Indonesia yang baru itu dengan Hatta sebagai wakil presiden.<sup>7</sup> Pada tanggal 19 Agustus PPKI mengadakan rapat lagi, kali ini PPKI memutuskan wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi di seluruh bekas koloni Hindia-Belanda.<sup>8</sup>

Kesulitan yang dihadapi oleh para pemimpin negara yang baru merdeka yaitu usaha untuk mendirikan sistem pemerintahan sendiri, karena kemerdekaan bukan saja sebagai pergantian penguasa dari pemerintah kolonial kepada pejuang negara bekas jajahannya, tetapi kemerdekaan itu berarti mempunyai pemerintahan sendiri. Maka diperlukanlah suatu sistem pemerintahan sendiri dan lembaga-lembaga kenegaraan yang kuat dengan bersumber pada tata hukum dan tata negara baru, sebagai dasar untuk menjalankan pemerintahan dengan tetap pada prinsip demokrasi sebagai landasan ketatanegaraan.

Dengan diangkatnya Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden maka tugas yang harus dilakukannya yaitu menyusun kabinet, tetapi susunan kementerian negara diserahkan kepada suatu panitia kecil yang terdiri dari Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo dan Kasman Singodimejo. Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus dipersiapkanlah pembentukan Komite Nasional Indonesia yang akan menggantikan PPKI. Soekarno dan Hatta kemudian mengangkat 135 orang anggota KNI yang mencerminkan susunan masyarakat Indonesia dari sekian banyak pulau, suku dan pandangan politik. Seluruh anggota PPKI kecuali mereka sendiri, menjadi anggota KNIP. Badan ini dilantik

---

<sup>7</sup> Bernhard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 389.

<sup>8</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke 20 Jilid I*, Kanisius, Yogyakarta, 1988, hlm. 89.



pada tanggal 29 Agustus 1945.<sup>9</sup> Pembentukan KNIP adalah untuk menjadi bagian dari eksekutif yaitu sebagai badan pembantu presiden.

Pada tanggal 4 September 1945 Soekarno mengumumkan anggota-anggota pemerintahnya sebuah kabinet, anggota-anggota yang dipilih secara hati-hati terkecuali Amir Syarifuddin yang diangkat menjadi Menteri Penerangan, para anggota kabinet ini pernah memegang jabatan-jabatan senior dalam pemerintahan pendudukan Jepang seperti Subardjo dari Asrama Indonesia Merdeka telah memainkan peran dalam rezim pendudukan Jepang.<sup>10</sup>

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, ia harus melepaskan kembali daerah pendudukannya. Ini berarti daerah kolonial yang semula direbut dari bangsa Barat yang tergabung ke dalam Blok Sekutu harus dikembalikan.<sup>11</sup> Kita telah mengetahui bahwa sesudah Jepang berhasil menduduki Indonesia, Belanda lalu membentuk *NICA (Nederlands Indies Civil Administration)* di Brisbane Australia, di bawah Van Mook.<sup>12</sup> Sehingga setelah Jepang kalah, Belanda menguasai Indonesia lewat *NICA* yang menimbulkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya kedua negara ini mengadakan perundingan untuk mengatasi ketegangan yang terjadi. Perundingan dilakukan antara Sutan Syahrir dan Van Mook. Namun perundingan yang dilaksanakan sebanyak dua kali tidak menghasilkan kesepakatan yang diinginkan oleh kedua negara tersebut.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>10</sup> John D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985, hlm. 178.

<sup>11</sup> G. Moedjanto, *op. cit*, hlm. 96.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 99.

Pada awal November 1946 akhirnya kedua belah pihak mengadakan perundingan lagi dan perundingan ini dilaksanakan di Linggajati. Dalam perundingan ini masing-masing negara mempunyai perwakilan yaitu Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn dan Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir, tetapi Soekarno dan Mohammad Hatta yang pada saat itu menjabat sebagai presiden dan wakil presiden juga ikut hadir dalam pelaksanaan perundingan tersebut. Perundingan ini akhirnya menghasilkan persetujuan yang terdiri dari 17 pasal pada tanggal 15 November 1946, salah satu isi dari persetujuan Linggajati adalah bahwa pemerintah Belanda mengakui pemerintahan Republik Indonesia berkuasa secara *de facto* atas Jawa, Madura dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki oleh Sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur dan dengan kerjasama kedua belah pihak akan dimasukkan ke dalam daerah RI.<sup>13</sup>

Dengan dicapainya persetujuan oleh kedua belah pihak belum berarti bahwa persetujuan itu terus bisa dilaksanakan. Persetujuan itu baru bisa dilaksanakan bila telah mendapatkan ratifikasi dari parlemen Belanda maupun KNIP.<sup>14</sup> Namun setelah mendapat penegasan akhirnya kedua belah pihak menyetujuinya. Maka pada tanggal 25 Maret 1947 persetujuan Linggajati ditandatangani oleh kedua delegasi di istana negara Jakarta.

Persetujuan Linggajati yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. Hambatan ini bersumber dari perbedaan penafsiran antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia di mana pemerintah Belanda berpendapat bahwa sebelum R.I.S dibentuk, hanya

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 182.

Belandalah yang berdaulat atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda sehingga Republik Indonesia harus menghentikan hubungannya dengan luar negeri dan pemerintah Belanda meminta polisi untuk menjaga keamanan dalam negeri. Sedangkan pemerintah Republik Indonesia berpendapat bahwa sebelum R.I.S. terbentuk, kedudukan *de facto* Republik Indonesia tidak berubah. Maka Republik Indonesia tetap berhak melanjutkan hubungannya dengan luar negeri dan pemerintah Republik Indonesia menolak diadakannya polisi bersama.<sup>15</sup>

Pertikaian antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia tidak mencapai kesepakatan maka Belanda melancarkan Agresi Militer I pada tanggal 21 Juli 1947 yang bertujuan untuk menghancurkan Republik Indonesia. Maka dengan ini Belanda menyatakan bahwa dirinya tidak terikat dengan perjanjian Linggajati. Agresi Militer I yang dilancarkan oleh Belanda telah mengancam keberadaan India dan Australia, sehingga kedua negara ini mengusulkan untuk mengundang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 31 Juli 1947 untuk meredam permusuhan. Dewan Keamanan PBB akhirnya menerima undangan tersebut. Dalam pertemuan ini memunculkan kesepakatan tentang gencatan senjata yang akan dilakukan pada tanggal 4-5 Agustus 1947 tepat tengah malam.

Keterlibatan Dewan Keamanan PBB menghasilkan komisi jasa baik yang beranggotakan tiga negara yaitu Belgia yang dipimpin oleh Van Zeeland, Australia dipimpin oleh Kirby dan Amerika Serikat dipimpin oleh Graham. Kerjasama ketiga negara ini membawa kesepakatan antara Indonesia dan

---

<sup>15</sup> Drs.Susanto Tirtoprodjo, S.H., *Sejarah revolusi Nasional Indonesia*, PT. Pembangunan Gunung Sahari, Jakarta, 1963, hlm. 24.

Belanda untuk melanjutkan perundingan. Perundingan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 1947 di atas kapal Amerika Serikat yang bernama Renville. Karena perundingan dilaksanakan di atas kapal Renville, maka perundingan ini disebut perundingan Renville.

Persetujuan Renville akhirnya ditandatangani oleh kedua negara yaitu Indonesia dan Belanda pada tanggal 17 Januari 1948. Salah satu isi dari persetujuan Renville adalah Belanda tetap berdaulat atas seluruh Indonesia sampai kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang segera harus dibentuk. Dalam pelaksanaannya persetujuan Renville mengalami konflik. Konflik ini bersumber dari pemerintah Belanda yang berpendapat bahwa pemerintah harus dipimpin oleh wakil tinggi mahkota Belanda, sedangkan Indonesia berpendapat bahwa pemerintah harus bersifat nasional, maka harus terdiri dari seluruh orang Indonesia. Selain itu Belanda menuntut penghapusan mengenai hubungan luar negeri Republik Indonesia dengan negara lainnya sedangkan Indonesia tetap mempertahankannya.

Konflik antara Indonesia dan Belanda tidak mencapai penyelesaian sehingga pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan aksi militernya yang ke II di mana Yogyakarta diduduki oleh tentara kolonial Belanda kemudian Belanda melakukan pemboman atas Maguwo dan beberapa bangunan penting di Yogyakarta seperti RRI, sehingga secara keseluruhan Yogyakarta berhasil diduduki oleh Belanda sekitar jam 15.00 WIB. Setelah itu Belanda menangkap Bung Karno bersama para pemimpin lainnya lalu diasingkan ke Brastagi, Prapat dan kemudian ke Bangka.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Solichin Salam, *Bung Karno Putera Fajar, Gunung Agung*, Jakarta, 1966, hlm. 279.



Dewan Keamanan PBB berusaha menyelesaikan konflik tersebut dengan cara memerintahkan Belanda untuk menghentikan tembak-menembak. Namun Belanda meminta persyaratan, apabila Belanda menghentikan tembak-menembak maka Belanda tidak akan membebaskan pemimpin Republik Indonesia yang telah mereka tangkap. Karena masalah ini semakin memanas, maka Komisi Jasa Baik mengadakan perundingan pada tanggal 14 April 1949 antara Dr. Van Royen dan Roem, S.H. Pada tanggal 7 Mei 1949 perjanjian antara Belanda dan Indonesia yang dikenal dengan perjanjian Roem-Royen ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini membuat kesediaan Belanda untuk membebaskan pemimpin RI yang ditangkap.

Salah satu isi dari perundingan Roem-Royen adalah akan dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Adapun salah satu isi dari persetujuan KMB adalah: piagam penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada Indonesia Serikat yang harus dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 1950. Pada tanggal 27 November 1949 perjanjian KMB ditandatangani oleh Drs. Mohammad Hatta dan tanggal 17 Desember 1949 Bung Karno dinobatkan sebagai presiden Republik Indonesia Serikat (R.I.S) yang pertama di Sitinggil Yogyakarta. Setelah menerima penganugerahan kedaulatan, timbulah gerakan yang menuntut kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebab R.I.S dengan 15 negara (daerah bagian) ciptaan Belanda di dalamnya dianggap berbau kolonial atau diartikan tidak merdeka 100 persen.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid II*, hlm. 60.

Melihat dukungan kembali ke NKRI begitu luas, maka diselenggarakanlah pertemuan Hatta, Sukawati dan Mansur. Masing-masing mewakili R.I.S, NIT dan Sumatera Timur. Mereka setuju untuk membentuk NKRI sesuai dengan usul DPR Sumatera Timur, Hatta setuju bahwa proses kembali ke NKRI ditempuh tidak melalui penggabungan dengan RI tetapi dengan R.I.S.<sup>18</sup> Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali kepada NKRI. Dengan terbentuknya NKRI maka selesailah taraf revolusi nasional kita karena dengan terbentuknya NKRI terwujudlah cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu mendirikan negara kesatuan.<sup>19</sup>

Indonesia adalah negara besar, di mana setiap negara membutuhkan pemimpin yang mampu memimpin negara ke tujuan yang telah disepakati bersama. Kehadiran dwitunggal Soekarno-Hatta mampu membawa perubahan di saat bangsa Indonesia terpecah-pecah dan tengah mendapat ancaman penguasa asing sehingga tidak dapat dipungkiri apabila Soekarno-Hatta merupakan lambang persatuan.

Di awal tahun 1957 sistem politik Indonesia berada dalam keadaan krisis. Krisis itu melanda kabinet yang kemudian disusul pergolakan-pergolakan daerah.<sup>20</sup> Bagi Soekarno kesulitan-kesulitan politik yang dihadapi pada masa itu lebih disebabkan oleh sistem multi partai daripada faktor-faktor lain.<sup>21</sup> Sistem multi partai ini akan melahirkan pemerintahan koalisi yang terlalu lemah dan hanya akan bertahan dalam waktu yang singkat. Selain itu sistem ini juga akan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>20</sup> Dr. Nazaruddin Syamsuddin (ed), *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*, Rajawali Press, Jakarta, 1988, hlm. 173.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 174.

memperburuk segala bentuk konflik dalam masyarakat dan cenderung mempolitikkan seluruh kehidupan masyarakat.

Ideologi Marhaenisme merupakan konsep pemikiran Soekarno yang bertujuan untuk mewujudkan sosialisme Indonesia yaitu sosialisme yang disesuaikan dengan alam Indonesia terutama didasarkan pada suatu dorongan kaum tani kecil yang sedikit banyak berdiri sendiri. Kecintaan Soekarno pada persatuan dan kesatuan bangsa tercermin dalam gagasannya yang menggabungkan tiga aliran politik yaitu Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme dalam satu wadah NASAKOM.

Bagi Soekarno gerakan-gerakan Islam, Marxis dan Nasionalis di Indonesia berasal dari suatu dasar yang sama yaitu hasrat kebangsaan untuk melawan setiap bentuk penindasan baik dalam bidang politik maupun ekonomi.<sup>22</sup> Ketika Soekarno dengan lantang berani berkata: “*go to hell with your aid*” (persetan dengan bantuanmu) kepada Amerika Serikat jelas menunjukkan sikap anti kapitalisme dan imperialisme. Pada saat sistem demokrasi parlementer diterapkan ditandai dengan sistem multi partai telah menimbulkan instabilitas pemerintahan yang amat sangat.<sup>23</sup> Ketidakstabilan pemerintahan ini dijadikan alasan oleh Soekarno untuk kembali ke kepribadian bangsa yang menekankan pada prinsip gotong royong yang merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Soekarno kemudian mengajukan beberapa tawaran untuk mengatasi persoalan yang ada.

---

<sup>22</sup> Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme, Rekonstruksi Islam-Nasionalis*, Inti Sarana Askara, Jakarta, 1985, hlm. 35.

<sup>23</sup> Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1988, hlm. 148.

Masa Demokrasi Liberal dimanfaatkan oleh Aidit sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia untuk kembali ke Indonesia pada bulan Juli 1950. Aidit mempunyai tujuan menghilangkan citra buruknya dengan mengadakan aliansi dengan kekuatan-kekuatan politik yang penting yakni PNI. Dengan bergabungnya PNI dan PKI diharapkan partai-partai politik tidak curiga lagi dan anti terhadap PKI. Upaya yang dilakukan Aidit ini berhasil di mana sejumlah tokoh PNI mulai bekerja sama dengan PKI untuk menjatuhkan Kabinet Wilopo.

Setelah Kabinet Wilopo jatuh maka PKI mengeluarkan pernyataan yang menuntut pembentukan kabinet baru sesuai dengan Front Persatuan yang di dalamnya termasuk PKI tetapi tanpa Masjumi dan Partai Sosial Indonesia (PSI). Kabinet yang baru terbentuk di bawah pimpinan Ali Sastroamidjojo yang merupakan salah satu pemimpin PNI sehingga selama masa pemerintahan Kabinet Mr. Ali Sastroamidjojo I, PKI memberikan dukungannya secara gigih kepada PNI walaupun kabinet tersebut tidak berhasil.<sup>24</sup>

Pada perkembangannya posisi PKI semakin mantap berkat agitasi Aidit mengadakan propaganda yang mampu menarik perhatian massa. Maka pada tanggal 29 September 1955 pada pemilu yang pertama, PKI mampu menempatkan posisinya masuk dalam empat partai besar setelah Masyumi, PNI, dan NU. Walaupun PKI mendapat suara yang cukup besar dalam pemilihan umum tetapi PKI tidak berhasil duduk dalam kabinet yang terbentuk setelah pemilihan umum.<sup>25</sup> Suasana yang kurang menguntungkan bagi PKI ini membuat Presiden Soekarno secara terbuka menyatakan keinginannya agar PKI

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 26-27.

<sup>25</sup> Abdul Gafur, *Pak Harto Pandangan dan Harapannya*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1987 hlm 222.



diikutsertakan dalam kabinet. Presiden Soekarno berpendapat bahwa PKI perlu diikutsertakan dalam kabinet karena partai itu telah berhasil tampil sebagai salah satu dari empat partai besar dalam pemilihan umum. Sikap Presiden Soekarno tersebut telah banyak menolong PKI dalam proses perkembangan politik Indonesia selanjutnya.

Memasuki tahun 1957-1959 ditandai dengan kemunduran eksperimen demokrasi parlementer. Maka Soekarno dengan retorikanya *The Rediscovery of Our Revolution* (Penemuan Kembali Revolusi Kita) berkesepakatan mempraktekkan demokrasi terpimpin dan ingin mengembalikan figurnya sebagai pemersatu bangsa yang mulai memudar setelah pemilihan umum 1955.

Cita-cita Soekarno adalah menginginkan masyarakat yang berkeadilan sosial dengan mendasarkan pada demokrasi asli Indonesia, sehingga penolakannya terhadap demokrasi parlementer merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kabinet gotong royong. Setiap anggota kabinet dianggap sebagai anggota keluarga yang rukun (*ale leden van de familie aan tafel*),<sup>26</sup> maka Soekarno menempatkan dirinya sebagai ayah dari sebuah keluarga besar yaitu rakyat Indonesia dengan kekuasaan yang terpusat sepenuhnya di tangannya. Sebagai seorang pemimpin bangsa Soekarno menginginkan terwujudnya cita-cita suatu masyarakat adil dan makmur di bawah negara kesatuan dengan demokrasi terpimpin yang dipandang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, maka pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkanlah Dekrit Presiden dengan tujuan untuk menyelamatkan negara. Penjelasan mengenai dekrit disampaikan dalam pidato pada tanggal 17 Agustus 1959. Pidato ini kemudian diberi sebutan

---

<sup>26</sup> Rusadi Kantaprawira, *op. cit.*, hlm. 91.

“Manifesto Politik Republik Indonesia” (Manipol). Presiden selanjutnya meminta kepada Panitia Kerja Dewan Pertimbangan Agung agar isi pidato dirumuskan menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal ini dimanfaatkan oleh PKI untuk memasukkan program PKI ke dalam GBHN, sebab yang memimpin Panitia Kerja Dewan Pertimbangan Agung adalah Aidit.

Ketegangan politik semakin meningkat pada tahun 1965. Hubungan Presiden Soekarno dan Angkatan Darat semakin tegang karena adanya perbedaan sikap terhadap PKI. PKI semakin dekat dengan Presiden Soekarno untuk dijadikan tempat berlindung dan anti terhadap Angkatan Darat. Pada bulan Juli 1965 kesehatan Soekarno memburuk, maka PKI yang keselamatannya banyak tergantung kepada Soekarno merasa cemas sehingga PKI berusaha merebut kekuasaan. Selain itu tersirat kabar bahwa perwira tinggi Angkatan Darat juga membentuk Dewan Jenderal yang bertugas memberi rekomendasi kepada pimpinan Angkatan Darat tentang kenaikan kolonel menjadi jenderal. Namun PKI salah menafsirkan bahwa Dewan Jenderal sebagai badan yang mempersiapkan perebutan kekuasaan dari Soekarno sehingga mengakibatkan terjadinya Gerakan 30 September 1965.

Setelah Gerakan 30 September meletus, Soeharto berusaha menjatuhkan Soekarno di mana terdapat aksi-aksi Tritura yang berhasil sampai dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto sebagai pengembalian Supersemar adalah melarang dan membubarkan PKI.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam skripsi yang berjudul “Peranan Soekarno Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1967”, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa latar belakang Soekarno menjalin hubungan dengan PKI dan ABRI?
2. Bagaimana hubungan Soekarno dengan PKI waktu Gerakan 30 September meletus?
3. Bagaimana hubungan Soekarno dan Soeharto setelah tahun 1965-1967?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang Soekarno menjalin hubungan dengan PKI dan ABRI.
- b. Untuk menganalisis hubungan Soekarno dengan PKI waktu Gerakan 30 September meletus.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan Soekarno dan Soeharto setelah tahun 1965-1967.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi kepustakaan dan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lain dalam melakukan penulisan skripsinya tentang tokoh-tokoh perjuangan Indonesia.

b. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Sejarah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan tentang sejarah Indonesia yaitu peranan Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1967.

c. Bagi Peneliti/Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerapkan teori yang telah didapatkan di bangku kuliah ke dalam praktek dunia nyata sekaligus menambah pengetahuan tentang peranan Soekarno dalam masa Demokrasi Terpimpin 1959-1967.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seseorang dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indra lain atau dengan alat mekanis atau selanjutnya secara singkat disebut saksi pandang mata.<sup>27</sup>

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa sumber primer merupakan sumber yang didapat secara langsung oleh orang pertama atau seseorang yang melihat dengan mata kepala sendiri suatu peristiwa yang terjadi. Buku yang digunakan sebagai sumber primer dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, UI Press, Jakarta, 1985, hlm. 35.



*Di Bawah Bendera Revolusi*

Buku ini terdiri dari dua jilid yang ditulis oleh Ir. Soekarno terbitan Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi Jakarta. Jilid I diterbitkan tahun 1964 dan jilid II tahun 1965. Jilid I merupakan kumpulan karangan atau artikel yang ditulis oleh Soekarno. Buku ini digunakan dalam penelitian ini karena isinya merupakan kumpulan pandangan dan pemikiran-pemikiran Soekarno terutama pada masa revolusi perjuangan dalam rangka merealisasikan cita-citanya yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Jilid II merupakan kumpulan karangan pidato Soekarno yang berisi tentang perjuangan kebangsaan Soekarno, pandangan Soekarno tentang demokrasi dan pemikirannya tentang penyelenggaraan pemerintahan yang lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

Selain sumber primer di atas, ada juga sumber lain atau sumber sekunder yang dapat mendukung penulisan skripsi ini. Sumber sekunder menurut Louis Gottschalk, merupakan kesaksian daripada siapapun yang bukan merupakan saksi pandang mata yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya.<sup>28</sup> Sedangkan Nugroho Notokusanto berpendapat bahwa sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh oleh pengarang dari orang lain atau sumber lain.<sup>29</sup>

Dari definisi di atas dapat ditegaskan bahwa sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh dari orang kedua yaitu orang yang memperoleh berita dari sumber primer. Jadi bukan dari tangan pertama atau disebut sumber lain

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>29</sup> Nugroho Notokusanto, *Norma-norma Dasar Pemikiran dan Penelitian*, Dephankam, Jakarta, 1971, hlm. 19.

yang tidak sejaman dengan peristiwa atau sumber yang diperoleh dari seseorang yang tidak langsung menyaksikan peristiwa yang terjadi.

Buku-buku tersebut adalah karangan G. Moejanto yang berjudul *Indonesia Abad ke 20* yang terdiri dari dua jilid. Buku jilid I menguraikan tentang masa penjajahan Jepang dan perjuangan kemerdekaan, sedangkan jilid II menceritakan Agresi Militer Belanda II yang mengakibatkan jatuhnya kota Yogyakarta dan penangkapan para pemimpin bangsa Indonesia.

*Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1967*

Buku ini ditulis oleh Mangil Martowidjojo, terbitan Grasindo, Jakarta tahun 1999. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan hidup Soekarno dan menceritakan tentang konsep serta ide Soekarno untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Meskipun buku ini ditulis dengan bahasa sederhana namun telah menggambarkan tentang pola-pola kebijaksanaan Soekarno untuk mengelola pemerintahan.

*Tonggak-tonggak Perjalananku* ditulis oleh Ali Sastroamidjojo terbitan Kinta Jakarta tahun 1974 dan *Cakrawala Politik Era Soekarno* ditulis oleh Ganis Harsono, terbitan Inti Idayu Press Jakarta tahun 1985. Kedua buku ini berisi tentang terbentuknya kabinet pertama yang belum dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, perubahan struktur pemerintahan dari presidensial ke parlementer sampai dengan masa pemerintahan demokrasi terpimpin.

*80 Tahun Bung Karno; Pandangan dan Penilaian Generasi Muda*

Buku ini ditulis oleh tokoh-tokoh yang mengenal Soekarno dan diedit oleh Aristides Katoppo, terbitan Sinar Harapan Jakarta tahun 1981. Buku ini

berisi kumpulan makalah yang dipersembahkan untuk memperingati usia Soekarno yang ke 80 tahun. Buku ini juga menguraikan tentang pemikiran Bung Karno sebagai wakil generasi yang lahir 80 tahun yang lalu dan di dalam buku ini juga ingin memberikan sumbangan pikiran sampai sejauh mana cita-cita dan pemikiran Bung Karno.

*Bung Karno Putera Fadjar*

Buku ini ditulis oleh Solichin Salam yang menguraikan tentang perjuangan Bung Karno sejak muda sampai ia menjadi presiden tetapi lebih ditekankan pada semangat dan daya juangnya bagi ketahanan Revolusi.

*Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*

Buku ini diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia yang menguraikan tentang latar belakang, aksi dan penumpasan PKI pada saat G 30 S/PKI.

#### **E. Kajian Teori**

Penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Soekarno Pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1967”, perlu dikemukakan konsep-konsep yang berkaitan dengan judul dan tujuan skripsi.

Peranan adalah kata yang berasal dari kata dasar “peran” yang artinya pemain sandiwara, tukang lawak, yang berakhiran -an, sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat menjadi bagian yang memegang pimpinan utama.<sup>30</sup> Jadi yang dimaksud dengan peranan adalah lebih mengacu pada peranan atau

---

<sup>30</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 506.

tugas yang harus dilakukan oleh Soekarno dalam kedudukannya sebagai presiden RI.

Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara.<sup>31</sup> Jadi demokrasi adalah dasar hidup bernegara yang menunjukkan bahwa kebijakan umum atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Terpimpin adalah sistem demokrasi yang dijalankan dengan rancangan dan petunjuk-petunjuk yang tertentu.<sup>32</sup>

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi atau dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kesempatan lain Presiden Soekarno menjelaskan Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan tanpa anarkhinya liberalisme, tanpa otokrasi diktator<sup>33</sup> atau corak pemerintahan yang untuk pertama kali diumumkan secara resmi di dalam pidato Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956 ketika membuka konstituante yaitu corak demokrasi yang mengenal satu pemimpin menuju tujuan suatu masyarakat keadilan sosial.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 195.

<sup>32</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *op. cit*, hlm. 755.

<sup>33</sup> Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid II*, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta, 1965, hlm. 372.

<sup>34</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op. cit*, hlm. 195.



Hubungan berasal dari kata dasar “hubung” yang berarti berangkaian atau bersambung, kemudian mendapat akhiran –an sehingga menjadi keadaan yang berhubungan atau dihubungkan. Dalam hal ini arti hubungan menandakan adanya dua unsur kesenjangan untuk mendapatkan kesimpulan dari hal yang berhubungan.<sup>35</sup> Jadi hubungan ini lebih mengacu pada unsur kesenjangan Soekarno dalam kedudukannya sebagai Presiden RI dengan pemimpin-pemimpin politik, partai politik dan TNI Angkatan Darat pada waktu itu.

#### F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis inilah yang akan dibuktikan dalam penelitian. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Kalau pengaruh Soekarno pada masa Demokrasi Parlementer pudar, maka untuk mengembalikan pengaruh, Soekarno menjalin hubungan dengan PKI dan ABRI.
2. Kalau hubungan Soekarno dan PKI baik pada saat Gerakan 30 September meletus maka muncul pemikiran bahwa Soekarno terlibat dalam Gerakan 30 September.
3. Kalau Soeharto memimpin kudeta pada tanggal 1 Oktober 1965, maka hubungan Soeharto dan Soekarno tidak baik.

---

<sup>35</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *op. cit*, hlm. 362.

### G. Metode dan Pendekatan

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau menggunakan metode penulisan yang berpatokan pada sumber-sumber yang ada. Dengan demikian maka metode penulisan lebih ditekankan pada metode penulisan deskriptif analitis, karena melalui metode ini penulis dapat menguji, menganalisis, menguraikan serta merekonstruksi peristiwa-peristiwa sejarah masa lampau, dan ingin menggali teori-teori dasar dan konsep-konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu berdasarkan kausalitas, faktor kondisional dan determinan.

Penulis menggunakan 4 tahap dalam penulisan skripsi ini yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historigrafi (penulisan sejarah).<sup>36</sup> Keempat tahap tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Sebelum dilakukan penulisan, maka hal penting yang dilakukan adalah pengumpulan sumber baik itu sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber-sumber yang digunakan berupa buku-buku dan dokumen.

#### 2) Kritik Sumber

Setelah semua sumber yang diperlukan sudah terkumpul maka dilakukan kritik terhadap sumber yang diambil. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat otentisitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas sehingga terhindar dari kepalsuan atau ketidakeaslian.<sup>37</sup> Kritik sumber juga terdiri dari kritik intern dan kritik ekstern. Di mana kritik intern digunakan untuk meneliti kebenaran

<sup>36</sup> Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah* (terjemahan Nugroho Notokusanto), UI Press, Jakarta, 1985, hlm. 35.

<sup>37</sup> Koentowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Benteng Budaya, Yogyakarta, 1995, hlm. 99.

dari isi dokumen yang ada, sedangkan kritik ekstern digunakan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan dalam penulisan.

### 3) Interpretasi

Interpretasi atau sintesis menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta sejarah yang diperoleh setelah diterapkan kritik ekstern maupun intern dari data-data yang berhasil dikumpulkan pada langkah heuristik. Dengan kata lain interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya dan menganalisis sumber untuk menghasilkan suatu rangkaian peristiwa.

### 4) Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah, sebab dalam tahap ini sudah menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lampau yang di dalamnya mengandung aspek kronologis, sehingga memberi kemudahan dan penjelasan kepada penulis dan pembaca mengenai urutan waktunya.

### **Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik, sosiologi dan pendekatan yuridis. Pendekatan politik digunakan untuk melihat peranan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin dan untuk mengkaji berbagai aspek yang melandasi kepemimpinan Soekarno dalam mengelola pemerintahan.

Pendekatan sosiologi digunakan untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Soekarno untuk mengatasi berbagai persoalan berkaitan dengan adanya pertentangan ideologi, konflik kepentingan usaha-usaha untuk

saling mempengaruhi,<sup>38</sup> yang telah mewarnai jalannya pemerintahan yang dikelola Soekarno.

Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui kebijaksanaan yang ditempuh Soekarno dengan kekuasaan yang dimilikinya dan dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang sedang berlaku dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku sebagai landasan ketatanegaraan.

#### H. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Peranan Soekarno Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1967” mempunyai sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, hipotesis, metode dan pendekatan, serta sistematika penulisan.
- Bab II. Bab ini menyajikan uraian tentang latar belakang Soekarno menjalin hubungan dengan PKI dan ABRI.
- Bab III. Bab ini menyajikan uraian mengenai hubungan Soekarno dengan PKI waktu Gerakan 30 September meletus.
- Bab IV. Dalam bab ini diuraikan mengenai hubungan Soekarno dan Soeharto setelah tahun 1965-1967.
- Bab V. Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian permasalahan yang telah diuraikan pada Bab II, III dan IV.

---

<sup>38</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*, Gramedia, Jakarta, 1992, hlm. 24.



Demikianlah sistematika penulisan skripsi ini, dari uraian di atas dapat dicermati bahwa penulis ingin menguraikan tentang latar belakang Soekarno menjalin hubungan dengan PKI dan ABRI, hubungan Soekarno dengan PKI waktu Gerakan 30 September meletus dan hubungan Soekarno dengan Soeharto setelah tahun 1965-1967.





**BAB II**  
**LATAR BELAKANG SOEKARNO MENJALIN**  
**HUBUNGAN DENGAN PKI DAN ABRI**

**A. Biografi Soekarno**

Pada tanggal 6 Juni 1901 di kala fajar menyingsing lahirlah seorang putra dari pasangan Raden Soekemi Sosrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai yang diberi nama Soekarno. Namun nama kecil Soekarno adalah Koesno. Sejak umur 6 tahun Soekarno mulai gemar nonton wayang dan mempelajari cerita wayang tersebut. Soekarno sangat menyukai cerita wayang tentang Werkudoro, karena melambangkan keadilan dan kebenaran.<sup>1</sup>

Soekarno pertama kali bersekolah di Tulung Agung dan pernah sekolah di Angka II Sidoarjo, namun pada umur 12 tahun dan masih duduk di kelas 6 Soekarno harus pindah sekolah Angka I di Mojokerto. Ia merupakan murid terpandai, karena kecerdasan yang dimilikinya maka ia pun dipindahkan dan dimasukan ke sekolah "*Europeesche Lagere School*" (ELS) Mojokerto. Di sekolah ini ia diterima di kelas 5. Selain itu, Soekarno juga memiliki kegemaran belajar ilmu bahasa, menggambar serta berhitung sehingga ia mengambil les pelajaran bahasa Perancis pada Brunette de la Roche Brune.

Pada tahun 1915 Soekarno menamatkan sekolahnya di ELS dan melanjutkan studinya ke sekolah *Hogere Burger School* (HBS) di Surabaya. Sewaktu sekolah di HBS Surabaya Soekarno tinggal di rumah Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Beliau merupakan seorang politikus, tokoh nasional dan

---

<sup>1</sup> Solichin Salam, *Bung Karno Putera Fajar*, Gunung Agung, Jakarta, 1966, hlm. 39.

pemimpin terkemuka di masa itu. Sejak sekolah di HBS inilah Soekarno mulai belajar teori Marxisme dari gurunya yang bernama C. Hartogh, yang merupakan seorang sosialis demokrat.<sup>2</sup>

Selama di bawah asuhan Tjokroaminoto, Soekarno banyak mendapat didikan politik sehingga ia dapat berkenalan dengan tokoh-tokoh nasional seperti K.H. Ahmad Dahlan, E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, K.H. Agus Salim, Surjaningrat, Muso, Alimin dan Darsono serta dapat bertukar pikiran dengan mereka. Hal inilah yang membuat Soekarno tertarik pada lapangan politik. Maka ia pun dapat menjadi seorang ahli pidato yang ulung.<sup>3</sup> Selain belajar di sekolah HBS, ia juga mendapat didikan mental dari Tjokroaminoto untuk dapat belajar berjuang di lapangan politik.

Soekarno mulai terjun dalam dunia pergerakan pada saat lahirnya pergerakan pemuda yang bernama “Tri Koro Darmo” (Sakti-Bukti-Bakti) yang kemudian diganti nama menjadi “Jong Java”. Sejak saat itu Soekarno mulai memperdalam pengetahuannya dengan banyak membaca buku-buku tentang politik. Maka akhirnya Soekarno masuk menjadi anggota partai politik “Sarekat Islam”. Walaupun dalam perkembangannya Sarekat Islam berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) tetapi Soekarno tetap menjadi anggota partai politik tersebut.<sup>4</sup>

Pada permulaan abad ke-20 Belanda telah menjalankan politik uang di Indonesia yang dikenal dengan istilah “*De ethische Koers in de Koloniale*

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 41-42.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 42.

*Politiek*” (Politik Kolonial Gaya-Baru).<sup>5</sup> Dalam melaksanakan politik gaya-baru ini Belanda mendirikan berbagai sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi yang mempunyai tujuan untuk kepentingan imperialisme dan kolonialisme. Maka pada tanggal 3 Juli 1920 dibukalah dengan resmi *Technische Hoger School* (THS) di Bandung dengan Professor Ir. G. Kloper sebagai Rector Magnificusnya yang pertama. Tetapi sebelum THS ini berdiri, pada tahun 1917 telah didirikan sebuah yayasan dengan nama “*Koninklijk Instituut Voor Hoger Technische Onderwijs*” oleh pengusaha-pengusaha asing. Dengan dibukanya sekolah teknik di Bandung maka Bung Karno masuk sebagai mahasiswa.<sup>6</sup>

Bung Karno berhasil menyelesaikan studinya di THS, dengan gelar Sarjana Teknik (*Civiel-Ingenieur*) pada tahun 1926. Sejak itulah Bung Karno bergelar sebagai Ir. Soekarno.<sup>7</sup> Semasa mudanya Soekarno sudah mulai berjuang dalam gerakan politik sehingga terpilih menjadi ketua Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) yang pertama kalinya. Pergerakan ini didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927.<sup>8</sup>

PNI mengalami kemajuan di bawah pimpinan Soekarno. Hal ini disebabkan perjuangan yang tegas dari Soekarno dalam membela nasib kaum Marhaen dan terus berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sikapnya yang tidak mau bekerjasama dengan kaum imperialis ini telah banyak menarik perhatian dan simpatik dari rakyat Indonesia sehingga pada waktu itu PNI benar-benar telah menjadi partai politik yang mendapat tempat di hati rakyat.<sup>9</sup> Soekarno

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 61.

<sup>8</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid I*, Kanisius, Yogyakarta, 1988, hlm. 48.

<sup>9</sup> Solichin Salam, *op.cit.* hlm. 68



selalu membangkitkan jiwa dan semangat “heroisme” dan “patriotisme” di kalangan rakyat sebab di mana pun berada ia senantiasa menanamkan jiwa “nasionalisme” kepada seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno berkeyakinan bahwa hanya dengan dasar kebangsaanlah perjuangannya akan dapat berhasil dan cita-citanya untuk kemerdekaan Indonesia dapat tercapai. Keyakinan inilah yang membuat Bung Karno mendapat julukan sebagai bapak kaum Marhaen di kalangan rakyat.<sup>10</sup>

PNI mengobarkan semangat nasionalis secara meluas karena semangat nasional itu harus disalurkan. Untuk itu Bung Karno mengajukan trilogi sebagai pegangan perjuangan yang meliputi kesadaran nasional, kemauan nasional dan perbuatan nasional sebab dasar PNI adalah marhaenisme (socio-nasionalisme dan socio-demokrasi). Menurut Bung Karno, marhaenisme adalah suatu ideologi kerakyatan yang mencita-citakan terbentuknya masyarakat sejahtera secara merata.

Pada tanggal 27 dan 30 Mei 1928 PNI melangsungkan kongresnya yang pertama di Surabaya. Di dalam kongres inilah nama perserikatan diganti menjadi Partai Nasional Indonesia. Pada kongres ini Bung Karno mendapat kesempatan untuk menjelaskan tujuan PNI yaitu, “Mencapai Indonesia Merdeka”. Di masa ini Bung Karno tampil sebagai penyambung lidah rakyat dan bertindak selaku “pengutara atau juru bicaranya” seluruh rakyat Indonesia. Selain menjadi ketua Partai Nasional Indonesia (PNI), Soekarno juga dipilih menjadi ketua dari PPPKI (Permufakatan Partai-partai Politik Kebangsaan Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai politik. Tahun 1929 PNI dicurigai oleh pemerintah

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 68-69.

Belanda sehingga pada tanggal 29 Desember 1929 Soekarno bersama tiga orang pemimpin PNI (Gatot Mangunpraja, Maskun dan Supriadinata) ditangkap oleh pemerintah Belanda karena agitasinya menghasut rakyat untuk merdeka. Soekarno dijatuhi hukuman yaitu dipenjarakan selama 4 tahun.<sup>11</sup>

Ketika pemimpin PNI sedang menjalani hukuman, PNI dibubarkan karena Mr. Sartono yang memegang pemimpin partai saat itu menganggap bahwa PNI tidak dapat lagi diteruskan sebab pemerintah Belanda terlalu curiga terhadap mereka. Sebagai gantinya mereka mendirikan partai baru dengan nama Partai Indonesia (Partindo). Hukuman yang dijalani Soekarno hanya 2 tahun sehingga pada tanggal 31 Desember 1931 ia dikeluarkan dari penjara.

Setelah keluar dari penjara Soekarno memimpin pergerakan kembali karena secara kebetulan pembebasan Soekarno bertepatan dengan diadakannya Kongres Indonesia Raya yang pertama di Surabaya pada tanggal 1 Januari 1932.<sup>12</sup> Dengan adanya hal itu maka pemerintah Belanda bertambah cemas sehingga Soekarno ditangkap untuk kedua kalinya pada bulan Agustus 1932 dengan tuduhan melakukan agitasi menentang pemerintah Hindia Belanda. Soekarno tidak diberi kesempatan lagi sehingga diasingkan dari pergaulan hidup masyarakat dan dibuang ke Ende (Flores) pada tahun 1934. Dalam pembuangan ini ia aktif menulis artikel-artikel dan surat-surat mengenai keislaman sehingga terbitlah risalahnya : "Surat-surat Islam dari Ende". Kemudian pada tahun 1938 Soekarno dibuang ke Bengkulu. Selama dalam pembuangan di Bengkulu ini

---

<sup>11</sup> Alamsyah Rais, *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, Mutiara Bukit Tinggi Padang, Jakarta 1952, hlm 14.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 13.

Soekarno aktif dalam organisasi Muhammadiyah dan menjadi ketua bagian pengajaran Muhammadiyah daerah Bengkulu.<sup>13</sup>

Pada masa penjajahan Jepang, Soekarno diperalat untuk memperjuangkan jajahan Jepang di Indonesia. Namun pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu setelah Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dengan adanya kegagalan Jepang itu maka pemuda-pemuda menculik Soekarno dan Hatta lalu diasingkan ke Rengasdengklok dengan maksud untuk menjaga mereka dari tangkapan Jepang hingga pemuda-pemuda itu melakukan gerakan yang dinamakan revolusi.<sup>14</sup> Maka pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya dengan dibacakannya teks Proklamasi Kemerdekaan oleh Soekarno didampingi Hatta. Setelah kemerdekaan diproklamasikan Soekarno diangkat menjadi Presiden pertama Republik Indonesia dan dianggap satu-satunya orang yang paling tepat yang dapat menjabat kepala negara pada tanggal 18 Agustus 1945.

Tanggal 5 Oktober 1945 keluarlah Dekrit Presiden untuk membentuk Tentara Nasional Indonesia yang mula-mula bernama Badan Keselamatan/Keamanan Rakyat kemudian diganti menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan akhirnya dirubah menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia). Karena pada tahun 1946 keamanan di Jakarta sangat mengkhawatirkan, maka presiden beserta pemerintah pusat pindah ke Yogyakarta tanggal 4 Januari 1946.<sup>15</sup>

Kegagalan konstituante yang terjadi di Indonesia ternyata dapat diatasi oleh Soekarno dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang

---

<sup>13</sup> Solichin Salam, *op.cit.* hlm. 277-278

<sup>14</sup> Ajamsiah Rais, *op.cit.* hlm. 18.

<sup>15</sup> Solichin Salam, *op. cit.*, hlm. 119.

menetapkan berlakunya kembali UUD 1945. Selain itu krisis kabinet yang sering terjadi juga dapat diatasi oleh presiden.<sup>16</sup> Sebagai presiden Republik Indonesia, Bung Karno juga menjabat sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bung Karno sangat dihormati oleh segenap Angkatan Bersenjata di mana semua anggota ABRI selalu siap sedia untuk menjalankan tugas yang dibebankan serta dipercayakan kepada mereka. Sejak revolusi fisik, perintah dan komando Bung Karno selaku Panglima Tertinggi senantiasa dilaksanakan baik dalam menghadapi musuh dari dalam maupun musuh dari luar seperti Agresi Militer Belanda I dan II, Trikora dan Dwikora, ABRI selalu taat dan patuh dalam menjalankan komando tersebut. Sehingga antara Bung Karno sebagai Panglima Tertinggi dengan ABRI selalu terdapat kerjasama yang baik.

Pada tanggal 17 Agustus 1949, Bung Karno dinobatkan sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat yang pertama di Sitinggil Yogyakarta dan pada tanggal 28 Desember Bung Karno bersama pemerintah pusat kembali ke Jakarta. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang bertujuan untuk membubarkan konstituante dan menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka pemerintahan di Indonesia didasarkan pada Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin berakhir pada tahun 1966 karena situasi politik di tanah air semakin genting, maka Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret kepada Menteri Pangad Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan situasi saat itu.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 121.



Pada tahun 1967 pemerintahan Soekarno mulai mengalami kemunduran yang ditandai dengan diadakannya sidang MPRS yang isinya mencabut kekuasaan negara dari kekuasaan Soekarno dan pemerintahan beralih ke tangan Jenderal Soeharto sebagai pengembalian Super Semar. Maka pada bulan Maret 1968 MPRS mengangkat Jenderal Soeharto sebagai presiden definitif sampai pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh MPRS tahun 1968. Namun hal itu baru dilaksanakan pada tahun 1971 setelah Presiden Soekarno wafat tahun 1970.

#### **B. Partai Komunis Indonesia (PKI)**

Paham Marxisme pada awalnya datang dari luar negeri dan mulai ditanamkan di bumi Indonesia pada masa sebelum Perang Dunia I melalui seorang pemimpin buruh dari negeri Belanda bernama H.J.F.M. Sneevliet. ia adalah anggota *Sociaal Democratische Arbeiders Partij* (SDAP) atau Partai Buruh Sosial-Demokrat.<sup>17</sup> Dalam perkembangannya paham Marxisme ini menanamkan semangat sosialisme yang revolusioner. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa yang terjadi baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Peristiwa di luar negeri terjadi pada bulan Oktober 1917 yaitu kaum Bolsyewik di bawah pimpinan Lenin berhasil menggulingkan kekuasaan Tsar yang begitu lalim dan hendak mendirikan Rusia baru yang sosialis sehingga Revolusi Rusia ini menjadi ilham bagi kaum yang tertindas. Sedangkan di dalam negeri terdapat keadaan ekonomi yang sangat buruk dimana barang-barang sangat kurang, harga membubung tinggi dan penghidupan menjadi sangat sukar, sehingga tidaklah mengherankan kalau dalam keadaan yang demikian orang mudah dimasuki

---

<sup>17</sup> Sartono Kartodirjo.dkk, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, Debdikbud, Jakarta, 1975, hlm 202-203.



propaganda revolusioner dan sosialis yang muluk-muluk, maka dapat mempercepat berkembangnya aliran sosialisme yang revolusioner di Indonesia dan terbentuknya suatu perkumpulan sebagai penjelmaan kesadaran itu.<sup>18</sup>

Sejak berdirinya pada tahun 1920, PKI telah yakin akan kebohongan pemerintah karena itu pada kesempatan yang ada digunakan untuk menimbulkan kekacauan (anarkhi).<sup>19</sup> Keputusan Komintern yang menentang usaha-usaha ke arah cita-cita Pan-Islamisme menyebabkan PKI menemukan kesulitan dalam hubungannya dengan Sarekat Islam, karena kelompok yang anti komunis di dalam Sarekat Islam menuduh bahwa keputusan ini memusuhi Islam secara keseluruhan, sehingga jurang pertentangan antara golongan kiri dan kanan makin melebar. Untuk menghindari penangkapan akibat kegiatan politiknya yang makin membahayakan pemerintah kolonial, maka Semaun meninggalkan Indonesia sehingga kepemimpinan PKI diserahkan kepada Tan Malaka. Selama Tan Malaka memimpin PKI, ia berusaha memperbaiki kembali kerjasama dalam “Kubu Sarekat Islam” dan mengikuti pola yang digariskan oleh Komintern. Dalam kongres PKI tanggal 25 Desember 1921 di Semarang, Tan Malaka melakukan usaha-usaha untuk mencapai suatu kerjasama dalam Komite Federasi Nasional sebagai pelaksanaan taktik front persatuan. Kongres ini dihadiri oleh 14 Sarekat Islam lokal dan delegasi dari Central Sarekat Islam (CSI). Di samping itu pelaksanaan front persatuan PKI mendesak pula kepada Komintern untuk meninggalkan politik menentang gerakan Pan-Islamisme dengan dilaksanakannya

---

<sup>18</sup> L.M. Sitorus, *op.cit*, hlm. 29.

<sup>19</sup> G.Moedjanto, *op.cit*, hlm. 42.

keputusan disiplin partai di dalam tubuh Sarekat Islam. Cabang-cabang yang telah terkena pengaruh PKI kemudian memisahkan diri dari organisasi Induknya.<sup>20</sup>

Setelah berhasil menempatkan dirinya sebagai partai besar, PKI merasa dirinya kuat untuk melancarkan suatu petualangan yang membawa malapetaka bagi ribuan patriot Indonesia. Meskipun dalam perkembangannya PKI dapat dihancurkan oleh Pemerintah Belanda, akan tetapi partai ini tetap menjadi penggerak dari pergerakan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan sehingga partai ini mengalami kemajuan dan peningkatan baik dalam jumlah maupun dalam mutu. Pergerakan tersebut telah meningkat secara horizontal dari pergerakan kedaerahan ke pergerakan nasional Indonesia.<sup>21</sup> Tetapi pada akhirnya partai ini kemudian dilarang oleh pemerintah sesudah pemberontakan Madiun 1948.

PKI bangkit kembali secara meyakinkan dan menjadi partai terbesar sesudah pemilihan umum 1955. Dari sekian banyak partai, memang PKI yang paling cerdas menanggapi keadaan. PKI juga nampak sebagai partai yang paling unggul dalam berbagai hal seperti organisasi yang rapi, disiplin yang baik, bersih tetapi juga cerdas (licik) dalam aksi-aksi yang bergaya revolusioner sosialis.<sup>22</sup> Ketika Presiden Soekarno membentuk Front Nasional sebagai alat penggerak masyarakat PKI semakin diuntungkan, tetapi pada kenyataannya PKI menjadikan Front Nasional ini menjadi alat politiknya untuk menghimpun organisasi massa yang akan menjadi anak organisasi PKI dengan strategi front persatuannya. Posisi PKI semakin kuat setelah dibentuknya Kabinet Dwikora pada tanggal 27 Agustus

---

<sup>20</sup> Sartono Kartodirjo dkk, *op.cit*, hlm. 209-210

<sup>21</sup> L. M. Sitorus, *op.cit*, hlm. 33.

<sup>22</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke 20 Jilid 2*, *op.cit*, hlm. 136.

1964 yang di dalamnya terdapat beberapa orang PKI yang menjabat sebagai menteri.

### **C. Latar Belakang Soekarno Menjalinkan Hubungan dengan PKI dan ABRI**

Demokrasi Perlembagaan yang secara *de facto* berlaku di Indonesia sejak kuartal ke-4 tahun 1945 dijadikan konstitusional maka Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mengendalikan politik Indonesia. Selain itu ada konflik-konflik intern dengan golongan-golongan yang radikal khususnya kaum komunis yang dalam bulan September 1948 mencoba melancarkan suatu kudeta. Antipati Soekarno terhadap Demokrasi Perlembagaan yang telah menyebabkannya menjadi tidak berdaya semakin bertambah kuat. Secara berangsur-angsur kesetiannya kepada konstitusi menjadi meragukan di mana dalam bulan Oktober 1952 Soekarno menolak sebuah usul dari perwira-perwira Angkatan Darat yang tidak puas untuk menentang kekuasaan diktator atau membentuk sebuah Triumvirat yang terdiri dari Hatta, Sultan Hamengku Buwono IX dan Soekarno sendiri serta membubarkan parlemen. Pada waktu itu kedudukan Soekarno masih lemah sehingga ia berusaha mencari sekutu dari partai-partai yang sependapat dengannya bahwa revolusi Indonesia masih belum selesai. Soekarno memperoleh respons dari PKI yang telah disusun kembali dari partai Murba dan PNI. Namun di lain pihak Soekarno ditentang oleh kubu Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) yang liberal dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang masing-masing dipimpin lawan-lawan politik lamanya yakni Mohammad Natsir dan Sutan

Syahrir. Keduanya bersama Hatta berpendapat tujuan-tujuan revolusi sudah tercapai dengan adanya penyerahan kedaulatan.<sup>23</sup>

Pemilihan umum yang pertama pada tahun 1955 membuktikan bahwa Masyumi dan PSI mendapat dukungan yang sama dengan PKI, maka Soekarno dengan dukungan terang-terangan dari PKI dan lawan-lawan lainnya dari Masyumi dan PSI mulai menyerang Demokrasi Perlemitter. Soekarno menyalahkan sistem itu untuk kesulitan-kesulitan yang semakin bertambah di semua bidang baik itu krisis politik, ekonomi, korupsi dan pemberontakan, pergolakan agraris serta kefanatikan agama. Tahun 1956 Soekarno bahkan menyatakan keinginannya untuk “mengubur partai-partai” yang jumlahnya sudah melebihi 40 semenjak Syahrir mengeluarkan seruan pada bulan November 1945 untuk mendirikan partai-partai.

Pada tahun 1956 Soekarno melakukan perjalanan ke negara-negara sosialis. Hal ini memperkuat keyakinannya bahwa hanya melalui Demokrasi Terpimpin “Sentralisme demokratis” dari tahun 1930-an maka tujuan masyarakat adil dan makmur dapat dicapai dengan baik. Dalam “konsepsi”nya yang diumumkan pada bulan Februari 1957, Soekarno menyerukan pembentukan Kabinet Gotong-Royong yang akan mengikutsertakan PKI sebagai salah satu partai besar dan pembentukan sebuah Dewan Nasional yang terdiri dari semua golongan fungsional dalam masyarakat (Petani, Mahasiswa dan Wanita).<sup>24</sup>

Keadaan perang dan darurat perang (SOB) untuk menghadapi pemberontakan yang meluas di pulau-pulau di luar Jawa diberlakukan pada

<sup>23</sup> Bernhard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 403-404.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 404.



tanggal 14 Maret 1957. Hal ini merupakan pukulan berat bagi Demokrasi Perlemerter di Indonesia. Tanpa mengalami kesulitan Soekarno dapat membentuk Dewan Nasional yang telah diusulkan walaupun terpaksa mengesampingkan gagasannya untuk membentuk sebuah Kabinet Gotong-Royong yang mengikutsertakan PKI karena mendapat tantangan yang semakin besar dari semua pihak. Pada peringatan ulang tahun PNI yang ke-30 bulan Juli 1957, Soekarno melalui pidatonya menegaskan kembali cita-cita lamanya yaitu Marhaenisme dan Sosio-Demokrasi yang menekankan kolektivisme dan menolak liberalisme. Pada kesempatan-kesempatan sebelumnya bagi Soekarno sudah jelas bahwa “politik Liberal tidak akan membawa kita pada kemakmuran dan keadilan sosial seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar kita”. Karena hanya dengan menganut asas-asas lama maka semangat Pancasila, semangat tolong-menolong dan toleransi di antara sesama bisa menjadi efektif.<sup>25</sup>

Soekarno tidak menyimpang satu langkahpun dari cita-cita lamanya itu meskipun ada orang yang menyatakan bahwa Bung Karno sudah menjadi seorang komunis. Ia menegaskan dalam pidatonya pada tanggal 3 Juli 1957 di Bandung yang diberi judul Marhaen and Proletar yaitu : ”Aku memang ke Uni Soviet dan Cina, tapi aku bukan komunis; aku berpegang pada Pancasila, sekarang maupun dulu aku masih Soekarno dari 1927”.<sup>26</sup>

Perkembangan politik sejak terbentuknya Kabinet Karya pada bulan April 1957 sampai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ditandai dengan prestise dan peranan partai yang merosot serta group non-partai yang berkembang dengan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 405.

<sup>26</sup> Lihat pidatonya pada tanggal 3 Juli 1957, di Bandung yang diberi Judul “Marhaen and Proletar”.



pesat. Partai-partai ini mencoba untuk menyelamatkan sistem parlementer, tetapi karena berbagai sebab usaha itu tidak berhasil. Angkatan Darat dengan dalih *Martial Law* dan juga dengan alasan hak bagi setiap opsir sebagai individu serta hak Angkatan Darat sebagai golongan fungsional, akhirnya Nasution berhasil merealisasikan itu semua dengan memberi kesan akan melakukan *Coup* bila ditolak. Sejak saat itu Angkatan Darat menjalankan apa yang sekarang disebut *Dwifungsi*. Dalam menghadapi situasi yang suram itu dikemukakanlah berbagai gagasan, baik oleh pemerintah, Angkatan Darat, Dewan Nasional maupun partai-partai sehingga mereka mengadakan *Open Talks* pada akhir 1957 dan awal tahun 1959 yang meliputi berbagai masalah, yaitu :<sup>27</sup>

1. Penyederhanaan sistem kepartaian perlu diselenggarakan,
2. Perbaikan sistem perwakilan dengan memasukan wakil-wakil golongan fungsional termaksud Angkatan Darat untuk mengimbangi perwakilan partai-partai.
3. Untuk mengimbangi perwakilan partai-partai suatu Badan yang disebut Front Nasional harus dibentuk. Anggota Front Nasional terdiri dari wakil-wakil dari golongan fungsional dan badan ini diberi hak ikut ambil bagian dalam pemilihan umum. Karena Front Nasional berperanan sebagai "Partai Negara", untuk berlomba-lomba dengan partai-partai politik di dalam pemilihan umum, dengan begitu partai-partai dididik untuk bekerja keras dan beramal benar-benar kepada masyarakat supaya memperoleh dukungan di dalam parlemen, jika tidak demikian mereka akan kehilangan pendukung dan kalah dalam pemilihan umum.

---

<sup>27</sup> G. Moedjanto, "Demokrasi Terpimpin", *op. cit*, hlm. 6.

4. Diperkenalkan prinsip “musyawarah untuk mufakat” sebagai pengganti “prinsip Stem-Steman” ke dalam parlemen dan dengan begitu diubah pula peranan parlemen dari badan legislative kepada siapa pemerintah bertanggung jawab, ke badan perwakilan kepada siapa pemerintah bekerja sama sehingga budaya oposisi perlu dihilangkan.

Gagasan tersebut tidak disetujui sepenuhnya oleh semua partai termasuk PNI. Gagasan yang tidak disetujui yaitu gagasan mengenai pembentukan Front Nasional. PKI juga menolak adanya rencana keanggotaan yang diangkat yaitu yang mewakili Angkatan Darat karena parlemen adalah Badan Perwakilan Rakyat. Melihat tidak adanya penyelesaian politik yang pasti pada awal tahun 1959, maka Nasution mengulangi usul yang pernah dikemukakannya pada bulan Mei 1958 yaitu perundangan kembali UUD 1945. Dasar pertimbangan usul itu ialah bahwa UUD'45 dapat menjamin adanya pemerintahan yang kuat dan dapat memecahkan persoalan golongan fungsional menjadi lebih fleksibel. Di samping itu diatur pula tentang perwakilan daerah-daerah yang dapat menjadi penyalur aspirasi daerah-daerah (bisa mendorong kembalinya kaum pemberontak) dan mengembalikan semangat perjuangan 1945 serta memberi kemungkinan yang baik kepada Pancasila secara simbolis yang berarti kehidupan kembali semangat revolusioner.<sup>28</sup>

Ketika Soekarno mengusulkan “NASAKOM” dan rencana pembentukan Kabinet Berkaki Empat, yaitu kabinet yang di dalamnya duduk semua unsur politik Islam, Nasionalis, Sosialis dan Komunis telah menimbulkan kekhawatiran

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 6-7.

bahwa kaum komunis akan dapat memanfaatkan “NASAKOM” sebagai “Front Bersatu” untuk merebut kekuasaan. Bagi PKI, NASAKOM merupakan sarana yang menguntungkan karena PKI menganggap NASAKOM sebagai bentuk keseimbangan antara Nasionalis, Agamais, dan Komunis pada tingkat eksekutif pemerintahan dan dewan-dewan perwakilan, sedangkan Angkatan Bersenjata hanya melihat sebagai bentuk kerjasama dalam semangatnya yang umum berkaitan dengan jalannya urusan negara.<sup>29</sup>

Bagi Soekarno NASAKOM hanyalah sebagai strategi untuk tetap menjadi pemegang keseimbangan antara kekuatan-kekuatan politik yang saling bersaing dan bertentangan. Soekarno sendiri merasa tidak yakin mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan politik yang saling berlawanan tersebut, karena Soekarno masih mencari taktik yang tepat untuk mengatasi konflik dan perpecahan yang terjadi. Soekarno hanya ingin tetap menjadi pemegang kendali persatuan dengan menempatkan dirinya pada posisi sentral.

Soekarno ternyata mampu memainkan perannya dengan baik. Siasat menciptakan konflik untuk mencapai konsensus ternyata berhasil, dengan berdasarkan politik mencari kambing hitam (*Scapegoating Politics*).<sup>30</sup> Perkembangan PKI yang cepat mencemaskan partai-partai lain. Namun PKI tidak sepenuhnya merasa lega karena harus menghadapi kekuatan *social politic* baru yang perlu diperhitungkan yaitu Angkatan Darat. Sebab Angkatan Darat berhasil menghancurkan pergolakan daerah yang membuat prestisenya semakin tinggi dan kekuatannya semakin kokoh. PKI memandang hal itu sebagai bahaya bukan saja

---

<sup>29</sup> Legge, J.D. (ed), "Sukarno A Political Biography", Diterj. Sukarno Sebuah Biografi Politik. Sinar Harapan, Jakarta. 2000, hlm. 400.

<sup>30</sup> Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hlm. 193.

dilihat dari segi kekuatan fisik tetapi dari segi ideologi karena sebagian besar anggota Angkatan Darat terutama pemimpinnya adalah anti komunis. Maka PKI terpaksa mencari kekuatan lain yang bisa menjadi pelindungnya yaitu Presiden Soekarno yang kekuatan politiknya juga menanjak bersama dengan perkembangan Angkatan Darat.<sup>31</sup>

Keunggulan yang dimiliki oleh PKI membuat partai ini semakin disenangi oleh Soekarno yang membutuhkan dukungan untuk menghadapi Angkatan Darat. PKI ternyata mampu mengikat (mengeksplotasi) Soekarno. Karena Soekarno memegang kekuasaan yang besar maka sebagai akibatnya hubungan PKI dan Soekarno sangat dekat, sehingga partai ini berani melakukan berbagai aksi menghadapi keadaan yang dianggap menguntungkan dan menyingkirkan berbagai organisasi yang dianggap musuhnya.<sup>32</sup>

Pada bulan September 1963 Presiden Soekarno lebih cenderung memihak ke golongan kiri, hal ini disebabkan adanya kekhawatiran akan terjadi *coup* militer dan ia merasa PKI sanggup memenuhi kewajiban mempertahankan agitasi politik Presiden. Di samping itu pada dasarnya Presiden Soekarno selalu curiga terhadap Angkatan Darat karena perwira-perwiranya menginginkan berdirinya pemerintahan yang dipimpin atau tergantung pada Angkatan Darat, sedangkan lawan-lawan politiknya yaitu Hatta dan Masyumi mungkin akan memegang peranan yang besar di dalamnya. Oleh karena itu Presiden sangat membutuhkan kawan yang sangat diandalkan, yaitu PKI.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> G. Moedjanto, *op.cit*, hlm. 8.

<sup>32</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20 jilid 2*, Kanisius, Yogyakarta, 1989, hlm. 136.

<sup>33</sup> G. Moedjanto, "Demokrasi Terpimpin", *op.cit*, hlm. 12.



Sejak Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil Presiden pada bulan Desember 1956 membuat kedudukan Soekarno semakin sulit. Figurnya sebagai bapak pemersatu bangsa perlahan-lahan mulai pudar, sehingga untuk mengembalikan figurnya itu Soekarno mulai menjalin hubungan dengan PKI. Hal ini dapat dibuktikan dengan dipilihnya PKI sebagai kawan yang bisa diandalkan daripada PNI. Walaupun PNI yang mengangkat Bung Karno sebagai bapak Marhaenisme ternyata tidak diakui oleh bapaknya sebagai anak yang paling tepat dan revolusioner dalam menafsirkan ajaran-ajaran sang bapak. Sehingga hampir boleh dikatakan bahwa PKI-lah yang justru sebagai “penafsir” ajaran-ajaran Marhaenisme khususnya atau revolusi Indonesia pada umumnya dan memonopoli penafsiran ajaran-ajaran Soekarno untuk disesuaikan dengan arah yang dikehendaki. Kepandaian PKI inilah yang membuat Soekarno membiarkan tindakan partai itu mengkorup ajaran-ajarannya.

Soekarno lebih memilih menjalin hubungan dengan PKI daripada PNI karena Soekarno sangat membutuhkan PKI yang merupakan partai progresif dan terorganisir dengan baik untuk dapat mengimbangi Angkatan Darat. Selain itu Soekarno sangat tertarik kepada komunis dan yakin kalau hanya PKI-lah yang kekuatannya dapat diandalkan sedangkan PNI ternyata korup dan pada dasarnya konservatif dan mempunyai sifat kekanak-kanakan dan sangat jelas tidak mungkin dapat membantunya untuk mencapai tujuan revolusi. Soekarno juga mempunyai pandangan bahwa PKI akan ikut bertanggung jawab akan kesalahan-kesalahan politik pemerintah untuk itulah ia menjalin hubungan dengan PKI.



#### D. Kedudukan ABRI Masa Demokrasi Terpimpin 1959 - 1966

Periode tahun 1957 – 1959 disebut sebagai masa transisi dalam kehidupan politik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Mayor Jenderal A. H. Nasution sebagai KSAD menitikberatkan tindakannya untuk mengurangi dan menghilangkan “*political weakness*” yang merupakan kelemahan paling fundamental yang ada pada TNI, sehingga Jenderal Nasution berusaha mendapatkan “*legitimacy*” atau “dasar hukum” bagi TNI untuk melakukan peranan-peranan non-militer dalam hal ini peranan politik yang selama ini belum dimiliki TNI.<sup>34</sup>

Selama pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, golongan fungsional terutama TNI ditempatkan dalam suatu posisi yang sulit. Pada satu pihak TNI berusaha berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan pada pihak lain TNI harus menghadapi berbagai rongrongan intimidasi dan usaha dominasi PKI. Presiden Soekarno membiarkan berlangsungnya proses *balance of power* antara dua kekuatan politik utama pada waktu itu yakni TNI dan PKI.<sup>35</sup>

Tindakan Soekarno kembali ke UUD 1945 yang didukung oleh ABRI dipandang sebagai salah satu usahanya untuk mengatasi berbagai kemelut yang terjadi di lapangan politik saat itu. Kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno ini lebih mencerminkan usaha penumpukan kekuasaan ke tangannya karena pada masa Demokrasi Terpimpin hanya ada dua kekuatan yang mendapat

---

<sup>34</sup> Jahja Muhamin, *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945 – 1966*, Seri Penerbitan Skripsi Terbaik, Yogyakarta, 1971, hlm. 86.

<sup>35</sup> Nugroho Notokusanto (ed), *Pejuang dan Prajurit, Konsepsi dan Implementasi Dwi Fungsi ABRI*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983 hlm. 103.

simpati dari Presiden Soekarno yaitu PKI dan ABRI.<sup>36</sup> Pada tahun 1961 terjadi pemusatan kekuasaan ABRI di tangan Presiden Soekarno di mana panglima Angkatan Bersenjata berada di tangan presiden. Kenyataan ini merupakan suatu kebijaksanaan baru dalam konstelasi politik Indonesia yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Namun pada tahun 1966 – 1964 ABRI berperan besar dalam ikut serta membebaskan Irian Jaya dan berkonfrontasi dengan Malaysia.

Kesuksesan yang dicapai oleh ABRI dalam membebaskan Irian Barat (Irian Jaya) berkat adanya kerjasama dalam bidang militer dan diplomasi. Karena diplomasi tanpa dukungan dari kekuatan militer akan sia-sia.<sup>37</sup> Stabilitas keseimbangan kekuatan di masa Demokrasi Terpimpin tergantung pada kelanjutan kerjasama antara Presiden Soekarno dan pimpinan Angkatan Darat. Sebagai dua kekuatan politik yang paling berkuasa mereka telah bekerja sama untuk menggantikan sistem lama dan sama-sama berkeinginan untuk memelihara ketetapan-ketetapan politik yang baru meskipun kepentingan mereka tidak selalu sama.

Hubungan antara Presiden Soekarno dan pimpinan Angkatan Darat didasarkan pada kebenaran bersama bahwa salah satu pihak tidak dapat meremehkan pihak lain. Kekuatan politik para pemimpin tentara didasarkan pada suatu organisasi yang meliputi seluruh negara yang mampu menggunakan kekuatan yang berada di bawah kontrol mereka. Di lain pihak para pemimpin Angkatan Darat harus mengakui kewibawaan Soekarno sebagai presiden yang telah memancarkan keabsahannya kepada pemerintah yang tidak mungkin ada

---

<sup>36</sup> Muhammad Rusli Karim, *Peranan ABRI Dalam Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia (1965-1979)*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989, hlm. 30.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 41.

tanpa Soekarno. Oleh karena itu baik Soekarno maupun para pimpinan Angkatan Darat memilih untuk mencari akomodasi dalam hal pembagian kekuasaan daripada melakukan upaya untuk membangun suatu ekonomi yang tidak tertandingi.

Kesediaan Soekarno dan para pemimpin Angkatan Darat untuk bekerjasama telah dipermudah oleh iklim ketegangan yang terjadi sejak tahun 1957. Setelah berhasil membubarkan sistem parlementer dan mengalahkan pemberontakan-pemberontakan daerah mereka kemudian terbenam ke dalam kesibukan bersama dalam rangka kampanye pembebasan Irian Barat. Sebab pendudukan yang terus berlanjut oleh Belanda atas Irian Barat dianggap sebagai penghinaan nasional oleh hampir seluruh kelompok politik. Kampanye itu dilakukan sebagai kelanjutan revolusi 1945 yang sekali lagi mengilhamkan rakyat untuk merelakan kepentingan-kepentingan mereka sendiri demi persatuan masa depan bangsa.<sup>38</sup>

Situasi krisis yang berlanjut setelah tahun 1957 telah membuka kesempatan bagi perluasan yang pesat untuk kekuatan politik tentara. Kedudukan politik Angkatan Darat semakin diperkuat bersamaan dengan perkembangan kampanye pembebasan Irian Barat yang bergeser dari upaya-upaya diplomatik ke upaya-upaya militer. Sehingga pada bulan Desember 1961, Soekarno membentuk Komando Tentara Pembebasan Irian Barat (KOTI) yang berada di bawah pimpinannya sendiri dengan Nasution sebagai wakil dan Mayor Jenderal Yani sebagai kepala staf bagian operasi ditempatkan ke bawah Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala untuk pembebasan Irian Barat.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1986, hlm. 47.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 48.

Selaku Panglima Tertinggi Bung Karno pada hari Angkatan Perang tanggal 5 Oktober 1959 pernah memberikan perintah harian kepada seluruh Angkatan Bersenjata baik prajurit, bintara maupun dari perwira keempat angkatan sebagai berikut :<sup>40</sup>

*Pertama* : sesuai dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali kepada UUD 1945 maka selaku Angkatan Perang Republik Indonesia harus benar-benar menjadi pelopor perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia.

*Kedua* : seluruh anggota Angkatan Perang Republik Indonesia harus setia kepada janji dan sumpah prajurit, setia kepada Sapta Marga, setia kepada Sang Merah Putih, setia kepada bangsa dan Negara Republik Indonesia.

*Ketiga* : seluruh anggota Angkatan Perang Republik Indonesia harus senantiasa bisa memelihara disiplin serta sendi-sendi dan norma-norma tentara yang seharusnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

*Keempat* : Undang-undang Dasar negara adalah azas tentara. Undang-undang negara adalah politik tentara.

*Kelima* : tentara tidak mengenal suatu paham politik. Tentara hanya membela negara dan paham politik negara.

*Keenam* : tentara tidak mengenal kompromi di dalam membela negara dan paham politik negara.

*Ketujuh* : seluruh anggota Angkatan Perang Republik Indonesia harus memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memelihara keutuhan Tentara

---

<sup>40</sup> Solichin Salam, *Bung Karno Putera Fajar*, Gunung Agung, Jakarta, 1966, hlm. 127-128.



Nasional Indonesia yang bersendikan Sapta Marga dengan hukum dan disiplin tentara.

*Kedelapan* : tentara sebagai pejuang patriot di bidang keprajuritan harus memiliki jiwa berkobar-kobar, berkeyakinan seperti baja dan mempunyai mental yang kuat.

Bung Karno selalu menanamkan suatu "*super gloof*" kepada Angkatan Perang kepercayaan yang dapat memberikan dorongan kepada Angkatan Perang untuk tetap berjuang. Angkatan Bersenjata di bawah pimpinan Bung Karno sebagai Panglima Tertinggi makin kuat dan sempurna sehingga menjadi kebanggaan nasional yang ditakuti dan disegani oleh lawan dan kawan. Karena Bung Karno dengan gigih dan keuletannya selalu berusaha untuk menyempurnakan Angkatan Bersenjata dari Angkatan Perang yang hanya bersenjata golok dan bambu runcing menjadi Angkatan Bersenjata yang memiliki persenjataan modern. Namun kecintaan dan kesetiaan ABRI kepada Bung Karno bukan berarti bahwa ABRI tidak berani mengoreksi kepada Pangti karena loyalitas ABRI adalah hidup dan tidak mati.

Kedudukan ABRI pada masa Demokrasi Terpimpin sangat penting di mana ABRI ikut berperan dalam pembebasan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia maka hal inilah yang mengakibatkan ABRI lebih berperan dalam politik di Indonesia.

#### **E. Demokrasi Terpimpin**

Sejak jaman Kabinet Ali II Presiden Soekarno melihat dan menilai bahwa sistem parlementer yang dipraktekkan dan diterapkan di Indonesia sebagai



sesuatu yang tidak baik, maka Soekarno mengemukakan gagasannya untuk memperkenalkan sistem pemerintahan atau sistem politik baru,<sup>41</sup> yang kemudian dikenal dengan Demokrasi Terpimpin. Dengan demikian maka secara *de facto* kekuasaan beralih ke tangan Soekarno setelah ia menyampaikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan sekaligus mengakhiri Demokrasi Perlempenter.

Demokrasi Terpimpin bukan sekedar demokrasi dengan sistem-sisteman, melainkan suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.<sup>42</sup> Selain itu Demokrasi Terpimpin bukan konsep yang siap pakai atau yang mempunyai definisi yang jelas karena pada awalnya konsep tersebut hanya merupakan ide Presiden Soekarno yang luas dan kabur yang dimaksudkan untuk menangani masalah-masalah yang semakin bertumpuk yang dihadapi negara yang pemerintahannya sedang dirumuskan oleh konstituante, tetapi dengan berjalannya waktu konsep tersebut berubah menjadi konsep politik yang sama sekali berbeda yaitu dimaksudkan untuk meruntuhkan konsep pemerintahan parlementer.<sup>43</sup>

Langkah pertama yang digunakan untuk melaksanakan gagasan Demokrasi Terpimpin adalah Konsepsi Presiden yang dicetuskan pada tanggal 21 Februari 1957 yang berisi pokok pikiran sebagai berikut :<sup>44</sup>

1. Pembentukan suatu Kabinet Gotong Royong dengan semua partai besar (PNI, Masyumi-NU-PKI) diwakili di dalamnya. Karena didukung oleh 4 partai besar maka disebut juga kabinet berkaki empat.

---

<sup>41</sup> G. Moedjanto, "Demokrasi Terpimpin", SPPS, seri XV no 1, Sanata Dharma, Yogyakarta, 1988, hlm. 2.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>43</sup> Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, trj. Sylvia Tiwan, Pustaka Utama Grafik, Jakarta, 1955, hlm. 301.

<sup>44</sup> G. Moedjanto, *op.cit*, hlm. 3.

2. Pembentukan suatu Dewan Nasional yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil golongan fungsional sebagai Badan Penasehat. Dengan demikian maka Kabinet akan mencerminkan partai-partai dalam parlemen sedangkan Dewan Nasional akan mencerminkan atau mewakili masyarakat.

Pada kenyataannya hanya dua partai yang mendukung konsepsi tersebut yaitu PNI dan PKI sedangkan partai lain menolak konsepsi itu karena PKI diikutsertakan dalam Kabinet Gotong Royong. Partai yang menolak konsepsi itu antara lain: Masyumi, NU dan partai-partai Kristen. Walaupun ada beberapa partai yang menolak konsepsi tersebut tetapi Presiden tidak mau mundur dan tetap mengambil langkah yang berani.

Perkembangan Demokrasi Terpimpin dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama bulan Februari 1957 - Juli 1958 yang mencakup perkembangan sejak muncul sampai berakhirnya pemberontakan daerah. Pada tahap ini ide Demokrasi Terpimpin masih kurang berkembang dalam pengertian konseptual karena Dewan Nasional baru dibentuk. Satu-satunya kejelasan ialah keinginan untuk meninggalkan sistem politik yang berlaku yang disebut "Demokrasi Liberal", terutama sistem kepartaian dan pemerintahan parlementer yang Soekarno kecam sebagai penyebab semua permasalahan yang harus dihadapi negara dan untuk menggantikannya dengan Demokrasi Terpimpin yang dapat menjamin stabilitas politik.

Tahap kedua yaitu bulan Juli 1958 - November 1958. Pada tahap ini diusahakan perumusan ide dasar Demokrasi Terpimpin sehingga menyebabkan terjadinya pertentangan antara pendukung dan penentang Demokrasi Terpimpin



semakin jelas. Masalah yang utama ialah dasar konstitusional bagi Demokrasi Terpimpin dan kedudukan konstitusional bagi golongan fungsional yang merupakan model perwakilan rakyat di bawah pengawasan pemerintahan yang baru dibentuk di tengah-tengah partai-partai politik.

Tahap ketiga yaitu bulan November 1958 - Juli 1959. Pada tahap ini Demokrasi Terpimpin memasuki tahap pelaksanaan dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan seluruh sistem politik serta Angkatan Darat mulai memainkan peranannya yang menentukan.<sup>45</sup>

Jatuhnya Kabinet Ali II membuat Presiden Soekarno belum mau dan belum bisa melaksanakan konsepnya dengan paksaan (kekerasan) atau mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan gagasan Demokrasi Terpimpinnya. Terbukti dengan pengangkatan Suwiryo sebagai ketua umum PNI yang merupakan formatur kabinet dengan masa kerja yang cukup lama. Suwiryo tidak berhasil membentuk kabinet sehingga Soekarno membentuk Kabinet Darurat Extra-Parlementer (*Emergency Extra-Parliamentary Business Cabinet*), dan berhasil membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Karya dengan Djuanda sebagai Perdana Menteri. Soekarno mulai mengambil tindakan-tindakan yang inkonstitusional setelah pembentukan Kabinet Karya. Salah satu tindakan inkonstitusional yang diambil oleh Presiden Soekarno adalah penyusunan program Kabinet Karya yang disesuaikan dengan keinginannya antara lain berupa pembentukan Dewan Nasional yang ternyata menjadi lembaga tinggi negara di samping lembaga-lembaga tinggi lainnya yang sudah ada. Dewan

---

<sup>45</sup> Adnan Buyung Nasution, *op.cit*, hlm. 302.

Nasional tidak diatur atau disebut dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS).<sup>46</sup>

Pembentukan Kabinet Karya telah merintis jalan ke arah terselenggaranya Demokrasi Terpimpin. Konsep Demokrasi Terpimpin pada awalnya dibentuk atas dasar sikap anti partai telah mempercepat proses kemerosotan lembaga-lembaga kepartaian sehingga Soekarno bersama dengan Angkatan Darat bekerjasama untuk memperlemah peranan partai-partai politik dalam pemerintahan sampai dengan tahun 1960. Soekarno berharap agar pada awal tahun 1960 dapat menghasilkan terbentuknya sebuah partai negara atau dengan kata lain sebuah front yang kuat dengan meleburkan partai-partai politik menjadi satu. Soekarno memutuskan untuk membentuk Front Nasional yang lemah dengan membiarkan partai-partai itu secara organisatoris tetap utuh dan keyakinan itu tercermin dalam komposisi Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR).

Perkembangan Demokrasi Terpimpin pada awalnya membuat beberapa partai politik mengambil langkah kebijakan politik untuk menyesuaikan diri, sebab setelah Dekrit diumumkan Presiden Soekarno mengeluarkan beberapa peraturan yang tidak dikenal dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945 tetapi dianggap sebagai konsekuensi pelaksanaan berlakunya kembali UUD 1945. Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, Soekarno adalah pemegang kendali inisiatif politik terutama dengan tindakan dan janjinya yang langsung ditujukan kepada pembentukan kembali struktur pemerintahan konstitusional. Dalam perkembangannya peraturan tersebut mengalami pergeseran tindakan yang bersifat simbolis dan ritual, khususnya perumusan ideologi dengan melemparkan

---

<sup>46</sup> G. Moedjanto, *op.cit*, hlm. 3-4.



gagasan-gagasan yang sering diulang-ulang.<sup>47</sup> Hal ini sebenarnya tidak disukai oleh tentara sebab tentara lebih menghendaki suatu tindakan yang nyata seperti ketika Soekarno menyerukan konfrontasi terhadap Malaysia tahun 1963, Angkatan Darat tidak memberikan reaksi yang berarti karena dinilai tidak ada manfaatnya. Tentara justru mengadakan kontak-kontak rahasia dengan Malaysia dan Singapura untuk menghindari konfrontasi tersebut.

Era Demokrasi Terpimpin yang diwarnai dengan ketegangan antara Angkatan Darat dan PKI telah menimbulkan suatu konflik yang tidak sehat di mana kedua kekuatan ini saling bersaing untuk menuju puncak kekuasaan dan prestise sesaat. Hal ini ternyata berdampak kurang baik terhadap keefektifan dan efisiensi pemerintahan. Soekarno mencoba meyakinkan rakyat dengan mempertahankan stabilitas politik dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa (*Nation Building*), untuk menjaga agar posisi pemerintah tidak semakin goyah sehingga pemerintah kemudian lebih memusatkan perhatian pada penguasaan politik dalam hal ini pihak Angkatan Darat (Tentara). Meskipun Soekarno dan Angkatan Darat merupakan mitra dalam kekuasaan yang bekerjasama secara erat namun ternyata memiliki orientasi yang berbeda dalam mengelola pemerintahan. Orientasi Soekarno lebih ditekankan mengenai masalah-masalah Indonesia yang berpusat pada persatuan dan semangat nasional dengan menegaskan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada mempertahankan semangat revolusioner dengan mempertalikan rakyat dengan pemerintah. Bagi Soekarno stabilitas politik dapat mengatasi masalah-masalah yang ada secara efektif. Sedangkan pihak Angkatan Darat lebih berorientasi pada pembenahan

---

<sup>47</sup> Feith Herbert, "Dynamics of Guided Democracy", Diterj Soekarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin, Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 79.

ekonomi dan pemerintahan. Sehingga pemberontakan-pemberontakan di daerah yang harus diatasi oleh tentara dinilai merupakan kegagalan pemerintah dalam menghadapi masalah-masalah intern. Oleh karena itu pihak tentara lebih menyukai cara-cara pendekatan yang dilakukan Soekarno menyangkut ekonomi dan pemerintahan.

Sebagian besar tentara masih mendukung gagasan nasionalistis dan anti Barat Soekarno. Tetapi Angkatan Darat menolak usaha Soekarno untuk mengikutsertakan PKI dalam birokrasi kekuasaan sebab pihak Angkatan Darat memandang PKI sebagai *natural enemy*-nya (musuh sejati), bukan karena PKI adalah non-nasionalis, atheis dan di bawah penguasaan asing (Komintern) tetapi dikarenakan PKI merupakan satu-satunya partai terkuat yang mengancam kepentingan politik Angkatan Darat. Di lain pihak Soekarno memang membutuhkan dukungan kaum komunis untuk mempertahankan kekuasaannya setelah menyadari dirinya tidak dapat mengontrol Angkatan darat seluruhnya terutama dalam bidang politik. Soekarno dalam banyak hal merasa memiliki kesamaan dengan PKI.<sup>48</sup>

Berlakunya Demokrasi Terpimpin menimbulkan terjadinya suatu perubahan dalam sistem politik Indonesia. Dalam kaca mata dunia Barat, Indonesia telah jatuh ke sistem kekuasaan otoriter sebab semua kekuasaan berada dalam satu tangan yaitu Soekarno. Meskipun terdapat lembaga-lembaga seperti DPR, MPRS, tetapi dengan dibentuknya Dewan Nasional praktis kekuasaan berada di tangan Soekarno. Sejak saat itu semua lembaga politik seperti DPR,

---

<sup>48</sup> Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1982, hlm. 134.

MPRS, Dewan Nasional dan Dewan Pertimbangan Agung bekerja di bawah komando Soekarno.

Dengan terbentuknya Demokrasi Terpimpin maka lengkaplah sudah keinginan Soekarno untuk menggenggam urusan politik sepenuhnya dengan tujuan menyelamatkan revolusi dan bangsa. Soekarno membawa bangsa Indonesia ke sistem pemerintahan tradisional yang diberi bentuk modern. Semua kekuasaan berada di tangan Soekarno dan ia menjadi pusat kekuasaan. Sistem ini merupakan suatu sistem yang tidak bisa terjadi menurut dunia Barat.<sup>49</sup>

Bagi Soekarno kegagalan kepartaian Indonesia bersumber pada :<sup>50</sup>

“... banyak dari partai partai itu tidak menunjukkan perbedaan-perbedaan besar yang prinsipil... partai-partai itu sangat boleh jadi hanya disebabkan oleh nafsu menonjolkan diri dari beberapa orang yang merasa kurang mendapat perhatian masyarakat... nafsu ingin berpengaruh... dia mau kursi, bukan demokrasi”.

Demokrasi Terpimpin dalam pelaksanaannya mendapat tantangan. Indonesia dianggap oleh para kritikus telah jatuh ke pemerintahan otoriter, di mana segala aspek kehidupan ditentukan oleh satu tangan. Salah satu kritikus tersebut adalah Mohammad Hatta yang menyatakan bahwa Demokrasi Terpimpin merupakan demokrasi yang hanya didukung oleh kelompok-kelompok tertentu saja yang akan menjauhi demokrasi. Menurut Hatta selama Demokrasi Terpimpin disetujui oleh sebagian besar kekuatan-kekuatan politik dan kelompok yang memegang kekuasaan, maka kekuatan-kekuatan demokratis tidak akan dapat berbuat apa-apa. Soekarno adalah seorang yang mencintai rakyat dan negaranya, namun tidak dapat diingkari bahwa hal tersebut menyebabkan ia ingin menanggapi semua masalah atas tanggungjawabnya sendiri. Soekarno hanya

<sup>49</sup> Dr.Nazaruddin Sjamsuddin (ed), *Soekarno Pemikiran dan Kenyataan Praktek*, Rajawali Press, Jakarta, 1988, hlm. 80-82.

<sup>50</sup> Soekarno, *Pidato Kenegaraan 1955*.

melihat masalah secara garis besarnya dan sebagai akibatnya adalah kenyataan yang diperolehnya kadang keluar dari apa yang diinginkan.<sup>51</sup>

Masalah konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tanggal 13 Agustus 1963 merupakan salah satu wujud ambisi politik Soekarno yang meluap-luap. Bermula dari rencana Inggris untuk melepaskan Singapura dari ancaman komunisme, pada saat itu sayap kiri *Peoples Action Party* (PAP) yang dikuasai komunis yang sangat berpengaruh, sehingga Inggris sangat khawatir jika dibiarkan berlarut, Singapura akan menjadi semacam kubu bagi Malaya. Maka Inggris mengusulkan pada Teuku Abdul Rahman untuk membentuk suatu federasi yang kemudian disebut Malaysia. Gagasa Inggris tersebut mendapat tanggapan positif dari Singapura.

Soekarno menganggap terbentuknya Malaysia sebagai ancaman yang membahayakan Indonesia, karena Malaysia dianggap sebagai proyek Neokolin (Istilah baru Neo-Kolonialisme Imperialisme). Ketidaksenangan Soekarno terhadap Malaysia rupanya sangat besar di mana Indonesia akhirnya keluar dari PBB pada tahun 1965 hanya karena Malaysia diterima menjadi anggota Dewan Keamanan. Hal ini nampaknya lebih didasarkan pada gejolak emosional saja. Tindakan Soekarno berikutnya adalah membuat poros Jakarta, Penompenh, Peking dan Pyongyang yang merupakan manifestasi rasa tidak senangnya terhadap Barat sehingga pada tahun-tahun kekuasaannya perhatian Soekarno lebih condong ke dunia sosialis dan komunis, Uni Soviet dan RRC.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Mohammad Hatta, "A Dictatorship Supported by Certain Group" dalam Feith Castles, hlm. 138-141.

<sup>52</sup> Dr. Nazaruddi Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm 89-91.



Selain masalah konfrontasi dengan Malaysia ada juga masalah dalam negeri yaitu masalah Irian Barat. Menurut Soekarno masalah Irian Barat merupakan sisa imperialisme-kolonialisme yang masih sangat mengganggu di matanya karena bagi Soekarno masalah ini akan mengurangi kedaulatan bangsa Indonesia. Sehingga menurut Soekarno Irian Barat harus kembali ke pangkuan Ibu pertiwi agar dapat menjadi kelengkapan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka Soekarno menegaskan perlunya melanjutkan revolusi untuk mencapai tujuan akhir masyarakat adil dan makmur dan tetap membulatkan tekad untuk tetap teguh dalam melawan bahaya Neo-kolonialisme.

Demokrasi pada dasarnya merupakan gagasan ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan jalannya pemerintahan dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi sebagai sistem politik memang masih dinilai yang terbaik sebab dengan demokrasi hak rakyat dalam negara dapat dijamin. Istilah Demokrasi pada umumnya memberi pengertian bahwa rakyat mempunyai posisi penting dalam kehidupan bernegara, sehingga Demokrasi Terpimpin mempunyai tujuan untuk menggali demokrasi asli Indonesia yang diawali dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai upaya menyelamatkan negara.

### BAB III

#### HUBUNGAN SOEKARNO DENGAN PKI WAKTU

#### GERAKAN 30 SEPTEMBER MELETUS

##### A. Sikap Soekarno Terhadap Gerakan 30 September

Pada tanggal 30 September 1965 malam hari, Presiden Soekarno menghadiri Musyawarah Besar Teknik (MUBESTEK) di Istora Senayan Jakarta. Di samping itu Soekarno memberikan amanat dan di dalam amanatnya itu ia mengatakan bahwa mental saya sudah sadar sekali bahwa rakyat Indonesia *gandrung* kepada satu masyarakat yang adil dan makmur, sosialisme tanpa penghisapan manusia oleh manusia tanpa *exploitation de l' homme par l' homme*. Pada waktu itu jiwaku sudah jiwa mental sosialis dan telah mengerti kalau sosialisme tidak bisa dibina tanpa pengetahuan teknik.<sup>1</sup>

Kolonel C.P.M. Maulwi Saelan wakil komandan Resimen Cakrabirawa pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari menerima berita melalui telepon dari Komisaris Besar Polisi Sumirat Ajudan Presiden tentang berita yang berasal dari Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas, Asisten Operasi Komdak VII/Jaya bahwa telah terjadi peristiwa penembakan di rumah Waperdam II Dr. Leimena, Jendral. TNI A.H. Nasution dan Brigjen TNI D.I. Panjaitan.<sup>2</sup> Mendengar berita tersebut Presiden menanyakan tentang keadaan para perwira tinggi, tetapi Presiden menerima laporan yang kurang baik sehingga ia meminta bukti dan alasan

---

<sup>1</sup> Dr. Asvi Warman Adam (ed.), *Revolusi Belum Selesai (kumpulan pidato Presiden Soekarno 30 September 1965-pelengkap Nawaksara) jilid I*, Mesiass, Semarang, 2003, hlm. 13.

<sup>2</sup> Sekertariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang Aksi dan Penumpasannya*, Jakarta 1994, hlm. 141.

tindakan tersebut. Kemudian Presiden Soekarno memerintahkan agar menghentikan gerakan untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah yang lebih besar lagi. Brigjen TNI Soepardjo setelah mendapat perintah dari Presiden mohon ijin kembali ke Cenko II untuk menyampaikan perintah Presiden kepada pimpinan Gerakan 30 September.

Selama berlangsungnya pembicaraan untuk menunjuk pejabat Men/Pangad yang baru sebagai pengganti Letjen TNI A. Yani, baik Presiden Soekarno sendiri maupun Waperdam II Dr. J. Leimena serta para pejabat lainnya sempat mendengarkan siaran RRI Jakarta tentang Dekrit No.1 Gerakan 30 September yang disiarkan oleh Letkol Untung sebagai komandan gerakan. Dalam Dekrit tersebut antara lain dinyatakan bahwa dengan jatuhnya segenap kekuasaan negara ke tangan Dewan Revolusi maka Kabinet Dwikora dengan sendirinya berstatus "Demisioner". Ketika mendengar Keputusan No.1 Dewan Revolusi tentang Susunan Dewan Revolusi Indonesia dan Keputusan No.2 Dewan Revolusi tentang Penurunan dan Penaikan Pangkat, Presiden Soekarno tidak memberi reaksi.<sup>3</sup>

Presiden Soekarno memberikan perintah kepada Brigjen TNI Soepardjo agar siaran tentang adanya Dewan Revolusi dihentikan. Kemudian Presiden Soekarno bersama rombongan meninggalkan ruang Ko OPS Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma menuju ke rumah Komodor Udara Susanto yang merupakan mantan Komandan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Presiden Soekarno bermaksud menunjuk Men/Pangad yang baru di sana. Sehingga Presiden Soekarno memberi perintah kepada para Ajudan yang ada

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 143-144 (untuk lebih jelas lihat lampiran 3-5 hlm. 107-111).

untuk memanggil Waperdam II Dr. J. Leimena, Jaksa Agung, Men/Pangal, Men/Pangab dan Pangdam V/Jaya Mayjen TNI Umar Wirahadikusumah supaya datang ke pangkalan Udara Halim Perdanakusumah.

Presiden juga memerintahkan kepada Brigjen TNI Sabur untuk membuat pengumuman bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan selamat. Brigjen TNI Sabur meminta bantuan kepada Brigjen TNI Soepardjo dalam menyusun pengumuman tersebut. Pernyataan itu akhirnya disiarkan RRI Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965 tengah malam menjelang tanggal 2 Oktober 1965. Pembicaraan untuk menunjuk pejabat Men/Pangad yang baru, dimulai sekitar pukul 13.00 WIB yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dan dihadiri oleh Dr. J. Leimena, Laksdya Laut R.E Martadinata, Laksdya Udara Omar Dhani, Irjen Pol. Soetjipto Joedodihardjo, Brigjen TNI Suthardio, Brigjen TNI Soenarjo, Brigjen TNI Sabur dan Brigjen TNI Soepardjo. Dalam rapat tersebut diusulkan beberapa nama calon yaitu Mayjen TNI Mursjid, Mayjen TNI Pranoto Reksosamodro, Mayjen TNI Basuki Rachman, Mayjen TNI Soeharto dan Mayjen TNI U. Rukman. Namun dari nama-nama calon tersebut Presiden memberikan penilaian yang kurang memungkinkan terhadap para calon tersebut. Penilaian tersebut adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Mayjen TNI Mursjid, dinilainya suka berkelahi;
- b. Mayjen TNI Pranoto Reksosamodro, dinilainya lamban dan bukan orang yang tepat untuk menjadi Pangad;
- c. Mayjen Basuki Rachmat dinilainya berpenyakitan;
- d. Mayjen TNI Soeharto dinilainya keras kepala dan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 145.



e. Mayjen TNI U. Rukman belum dikenalnya.

Sesudah mengadakan penilaian Presiden Soekarno meninggalkan tempat rapat dan masuk ke kamar, tetapi sekembalinya ditempat rapat beliau menyatakan keputusan bahwa untuk sementara jabatan pimpinan TNI-AD dirangkapnya dan Mayjen TNI Pranoto Reksosamodro ditunjuk sebagai *Care-taker* Pangad untuk melaksanakan tugas rutin sehari-hari dalam Angkatan Darat. Selain itu Presiden Soekarno juga memerintahkan agar semua pasukan tetap berada di pos masing-masing dan hanya bergerak atas perintah untuk menghindari pertumpahan darah.<sup>5</sup>

Pada tanggal 2 Oktober 1965 Mayjen TNI Soeharto menghadap Presiden di Istana Bogor untuk memenuhi panggilan Presiden Soekarno. Dalam pertemuan tersebut presiden Soekarno didampingi oleh Men/Pangau Laksdya Udara Omar Dhani dan Mayjen TNI Pranoto Reksosamodro. Presiden Soekarno menjelaskan kepada Mayjen TNI Soeharto bahwa AURI tidak terlibat dalam Gerakan 30 September, tetapi Mayjen TNI Soeharto menjawab bahwa dalam pelaksanaan gerakan tersebut terdapat oknum-oknum AURI yang terlibat. Pada kesempatan itu Mayjen TNI Soeharto membawa bukti sebuah senjata *Tjung* yang dirampas dari pemuda rakyat di Lubang Buaya yang bernomor register AURI.<sup>6</sup>

Namun Presiden Soekarno tidak yakin dengan pernyataan dari Mayjen TNI Soeharto tersebut, sehingga pada tanggal 3 Oktober 1965 Presiden Soekarno menegaskan tentang hal itu dalam pidatonya sebagai berikut :<sup>7</sup>

“..... Saya sebagai Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi mengumumkan bahwa : satu, tuduhan terhadap AURI tentang tersangkutnya dalam peristiwa 30 September ini adalah tidak benar. Dua, kepergian saya kepangkalan Udara Halim Perdanakusumah pada tanggal 1 Oktober pagi-

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 145-146.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 149.

<sup>7</sup> Revolusi Belum Selesai, *op. cit.* hlm. 18.

pagi adalah atas kehendak saya sendiri, karena saya berpendapat bahwa tempat yang terbaik bagiku ialah tempat dekat kapal udara yang dapat mengangkut saya tiap saat ketempat yang lain kalau terjadi sesuatu yang tak diharapkan. Tiga, kita harus tetap waspada jangan sampai AURI dan Angkatan Darat dapat diadu-dombakan, sehingga pihak nekolin dan pihak lain akan dapat keuntungannya. Maka saya perintahkan semua anggota seluruh angkatan bersenjata bersatu padu demi keselamatan negara dan revolusi....”.

Soekarno mengangkat Mayor Jenderal Soeharto untuk menyempurnakan Angkatan Darat dan membuat Angkatan Darat itu lebih kompak, lebih kuat dan memiliki senjata yang ampuh dalam perjuangan menghadapi musuh-musuh dari luar. Selain itu Presiden Soekarno juga memerintahkan kepada Jenderal Mayor Soeharto, yang isinya :

”Sekarang Angkatan Darat pimpinannya saya berikan kepadamu, buatlah Angkatan Darat ini satu Angkatan daripada Revolusi Indonesia, Angkatan Bersenjata daripada Republik Indonesia yang sama sekali menjalankan Panca azimat revolusi, yang sama sekali berdiri diatas Trisakti, yang sama sekali berdiri diatas Nasakom, yang sama sekali berdiri diatas prinsip Berdikari, yang sama sekali berdiri diatas Manipol-USDEK. Manipol-USDEK telah ditentukan oleh lembaga kita yang tertinggi sebagai haluan negara Republik Indonesia. Dan oleh karena Manipol-USDEK ini adalah haluan daripada Negara Republik Indonesia, maka dia harus dijunjung tinggi, dijalankan, dipupuk oleh kita semua”.<sup>8</sup>

Oleh karena Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Angkatan Kepolisian Negara adalah alat Negara maka perlu untuk bekerjasama untuk kepentingan negara. Sesuai dengan surat yang dikirim kepada Presiden Soekarno melalui kurir, D.N. Aidit menyarankan agar Presiden Soekarno mengambil langkah-langkah untuk hanya menindak anggota-anggota PKI yang terlibat di dalam Gerakan 30 September saja. Setelah Gerakan 30 September gagal maka hal yang dilakukan oleh Presiden Soekarno lebih mengarah pada

---

<sup>8</sup> Baca Pidato Soekarno tanggal 16 Oktober 1965, di Istana Negara Jakarta, pada saat Pelantikan Mayor Jenderal Soeharto menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat.

penyelamatan organisasi PKI dan paham Komunisme sebagaimana yang diinginkan oleh D.N. Aidit.<sup>9</sup>

Sikap dan tindakan Presiden Soekarno dapat disimak dalam pidato Presiden Soekarno kepada KAMI, pada tanggal 12 Desember 1965 yang menyatakan :

“.... Saya tahu, bahwa kamu itu adalah onderbouw dari sesuatu partai. Karena partai-partai itu main gontok-gontokan, maka kamu ikut gontok-gontokan. Seribu dewa dari kayangan tak dapat mematikan Nas, mematikan A dan mematikan Kom. Peruncingan itu yang harus kita hantam. Gestoknya yang harus kita hantam, tapi Kom-nya tak bisa dihantam.....”

Bagi Soekarno Nasakom adalah baik, oleh karena itu baik Nas maupun A, maupun Kom adalah salah satu *aangezicht rieel* daripada Revolusi kita ini, saya tidak berkata Kom is PKI. Saya juga tidak berkata Kom is PSI, tidak ! Saya tidak berkata Kom is Aidit, tidak ! Tetapi Kom sebagai satu realitas di dalam revolusi kita adalah tidak bisa dibantah. Sebab menurut Soekarno Nasakom adalah perlu mutlak untuk revolusi kita ini.<sup>10</sup>

Harus diakui bahwa sikap Soekarno terhadap Gerakan 30 September adalah sikap yang tepat. Dalam hal ini Soekarno tidak gegabah tetapi menurut beliau dalam menyelesaikan suatu masalah harus didukung dengan bukti-bukti yang tepat. Soekarno sangat tidak membenarkan peristiwa 30 September dan menganggap peristiwa 30 September adalah suatu kejadian penyakit yang membahayakan. Sehingga beliau memerintahkan diadakannya Mahkamah Militer Luar Biasa, untuk mengadili orang-orang yang bersalah di dalam Gestapu (Gerakan 30 September). Selain itu Soekarno juga mengatakan bahwa peristiwa

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op.cit.* hlm. 149-150.

<sup>10</sup> Baca Pidato Soekarno tanggal 23 Oktober 1965, pada sidang Panca Tunggal seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta.

30 September adalah satu peristiwa terkutuk dan merugikan kepada Revolusi Indonesia dan harus bertindak terhadap orang-orang yang terlibat dalam 30 September, tetapi ia juga meyakinkan kepada seluruh rakyat agar janganlah rakyat menjadi terpecah-belah dengan adanya peristiwa tersebut.

Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi, untuk mengatasi akibat-akibat dari Gestapu dalam melaksanakan Konfrontasi terhadap Neo kolonialisme dan Imperialisme (Nekolim), memberi Komando kepada seluruh *Slagorde* Dwikora yang menyatakan:

"Saya perintahkan: Satu, hindari segala tindakan yang dapat merugikan perjuangan kita. Dua, tingkatkan dan sempurnakan segenap *Slagorde* Dwikora yang telah disempurnakan. Tiga, kerahkan seluruh potensi guna kesempurnaan dan keamanan Ketahanan Revolusi".<sup>11</sup>

Selain itu Presiden juga menyadari bahwa sebagai akibat daripada peristiwa apa yang dinamakan Gerakan 30 September telah timbul fakta-fakta dan gejala-gejala yang membahayakan dan mengancam sendi-sendi kehidupan kenegaraan di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan yang akan berpengaruh pada peningkatan kesiap-siagaan baik mental dan fisik dalam menghadapi musuh Revolusi Neokolim dalam rangka penyelesaian Revolusi.

Suasana tenang dan tentram serta pulihnya keamanan dan ketertiban umum, sebagai syarat mutlak untuk mengamankan usaha-usaha mencapai tujuan Revolusi, maka Soekarno memberi komando kepada segenap aparat negara yang menyatakan:

"Saya komandokan segenap aparat negara bersama-sama dengan seluruh rakyat untuk selalu: Satu, membina kesatuan dan persatuan seluruh kekuatan nasional progresif

---

<sup>11</sup> Baca Pidato Soekarno tanggal 21 Oktober 1965.



revolusioner atas dasar Panca Azimat Revolusi. Dua, menyingkirkan jauh-jauh tindakan destruktif seperti rasialisme pembakaran-pembakaran dan pengrusakan-pengrusakan. Tiga, menyingkirkan jauh-jauh fitnahan-fitnahan dan tindakan-tindakan atas dasar perasaan balas dendam. Empat, melarang semua demonstrasi-demonstrasi yang tidak terlebih dulu dari yang berwajib. Nah, ini sebabnya saya marah kepada engkau. Lima, terus meningkatkan aksi-aksi massa yang Revolusioner secara konstruktif dan disiplin nasional yang tinggi”.<sup>12</sup>

Walaupun sikap dan tindakan Soekarno mengutuk Gestapu tetapi beliau tetap tidak menghapus dan menghancurkan Partai Komunis Indonesia dan Paham Komunis, karena bagi Soekarno paham Komunis dan PKI tidak bersalah tetapi yang bersalah adalah orang-orang yang melakukan Gerakan 30 September.

#### **B. Hubungan Soekarno dengan ABRI (TNI-AD) Pada Saat Gerakan 30 September Meletus**

Gerakan 30 September 1965 dimulai dengan gagasan sekelompok perwira Angkatan Darat, Kolonel Latief, Letnan Kolonel Untung, Mayor Sigit, Kapten Suradi dan Kapten Wahyudi. Mayor Udara Sujono atas tanggung jawabnya sendiri tanpa diketahui oleh siapapun dalam AURI ikut hadir dan aktif mengambil peran.<sup>13</sup>

Kemajuan pesat PKI pada tahun 1964-1965 berlangsung dalam selubung proyek konfrontasi melawan Malaysia. Pada awalnya Angkatan Darat tidak terlampau bersemangat menanggapi “konfrontasi” terhadap Malaysia tetapi secara bertahap pimpinan Angkatan Darat turut melakukan tekanan-tekanan militer yang makin kuat terhadap Sabah dan Sarawak setelah tahun 1963.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Lihat Pidato Soekarno tanggal 23 Oktober 1965, dalam *Revolusi Belum Selesai* hlm. 52.

<sup>13</sup> J.J. Kusni, *Intelligen dan Gerakan 30 September, Otobiografi Letkol (PNB) AURI Heru Atmojo*, Ombak, Yogyakarta, 2005, hlm. 167.

<sup>14</sup> Harold Crouch, *op. cit.*, hlm. 75.

Kedudukan Angkatan Darat dalam birokrasi pemerintahan negara tetap kuat sepanjang tahapan terakhir Demokrasi Terpimpin baik dalam kabinet maupun pemerintahan daerah. Dalam kabinet personil Angkatan Darat berjumlah seperempat dari seluruh anggota termasuk departemen-departemen penting yaitu Departemen Pertahanan dan Keamanan serta Departemen Dalam Negeri. Walaupun hal itu telah diusahakan oleh Soekarno agar Angkatan Darat tidak menempati posisi-posisi yang dominan.<sup>15</sup>

Sepanjang tahun 1965 situasi politik terpolarisasi lebih dari sebelumnya karena Presiden Soekarno terang-terangan telah menyatakan berpihak pada PKI dan melawan pimpinan Angkatan Darat. Sementara aksi-aksi PKI berangsur-angsur makin ditujukan kepada Angkatan Darat sendiri dan bukan hanya kepada sekutu-sekutu Angkatan Darat. Meskipun pimpinan Angkatan Darat tetap yakin bahwa kekuatan militer yang besar dapat menjamin PKI tidak pernah akan dapat bertindak leluasa, namun sejak bulan Mei 1965 Angkatan Darat mulai mempertimbangkan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melindungi kedudukannya.

Ketika pengaruh PKI semakin besar, para pemimpin Angkatan Darat berpendapat bahwa mereka terpaksa menilai kembali hubungan mereka dengan Soekarno. Bila Angkatan Darat tidak bertindak terhadap presiden dan ia tetap memberikan dorongannya kepada PKI, bagi beberapa perwira ini berarti bahwa kemajuan PKI akan terus tanpa batas. Sehingga kalangan Angkatan Darat

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 82.

sependapat bahwa mereka harus berbuat sesuatu sekalipun itu berarti perpecahan terbuka dengan Soekarno.<sup>16</sup>

Meletusnya peristiwa Gerakan 30 September merupakan “*turning point*” dalam perkembangan politik nasional Indonesia sebab selama Republik Indonesia berdiri, peristiwa ini merupakan peristiwa yang paling mengancam eksistensi dan keutuhan negara. Hal ini telah menjadi momentum yang membuka pintu selebar-lebarnya kepada TNI Angkatan Darat untuk memegang peranan politik dan pemerintahan.<sup>17</sup> Kendatipun PKI selalu dilindungi oleh Soekarno tetapi PKI tidak bisa lepas dari tantangan TNI-AD sehingga untuk melancarkan jalan PKI, Soekarno mencoba mengganti A.H. Nasution dengan A. Yani sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dengan dalih bahwa Ahmad Yani mudah dikendalikan. Ini jelas membuat bentrok fisik antara PKI dan TNI-AD.

Pada tahun 1965 TNI-AD berhasil menyusun konsep perjuangannya “Tri Ubaya Sakti”. Konsep ini lalu dikuatkan pada Seminar Angkatan Darat II dan doktrin ini pulalah yang membuat ABRI semakin berperan dalam politik yaitu dengan diakuinya ABRI bergerak di dalam lapangan sosial politik.<sup>18</sup> Kemajuan ABRI yang termanifestasikan dalam Angkatan Darat ini pada tahun 1965 mensukseskan program Dwikora tetapi harus berhadapan juga dengan PKI yang setiap saat selalu mencari titik-titik kelemahan Angkatan Darat walaupun pada kenyataannya hubungan Soekarno dengan ABRI pada waktu Gerakan 30 September meletus berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 98.

<sup>17</sup> Jahja Muhaimin, *op. cit*, hlm. 162-163.

kerjasama antara ABRI khususnya Angkatan Darat dengan Panglima Tertinggi yaitu Soekarno dalam menghadapi persoalan politik yang terjadi di Indonesia tahun 1965.

### C. Hubungan Soekarno Dengan PKI Waktu Gerakan 30 September Meletus

Pengaruh Soekarno dalam pemerintahan sangat besar baik pada masa Pergerakan Kemerdekaan, masa Demokrasi Parlementer, maupun masa Demokrasi Terpimpin. Meskipun pada masa Demokrasi Parlementer kedudukan Soekarno hanya sebagai Kepala Negara Konstitusional, namun peranan dan pengaruhnya dalam menjalankan pemerintahan masih kuat. Pengaruhnya semakin menguat ketika Demokrasi Terpimpin berhasil mendominasi seluruh kebijaksanaan pemerintah.

Soekarno adalah seorang nasionalis yang gandrung akan kesatuan dan persatuan sehingga dalam pidatonya ditempatkan kebangsaan sebagai sila pertama, sedangkan cita-cita Soekarno tentang negara dapat disimak sebagai berikut ini:<sup>19</sup>

"Apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk satu orang, untuk suatu golongan? Mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan bangsawan?"

Pernyataan tersebut kemudian dijawab sendiri oleh Soekarno, "Kita hendak mendirikan suatu *negara semua buat semua*". Lebih lanjut Soekarno mengatakan bahwa, "Kita mendirikan suatu negara kebangsaan Indonesia", bahwa kebangsaan merupakan fondasi paling utama dari negara Republik

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 38.



Indonesia yang akan dibentuk. Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi ketegangan sosial-politik, dimana terdapat saling curiga antara partai-partai itu sendiri, antara partai dan ABRI, serta antara partai, ABRI dengan presiden, karena mereka bersaing untuk saling mendominasi. Namun Soekarno tidak begitu peduli dengan ketegangan sosial-politik itu.

Hubungan Soekarno dan PKI pada dasarnya terjalin dengan baik. Hal inilah yang memicu munculnya kekuatan sosial-politik baru, yakni ABRI, terutama Angkatan Darat. Kekuatan-kekuatan politik ini memaksa PKI untuk melanjutkan strateginya yaitu melalui Front Persatuan Nasional (kerjasama dengan partai-partai lain dalam suasana demokrasi). Ini berarti PKI akan tetap bekerja sama dengan kaum "borjuis" dan "nasionalis".<sup>20</sup> Tetapi PKI memandang Angkatan Darat (AD) sebagai lawan yang paling berbahaya sehingga PKI berusaha mendekati Soekarno untuk mengeksploitir prestise dan popularitasnya.

Di samping strategi Front Persatuan Nasional, PKI juga memperluas pengaruhnya dengan membentuk berbagai organisasi massa yang meskipun secara resmi belum bercorak komunis, tetapi sudah ada dalam pengendaliannya terutama di kalangan buruh (SOBSI), tani (BTI), seniman (Lekra), pemuda (PR) dan wanita (Gerwani). Corak komunis yang resmi baru muncul sesudah tahun 1957.<sup>21</sup> Selain strateginya PKI juga pandai dalam mengeksploitir (memanfaatkan) ketenaran dan kewibawaan Presiden Soekarno. Berbagai slogan atau pernyataan Soekarno diambil alih seolah-olah itu merupakan slogan atau pernyataan PKI.

---

<sup>19</sup> Panitia Pembina Djiwa Revolusi, "*Lahirnya Pantjasila*", dalam Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi Republik Indonesia, Medan (t.thn), hlm. 27.

<sup>20</sup> G. Moedjanto, "*Demokrasi Terpimpin*", SPPS Seri XV No. 1, Sanata Dharma, Yogyakarta, 1988, hlm. 11.

<sup>21</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20*, Jilid 2, Kanisius, Yogyakarta, 1989, hlm. 134.

Sehingga banyak rakyat yang mengidentifikasi PKI dengan Soekarno lebih dari mengidentifikasi PNI. Dalam menjalankan keinginannya, PKI lebih memilih PNI untuk dapat bekerja sama.

PKI memilih bekerja sama dengan PNI karena PNI merupakan sebuah partai besar yang pernah diganyangnya dalam Pemberontakan Madiun. Kerjasama PKI dan PNI ternyata sudah terjalin sejak Kabinet Wilopo dan semakin akrab pada masa Kabinet Ali I sebab dalam Kabinet Ali I banyak berintikan anggota-anggota PNI dan NU yang tidak mungkin bertahan tanpa dukungan PKI. Sebaliknya, PKI malah memanfaatkan situasi itu untuk kepentingannya sendiri. Dalam kerjasama ini jelas kalau PNI kurang cerdas, sebab PNI banyak diperalat oleh PKI bahkan pemuda-pemuda Marhaenis (PNI) sempat menerima penghinaan yang memalukan pada pertengahan tahun 1965 di daerah Yogyakarta. Pemuda-pemuda PKI berhasil memukuli pemuda-pemuda PNI dengan perlindungan dari suatu batalyon yang pro-komunis.<sup>22</sup>

Kegagalan konstituante dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan peluang kepada Soekarno dalam memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengubah sistem politik menjadi Demokrasi Terpimpin telah membuat Soekarno menjadi pusat kekuasaan dan memunculkan kekuatan baru, yakni TNI-AD dan PKI. Dalam perkembangan politik jelas lebih menguntungkan PKI. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya ide Nasakom. Dengan demikian maka PKI mulai memanfaatkan situasi ini secara sempurna, sehingga PKI merupakan satu-satunya partai yang mempunyai organisasi paling baik serta mempunyai persyaratan yang dituntut oleh organisasi massa modern.

Bung Karno yang pada masa Demokrasi Terpimpin sangat memerlukan dukungan dari PKI, mulai menghidupkan kembali gagasan persatuan dengan menciptakan Persatuan Golongan Nasionalis, Agama, dan Komunis yang terkenal dengan sebutan NASAKOM. Prinsip Nasakom ini jelas sangat menguntungkan PKI, di mana partai ini mendapat dalih untuk menasakomkan segala bidang kelembagaan yang di dalamnya belum ada orang PKI, seperti kabinet, pemimpin universitas dan ABRI. Usaha untuk memasukkan tokoh partai ke kabinet telah berhasil, terbukti dalam Kabinet Soekarno terdapat menteri PKI yaitu Nyoto, yang duduk dalam Kabinet Dwikora I. Tetapi untuk nasakomisasi pimpinan universitas dan ABRI belum berhasil. Kegagalan nasakomisasi ABRI menyebabkan PKI menempuh jalan lain pada tahun 1965, dengan usul pembentukan Angkatan kelima sesudah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian yang terdiri dari Buruh dan Tani yang dipersenjatai dengan dalih untuk menghadapi konfrontasi Malaysia. Namun usaha itu belum juga berhasil, berkat kegigihan pimpinan ABRI terutama Men.Pangad. Jenderal Ahmad Yani.<sup>23</sup>

Nasakom merupakan konsepsi Soekarno pada tahun 1920-an yang berusaha untuk mengikutsertakan PKI (ideologi marxis) dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam soal penasakoman ABRI dan pembentukan angkatan kelima pada tahun 1964-1965 menjadi suatu *issue* politik yang paling menonjol dan sangat menguntungkan bagi PKI di mana jika kedua *issue* tersebut berhasil, maka kekuatan PKI akan bertambah besar dengan begitu berarti PKI harus diikutsertakan dalam struktur ABRI mulai dari tingkat pusat

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 135-136.

sampai ke daerah-daerah. PKI beruntung memperoleh senjata untuk operasi militer revolusi "kiri"-nya. Soekarno ternyata memberikan dukungannya dan menyetujui membeli senjata dari RRC, tetapi dari pihak ABRI yaitu Achmad Yani tidak menyetujui maksud tersebut.<sup>24</sup>

Perbedaan generasi dan orientasi ideologi antara Soekarno dan para pemimpin Angkatan Darat telah menimbulkan ketidakserasian di antara kedua kekuatan ini. Hal ini nampak pada masa sesudah tahun 1958 di mana Soekarno merasa terancam oleh sikap Angkatan Darat yang tidak menyukai PKI dan sebaliknya Soekarno tidak memandang partai komunis sebagai suatu ancaman. Maka untuk tetap dapat mempertahankan kekuasaannya akhirnya Soekarno semakin lama semakin dekat dengan PKI karena pada waktu itu ia tidak memiliki partai sendiri.

Sementara itu PKI terus berusaha mendekati diri dengan presiden, untuk memperluas pengaruhnya dalam pemerintahan dengan tujuan bersama-sama menghadapi Angkatan Darat dan kekuatan-kekuatan anti-komunis lainnya. Keadaan ini akhirnya menyebabkan hubungan antara Soekarno dan PKI semakin erat, sehingga Soekarno tergantung pada dukungan Partai Komunis. Ketergantungannya semakin bertambah ketika ia tidak dapat mempercayai partai-partai lain. Dalam hubungan ini Soekarno terpaksa mengabaikan PNI, partai yang pernah mempunyai hubungan dekat dengannya, sebab partai ini tidak memiliki suatu dasar atau alasan yang kuat untuk melawan Angkatan Darat.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 138-139

<sup>24</sup> Dr. Nazaruddin Sjamsuddin (ed), *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*, Rajawali Press, Jakarta, 1988, hlm. 163.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 26-27.



Kepercayaan Soekarno yang begitu besar terhadap PKI bukan baru muncul pada masa Demokrasi Terpimpin saja, tetapi jauh sebelum itu yakni pada zaman kolonial Soekarno telah mengagumi cara-cara perjuangan PKI yang radikal yang kemudian disebut sebagai progressif-revolusioner. Cara perjuangan seperti itulah yang dipercayai Soekarno dan sesuai dengan jiwanya serta watak perjuangan yang senantiasa dianjurkan Soekarno dalam hampir setiap pidatonya pada masa Demokrasi Terpimpin.

Soekarno berpandangan bahwa Demokrasi Terpimpin akan hancur tanpa adanya dukungan dari PKI. Keinginannya untuk menjadi penguasa tunggal dalam Demokrasi Terpimpin dan pertikaiannya dengan Angkatan Darat tentang aspek kepemimpinan daripada sistem itu agaknya telah membuat Soekarno membangun aliansi dengan PKI.<sup>26</sup> Secara praktis PKI merupakan sebuah partai yang sangat memerlukan dukungan dari Soekarno dalam rangka konfrontasinya dengan Angkatan Darat. Dekatnya hubungan Soekarno dengan PKI telah menimbulkan kecurigaan terhadapnya. Apakah Soekarno seorang komunis atau hanya pro-komunis? Namun Soekarno sendiri menolak tuduhan bahwa ia sudah menjadi komunis. Meskipun tidak dibantahnya bahwa ia terpengaruh oleh pikiran-pikiran Marx karena baginya ia tetap sebagai seorang nasionalis dan demikianlah ia akan senantiasa memberikan label pada dirinya. Sehingga tidak perlu diragukan lagi bahwa Soekarno adalah seorang nasionalis dan bukan komunis. Tetapi ketergantungan Soekarno pada dukungan PKI telah membuatnya jatuh dalam rangkulan kaum komunis.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 27.

Memasuki tahun 1965 Indonesia sibuk menghadapi Malaysia yang didukung oleh Inggris, di mana konflik ini telah menyebabkan Indonesia memberikan surat pengunduran diri dari PBB kepada U Thant pada tanggal 20 Januari 1965 yang menyatakan secara resmi bahwa Indonesia keluar dari PBB tanggal 1 Januari 1965. Keluarnya Indonesia dari anggota PBB merupakan akibat dari konfrontasi dengan Malaysia. Kebijakan Ganyang Malaysia ini merupakan strategi yang dimainkan PKI untuk mempengaruhi kebijaksanaan ekonomi dan politik. Soekarno yang semula menyetujui serangkaian kebijaksanaan pembaharuan yang ditawarkan Washington dengan jaminan kredit, kemudian merubah haluan garis politik luar negerinya dengan berkiblat pada Peking.

Perubahan sikap Soekarno terjadi setelah pertarungan antara program stabilitas yang didukung Amerika Serikat dan kebijaksanaan menentang Malaysia yang didukung oleh komunis. PKI yang didukung RRC ternyata berhasil membaca situasi tersebut dan memanfaatkan hasrat yang diimpikan Soekarno untuk menjadi pemimpin dunia dengan menjadikannya sebagai pendekar politik anti Barat, anti kapitalisme dan anti imperialisme.

Pada bulan Juni 1965 kesehatan Soekarno memburuk maka PKI yang merasa keselamatannya banyak tergantung kepada Soekarno merasa cemas sehingga PKI berusaha merebut kekuasaan. Di samping itu tersirat kabar bahwa para perwira tinggi Angkatan Darat juga membentuk Dewan Jenderal yang bertugas memberi rekomendasi kepada pimpinan Angkatan Darat tentang kenaikan Kolonel menjadi Jenderal. Namun PKI salah menafsirkan bahwa Dewan Jenderal sebagai badan yang mempersiapkan perebutan kekuasaan dari Soekarno maka PKI akhirnya melancarkan serangannya pada tanggal 30 September 1965.

Sebenarnya berperan dalam peristiwa 30 September adalah Letkol Untung dan Kolonel A. Latief. Keduanya merupakan teman lama dari Soeharto sehingga Soeharto memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri, maka Soekarno berpendapat bahwa peristiwa 30 September itu bukan sekedar *issue* Angkatan Darat saja tetapi merupakan *issue* politik.

Soekarno sebenarnya mengetahui bahwa ada oknum PKI yang bersalah dalam peristiwa 1965. Ia mengatakan : "Ada tikus yang memakan kue di dalam rumah, jangan sampai rumah itu yang dibakar". Selain itu Soekarno juga mengakui bahwa "perbuatan Untung salah" tetapi ia ingin melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan tentang peristiwa Gerakan 30 September secara keseluruhan.<sup>28</sup> Pada dasarnya hubungan Soekarno dan PKI pada waktu Gerakan 30 September terjalin dengan baik di mana Soekarno tidak menyalahkan PKI atas peristiwa yang terjadi malahan Soekarno membela PKI tetapi mengutuk orang-orang yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September tersebut.

Hubungan yang baik antara Soekarno dan PKI pada waktu Gerakan 30 September meletus, memicu munculnya keterlibatan TNI-AD dalam peristiwa tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keinginan dari Mayjen Soeharto atas kedudukan presiden. PKI yang pada waktu itu sangat akrab dengan Presiden Soekarno mulai tidak disukai oleh Soeharto. Jenderal Soeharto tetap meneruskan perjuangannya untuk merebut kedudukan Mayjen Pranoto Reksosamodro sebagai *Care taker*, dengan alasan seolah-olah terjadi dualisme dalam kepemimpinan Angkatan Darat. Selain itu Pranoto juga dituduh terlibat dengan PKI, maka

---

<sup>28</sup> Revolusi Belum Selesai, *op. cit*, hlm. xxiii

presiden terpaksa menghentikan Mayjen Pranoto Reksosamodro sebagai *Care taker* dan mengangkat Mayjen Soeharto menjadi Panglima Angkatan Darat agar tidak terjadi pertumpahan darah di dalam tubuh Angkatan Darat itu sendiri. Sejak diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat, Mayjen Soeharto merasa memiliki kekuatan dalam bertindak untuk membuktikan tuduhannya yang diambil dari Yoga Sugomo yang mengatakan bahwa PKI-lah yang berada di belakang Untung sebagai pemimpin Gerakan 30 September.<sup>29</sup> Presiden Soekarno tetap membela PKI dengan cara mempertahankan tokoh-tokoh PKI dalam pemerintahannya meskipun tindakan Soekarno ini tidak disetujui oleh Angkatan Darat tetapi mereka berusaha tetap mendukungnya. Namun pada dasarnya mereka tidak lagi mendukung presiden.



---

<sup>29</sup> P.J. Suwarno, *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966 (Dari TKR Sampai Super Semar)*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2004, hlm. 95.



**BAB IV**

**HUBUNGAN SOEKARNO DAN SOEHARTO SETELAH**

**TAHUN 1965 - 1967**

**A. Hubungan Soekarno dan Soeharto Sebelum Tahun 1965**

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 menimbulkan harapan baru bagi rakyat Indonesia bahwa saat untuk menuju ke arah kemakmuran telah tiba dan masyarakat yang berkelimpahan sandang dan pangan akan terwujud.<sup>1</sup> Setelah memperoleh kemerdekaannya, bukan berarti bangsa Indonesia sudah terlepas dari masalah dan penjajahan tetapi bangsa Indonesia masih harus memperjuangkan kemerdekaannya.

Belanda pada tahun 1948 melakukan aksi militernya yang kedua atau yang biasa dikenal dengan Agresi Militer Belanda II dan berhasil menduduki ibukota Republik Indonesia Yogyakarta tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948. Kejadian ini ternyata membuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus meninggalkan Yogyakarta dengan tujuan dapat melakukan serangan balik terhadap Belanda. Letkol Soeharto akhirnya mengadakan serangan ke dalam kota Yogyakarta pada malam hari dengan pasukan yang didatangkan dari daerah-daerah sekitar untuk menyerang Belanda.<sup>2</sup>

Pada waktu itu Letkol Soeharto mempunyai kedudukan sebagai Komando Wekrkeise III merangkap Komandan Brigade X yang bermarkas di Bibis dan

<sup>1</sup> Dr. Nazaruddin Sjamsuddin (ed.), *Soekarno Pemikiran dan Kenyataan Praktek*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, hlm. 223.

<sup>2</sup> P.J. Suwarno, *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966 (Dari TKR sampai Super Semar)*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2004, hlm. 35.

Segoroyoso. Walaupun sebagai Komandan Brigade, Letkol Soeharto tetap berada di bawah komando Nasution dan Jenderal Sudirman.<sup>3</sup> Tetapi dalam perkembangannya, akhirnya Presiden Soekarno mengangkat Sudirman menjadi Panglima Besar Angkatan Perang pada tanggal 26 Juni 1946. Dengan demikian promosi ini telah menempatkan Angkatan Udara dan Angkatan Laut di bawah komando Kementrian Pertahanan.<sup>4</sup>

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda II terhadap Yogyakarta, Soeharto yang pada saat itu memimpin Brigade X di Yogyakarta kemudian menghubungi pasukannya yang ada di Purworejo untuk datang ke Yogyakarta. Kedatangan pasukannya dari Purworejo akhirnya berhasil mengadakan Serangan Umum 1 Maret 1949 setelah berkoordinasi dengan Sultan Hamengku Buwono IX. Belanda akhirnya dipaksa keluar dari kota Yogyakarta.

Memasuki tahun 1950-1957, Letkol Soeharto memimpin Brigade O yang berkekuatan 7 batalyon di Yogyakarta di bawah Panglima TT IV Kolonel Gatot Subroto. Tugas yang dijalankan oleh Letkol Soeharto sebagai Brigade O selama lima tahun adalah untuk menumpas DI/TII dan penyelesaian pemberontakan Batalyon 426. Namun pada tahun 1956 Letkol Soeharto dipindahkan ke staf umum Angkatan Darat sebagai perwira menengah yang diperbantukan kepada kepala staf.<sup>5</sup> Setelah diangkat menjadi kepala staf selama tiga bulan, maka pada tanggal 3 Juni 1956 Letkol Soeharto diangkat lagi menjadi Panglima TT IV/Diponegoro menggantikan Kolonel M. Bachrum, sehingga pangkatnya akhirnya dinaikkan menjadi kolonel sementara mulai tanggal 1 November 1956

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 37-38.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 59.

yang disesuaikan dengan jabatannya, tetapi mulai tanggal 1 Januari 1957 barulah pangkat kolonelnya menjadi efektif.

Selama menjadi kolonel ternyata Soeharto banyak melakukan masalah yang merugikan dan memalukan yaitu penyelundupan terhadap kendaraan Angkatan Darat. Tindakan Soeharto bersama rekan-rekannya diketahui oleh Sardono sehingga akhirnya Sardono melaporkan hal itu kepada Kepala Staf Angkatan Darat Pranoto. Mendengar hal itu Achmad Yani marah dan tidak bisa menahan diri sampai ia menempeleng Soeharto sebab tindakannya itu sudah melampaui batas dan dinilai sangat memalukan bagi Korps. Sehingga A.H. Nasution mengusulkan agar Soeharto diadili di Mahkamah Militer dan segera dipecat dari Angkatan Darat. Tetapi Mayjen Gatot Subroto mencegahnya sebab menurut Gatot Subroto, Soeharto masih dapat dibina. Maka ia mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar Soeharto diampuni.<sup>6</sup>

Usul Gatot Subroto diterima oleh Presiden Soekarno di mana Soeharto disekolahkan ke sekolah Staf Komando Angkatan Darat di Bandung. Setelah selesai mengikuti studinya, Soeharto ditempatkan di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) dan pangkatnya yang sebelumnya sebagai Kolonel akhirnya naik menjadi Brigadir Jenderal di Jakarta serta ditetapkan sebagai Deputi I KASAD.<sup>7</sup>

Sistem politik Indonesia mengalami kemunduran pada awal tahun 1957 karena banyak terjadi pergolakan daerah dan pengunduran diri Bung Hatta sebagai Wakil Presiden. Pengunduran diri Bung Hatta terjadi pada tanggal 1

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 73-74.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 74.

Desember 1956 yang didasarkan atas perbedaan prinsip antara Bung Karno dan Bung Hatta.

Salah satu pergolakan daerah yang terjadi adalah pemberontakan PRRI/Permesta yang akhirnya dapat dipadamkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penyerahan masal dari pasukan-pasukan Permesta pada bulan Februari 1961. Pada tanggal 1 Maret 1961 Brigjen Soeharto diangkat sebagai Panglima Korps Tentara I Cadangan Umum Angkatan Darat (Caduad) dan pada tanggal 1 Oktober 1961 ditetapkan sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Angkatan Darat sebagai tugas tambahan.<sup>8</sup> Sejak tanggal 1 - 23 Januari 1962 Presiden Soekarno memberi tugas kepada "Komando Mandala Pembebasan Irian Barat", dan ternyata tugas ini diberikan kepada Mayor Jenderal Soeharto. Selain tugas tersebut, Mayor Soeharto juga dilantik untuk menggantikan Achmad Yani sebagai Deputy wilayah Indonesia Timur dan merangkap sebagai Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat pada bulan Februari 1962.

Mayor Soeharto berhasil melaksanakan tugasnya sehingga pada tanggal 1 Mei 1963 diangkat menjadi Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad). Pada tahun 1963 Indonesia harus menghadapi masalah konfrontasi dengan Malaysia karena Soekarno tidak setuju dengan terbentuknya Malaysia yang dianggap sebagai ancaman. Maka pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengomandokan Dwikora yang isinya sebagai berikut:

1. Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia;

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 75.



2. Bantulah perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunai untuk memerdekakan diri dan membubarkan Malaysia.

Konfrontasi melawan Malaysia ternyata hanya mempersulit kedudukan Indonesia dalam percaturan internasional sebab banyak negara Barat yang memencilkan Indonesia dan bersimpati terhadap Malaysia. Hanya RRC saja yang menunjukkan minatnya "membantu" Indonesia. Selain itu, pada tahun 1964 Malaysia terpilih menjadi anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan PBB dan hal ini merupakan pukulan bagi bangsa Indonesia. Karena itu Indonesia dengan gagah berani pada tanggal 7 Januari 1965 menyatakan keluar dari PBB.<sup>9</sup>

Pada awal tahun 1965 tersiar kabar bahwa para Perwira Tinggi Angkatan Darat membentuk Dewan Jenderal. Sebab pada perkembangan tahun 1965 telah menunjukkan tumbuhnya ketegangan sosial-politik yang makin meninggi di mana hubungan Soekarno dan Angkatan Darat tegang karena adanya perbedaan sikap terhadap PKI, orang-orang Cina dan pemimpin-pemimpin PRRI/Permesta.<sup>10</sup>

Pertengahan September 1965 A. Latief menemui Soeharto untuk melaporkan tentang *issue* Dewan Jenderal yang menyebar ke mana-mana namun ternyata Soeharto sudah mengetahui dari seorang teman Soebagyo, sebab pada tanggal 15 September Untung sudah mendatangi Soeharto dan melaporkan adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan Kup, dan Untung mempunyai rencana akan mendahului Dewan Jenderal dengan cara menangkap mereka lebih

---

<sup>9</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid 2*, Kanisius, Yogyakarta, 1989, hlm. 119.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 20.

dahulu. Mendengar rencana Untung tersebut, jelas membuat Soeharto menyetujuinya dan bahkan menjanjikan bantuan pasukan yang akan didatangkan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bantuan Soeharto yang didatangkan ke Jakarta dari Semarang, Surabaya dan Bandung dengan segala perlengkapan tempur Siaga I dan perintahnya untuk menggempur Dewan Jenderal sejak tanggal 26 September 1965.<sup>11</sup>

Latief mendatangi kediaman Soeharto di Jl. Haji Agus Salim pada tanggal 29 September 1965 untuk melaporkan kepada Soeharto bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta terhadap Presiden, tetapi Dewan Jenderal akan diculik oleh pasukan Cakrabhirawa (pengawal Presiden). Namun mendengar laporan dari Latief, Soeharto justru tidak bereaksi.<sup>12</sup>

Gerakan yang dilakukan oleh Untung cs mengakibatkan hubungan antara Soeharto dan Soekarno tidak begitu baik di mana Soeharto menganggap bahwa gerakan ini adalah ulah dari PKI atau dengan kata lain PKI berada di balik semua ini tetapi Soekarno berpendapat bahwa PKI tidak terlibat dalam gerakan tersebut. Soekarno berusaha mengembalikan keadaan melalui pidato-pidatonya. Nada memerintah senantiasa terlihat dalam amanatnya baik kepada Menteri maupun kepada segenap aparat negara. Maka pada tanggal 21 Oktober 1965, ia mengeluarkan perintah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Hindari segala tindakan yang dapat merugikan perjuangan bangsa;
2. Tingkatkan dan sempurnakan segenap *slagorde* Dwikora yang telah dipersiapkan.
3. Kerahkan seluruh potensi guna kesempurnaan dan keamanan ketahanan revolusi.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 185-186.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 186.

<sup>13</sup> Dr. Asvi Warman Adam (ed.), *Revolusi Belum Selesa (Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965 - Pelengkap Nawaksara)*, Jilid II, Mesiass, Semarang, 2003, hlm. xxi.

Selain itu dalam pidatonya tanggal 20 November 1965 di depan Panglima Angkatan di Istana Bogor, Bung Karno mengatakan bahwa: "Ada perwira yang *bergundul* (keras kepala)", dan tampaknya ucapan itu ditujukan kepada Soeharto sebab pada kesempatan itu Soekarno menegaskan bahwa : "Saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima Besar Revolusi dan terus terang bukan Soebandrio, bukan Leimena ... bukan engkau Soeharto, bukan engkau Soeharto, dst ...." (berbeda dari nama tokoh lain Soeharto disebut dua kali secara berturut-turut).<sup>14</sup> Hal ini jelas bahwa Soekarno tidak senang dengan Soeharto yang telah melakukan kudeta pada tanggal 1 Oktober 1965 sehingga menyebabkan hubungan keduanya tidak berjalan dengan baik.

#### **B. Hubungan Soekarno dan ABRI (TNI-AD) Sebelum Tahun 1965**

Munculnya Angkatan Darat sebagai kekuatan politik sebenarnya berawal dari diangkatnya kembali Kolonel Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 27 Oktober 1955. Program pertama yang dilakukannya adalah pemantapan dan konsolidasi intern terutama terhadap komandan-komandan militer regional. Namun ada tantangan yang muncul yaitu timbulnya pembangkangan beberapa panglima daerah pada pertengahan tahun 1956 yang kemudian berlanjut menjadi pemberontakan-pemberontakan daerah. Pergolakan-pergolakan daerah ini pada akhirnya dapat diatasi. Usaha Angkatan Darat dalam mengatasi permasalahan daerah itu berhasil sehingga memperkuat posisi Angkatan Darat untuk mendekatkan hubungan dengan Presiden Soekarno.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. xxii.

<sup>15</sup> Dr. Nazaruddin Sjamsuddin (ed), *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, hlm. 188-189.

Hubungan Soekarno dengan ABRI khususnya Angkatan Darat dalam hal ini adalah Nasution ditandai oleh adanya kepentingan yang sama. Kesamaan pandangan antara Nasution dan Soekarno yaitu dalam masalah stabilitas pemerintahan, peranan partai dan pemberlakuan keadaan darurat perang. Di samping itu pembentukan Dewan Nasional merupakan manifestasi kepentingan bersama dari Soekarno dan Nasution. Dalam Dewan Nasional antara Soekarno dan Angkatan Darat mempunyai peranan yang penting.

Namun antara Soekarno dan Nasution terdapat perbedaan-perbedaan pandangan yang sangat jelas, di mana Soekarno lebih menyandarkan diri pada prinsip-prinsip mobilisasi massa, revolusi dan suatu nilai kombinasi antara mistisisme Jawa dan sekularisme serta tradisi. Sedangkan Nasution lebih mendasarkan diri pada nilai-nilai efisiensi, disiplin dan suatu bentuk kepercayaan Islam yang modern. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Soekarno mewakili kebudayaan politik aristokrat Jawa dan Nasution pada kebudayaan wiraswasta Islam.<sup>16</sup> Dalam banyak hal Soekarno dan Nasution tidak menjalin hubungan pribadi yang erat. Hubungan mereka tampaknya terbatas pada kepentingan politik timbal balik.

Pada awal tahun 1957, keadaan politik Indonesia semakin runyam di mana muncul ketidakpuasan daerah terhadap pusat yang kemudian berkembang menjadi pemberontakan daerah. Sikap Soekarno pada masa itu menampakkan keinginannya untuk campur tangan dalam pemerintahan dengan caranya sendiri.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 189.



Kemudian pada akhir tahun 1958, Angkatan Darat dan Soekarno telah menguasai panggung politik.<sup>17</sup>

Pergolakan-pergolakan politik yang berlangsung membuat Soekarno harus bersandar pada kekuatan yang mampu mencegah terjadinya disintegrasi. Pada masa itu kekuatan yang mampu mencegah dan memadamkan pergolakan adalah tentara. Oleh karena itu Soekarno memerlukan Angkatan Darat.<sup>18</sup> Setelah perlawanan daerah diatasi, maka Angkatan Darat mengadakan konferensi Komando Daerah Militer pada bulan Agustus 1958. Konferensi itu mengeluarkan :<sup>19</sup>

1. Perlunya perbaikan-perbaikan di bidang militer
2. Perbaikan-perbaikan di bidang politik, ekonomi dan ketertiban pada umumnya.

Angkatan Darat sebagai kekuatan politik selalu mengaku sebagai penyelamat negara, baik dalam menghadapi kekuasaan asing maupun pemberontakan yang terjadi di dalam negeri. Kesuksesan yang dicapai oleh Angkatan Darat dalam menjalankan tugasnya telah memberikan prestise yang tinggi dan kedudukannya yang kuat bagi Angkatan Darat. Angkatan Darat tidak menyukai sistem parlementer karena terbukti dengan sistem itu Indonesia tidak berhasil mengatasi *post revolutionary problems*, tidak efektif dan korup.

Sejak tahun 1957-1958 Angkatan Darat telah menunjukkan diri sebagai *component* yang sangat kuat setelah berhasil menumpas pemberontakan PRRI/

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 188.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 190.

<sup>19</sup> G. Moedjanto, "Demokrasi Terpimpin", SPSS Seri XV No. 1, Sanata Dharma, Yogyakarta, 1988, hlm. 8.

Permesta dalam waktu yang begitu singkat.<sup>20</sup> Keberhasilan itu telah membuat prestise ABRI khususnya Angkatan Darat naik dan menyebabkan orang lupa akan kericuhan yang terjadi. Pada perkembangan selanjutnya ternyata Angkatan Darat merupakan salah satu kekuatan sosial politik yang sangat menentukan nasib negara dan bangsa Indonesia.<sup>21</sup>

Perkembangan politik di Indonesia sangat ditentukan oleh Dwi Fungsi ABRI. Sepanjang sejarah ABRI selalu menunjukkan sumbangan dan peranannya yang besar baik dalam persoalan militer maupun dalam persoalan non militer. Dalam masa revolusi ABRI telah mengendalikan pemerintahan gerilya. Pimpinan ABRI terutama Nasution, menyadari prestasi yang menanjak sehingga ia memandang waktunya tepat untuk mendesak pemerintah agar dalam kegiatan non-militer para perwira yang mempunyai bakat dan kemampuan di bidang non-militer diberi kesempatan. Dengan kata lain, ABRI menghendaki ikut serta dalam pemerintah atau lembaga-lembaga non-pemerintah.<sup>22</sup>

Kerjasama yang baik antara Soekarno sebagai Panglima Tertinggi dan ABRI menjadikan ABRI tidak saja sebagai anak revolusi tetapi juga menjadi alat revolusi, sehingga sudah sepantasnya apabila ABRI loyal kepada Panglima Tertingginya yang juga menjadi Pemimpin Besar Revolusi bangsanya. ABRI lahir di tengah-tengah kancah revolusi Indonesia dan Bung Karno juga dilahirkan oleh revolusi itu sendiri. Oleh sebab itu kedudukan Bung Karno sebagai Presiden, Pemimpin Besar Revolusi dan sebagai Panglima Tertinggi ABRI tidak

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>21</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid II*, Kanisius, Yogyakarta, 1989, hlm. 107.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 112.

dapat dipisahkan satu sama lain karena semuanya itu merupakan satu kesatuan yang bulat. Demikian pula kedudukan ABRI sendiri tidak dapat dipisahkan dari revolusi kita.<sup>23</sup> Jadi hubungan antara Soekarno dan ABRI khususnya Angkatan Darat sebelum tahun 1965 terjalin dengan baik.

### C. Hubungan Soekarno dan ABRI (TNI-AD) Setelah Tahun 1965 - 1967

Gerakan 30 September 1965 telah menimbulkan akibat-akibat buruk yang luar biasa di berbagai sektor kehidupan sampai sekarang. Penderitaan yang ditimbulkannya pun sampai hari ini belum juga berakhir. Kehancuran sistem Demokrasi Terpimpin yang terjadi setelah peristiwa tersebut menyertai percobaan kudeta di tahun 1965 telah menetapkan ABRI khususnya Angkatan Darat sebagai kekuatan politik yang dominan.

Pengalaman dari Demokrasi Terpimpin ini telah meninggalkan suatu harapan yang luas bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh militer akan membangun suatu "Orde Baru" yang bisa membuka jalan ke arah kemakmuran dan kemajuan. Kelompok sipil dari kalangan anti komunis yang merasa tidak mendapat kesempatan di masa Orde Lama sudah sewajarnya bila menerima militer dengan harapan besar.<sup>24</sup>

Tersingkirnya Partai Komunis Indonesia (PKI) secara mendadak dalam bulan-bulan terakhir tahun 1965 dan proses yang berlarut-larut yang berakhir pada pemberhentian Soekarno pada tahun 1967, telah menempatkan Angkatan Darat sebagai kekuatan politik yang dominan. Akan tetapi tentara tidak

<sup>23</sup> Solichin Salam, *Bung Karno Putera Fajar*, Gunung Agung, Jakarta, 1966, hlm. 126-127.

<sup>24</sup> Harold Chrouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1986, hlm. 15-16.

mendapatkan kekuasaan pemerintahan sebagaimana yang terjadi pada pengambil-alihan kekuasaan oleh kaum *Nasserite*.

Angkatan Darat merupakan bagian dari elite yang berkuasa di masa Demokrasi Terpimpin. Kebangkitan Angkatan Darat untuk memperoleh kedudukan yang dominan tidak diikuti oleh penyingkiran terhadap elite lama tetapi malah memperkuat satu bagian daripada melemahkan bagian yang lain.<sup>25</sup>

Di bawah naungan Orde Baru, para perwira Angkatan Darat mengkonsolidasikan kekuatan politik mereka dan memperluas kepentingan-kepentingan ekonomi mereka meskipun banyak dari kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah yang baru berbeda secara tajam dengan kebijakan-kebijakan rezim lama. Tetapi hal tersebut tidak lahir dari suatu pemahaman mengenai pandangan baru tentang pembaharuan sosial, melainkan karena mereka lebih cocok dalam lingkungan-lingkungan baru untuk meneruskan kepentingan-kepentingan yang telah ada bertahun-tahun sebelumnya.<sup>26</sup>

Pergolakan yang ditimbulkan Gerakan 30 September telah menampilkan seorang jenderal yang sebelum meletusnya peristiwa itu kurang dikenal dalam percaturan politik di Indonesia. Seorang jenderal yang hampir sepenuhnya memainkan kecakapannya di bidang militer yaitu Mayor Jenderal Soeharto. Satu hal yang menarik ialah pimpinan TNI-AD sebelum terjadinya Gerakan 30 September telah mempunyai reputasi politik dan banyak disebut-sebut dalam

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>26</sup> *Ibid*.



arena politik seperti Jenderal Nasution tidak tampil meraih posisi yang penting dalam mengatasi krisis itu.<sup>27</sup>

Tampilnya ABRI dalam tugas pembinaan wilayah (masyarakat) dimaksudkan agar roda pemerintahan dan fungsi masyarakat berjalan dengan wajar bahkan bisa bertambah baik. Untuk itulah ABRI melakukan kegiatan non-militer. Setelah tahun 1965, hubungan Soekarno dan Angkatan Darat tetap berjalan dengan baik walaupun kekuasaan Soekarno pada waktu itu sudah menurun. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1971 setelah Soekarno wafat.

#### **D. Hubungan Soekarno dan Soeharto Setelah Tahun 1965-1967**

Sejak peristiwa 30 September 1965 hubungan Soekarno dan Soeharto menjadi tidak baik karena adanya perbedaan pendapat tentang PKI. Soekarno tidak bersedia membubarkan PKI walaupun sudah dituntut oleh para mahasiswa dan kekuatan-kekuatan anti komunis lainnya pada awal tahun 1966.

Periode tahun 1965-1967 dapat dilihat sebagai masa peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto, tetapi dalam buku sejarah versi pemerintah masa ini dilukiskan sebagai era konsolidasi kekuatan pendukung Orde Baru seperti tentara, mahasiswa dan rakyat yang bertujuan untuk membasmi Partai Komunis Indonesia (PKI) sampai ke akar-akarnya serta pembersihan terhadap orang-orang pendukung Soekarno.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Jahja Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Seri Penerbitan Skripsi Terbaik, Yogyakarta, 1971, hlm. 168.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. xix.

Demokrasi Terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno berakhir pada tahun 1966. Setelah tahun 1965 kekuasaan Soekarno mulai memudar, maka Soeharto yang selama ini menginginkan kekuasaannya akhirnya berusaha menjatuhkan Soekarno di mana terdapat aksi-aksi Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) berhasil sampai dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 yang sering disebut Super Semar. Pihak Angkatan Darat yang dibawah pimpinan Soeharto sejak tanggal 16 Oktober 1965 telah dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat mulai tidak menghormati kewibawaan Presiden lagi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tindakan Angkatan Darat yang mulai memalingkan pandangannya dan mulai bekerja sama dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI/KAPPI) dalam menghadapi Presiden lewat aksi-aksi yang mereka lakukan. Isi dari Tritura yaitu:

1. Bubarkan PKI;
2. Bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI;
3. Turunkan harga-harga barang.

Demonstrasi dalam mencetuskan Tritura terjadi pada tanggal 10 Januari 1966 di Jakarta dan aksi ini berlangsung selama 60 hari.

Presiden Soekarno semakin kehilangan arah kepemimpinannya dalam menghadapi aksi-aksi Tritura. Sehingga pembantu-pembantunya terutama Soebandrio merencanakan tindakan balas dendam dengan cara membentuk Barisan Soekarno yang terdiri dari buruh, tani dan terutama pemuda. Namun pembentukan Barisan Soekarno itu ternyata dilarang di Kodam-Kodam.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> G. Moedjanto, *op.cit*, hlm. 145.

Di samping itu KAMI melakukan aksi-aksi lain yaitu dengan cara menghalangi upacara pelantikan menteri-menteri baru pada tanggal 24 Februari dengan memblokir jalan-jalan sehingga sejumlah menteri harus diangkut dengan helikopter agar bisa sampai ke tempat pelantikan. Tindakan ini ternyata menimbulkan kemarahan besar pada diri Presiden Soekarno sebab aksi mereka sampai menelan korban yaitu tertembaknya Arif Rahman Hakim seorang mahasiswa UI oleh Resimen Cakrabhirawa. Dua hari kemudian bukan PKI yang dibubarkan tetapi justru KAMI itu sendiri. Pembubaran KAMI ternyata tidak menolong pulihnya kewibawaan Presiden sebab pelajar-pelajar yang tergabung dalam KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) dan KAMI terus melakukan aksinya sebab mereka mendapat perlindungan dari ABRI. Maka mereka semakin berani untuk melanjutkan aksi-aksinya dengan cara membentuk Laskar Arif Rahman Hakim dengan 7 batalyon yang diberi nama menurut nama pahlawan revolusi dan Irma Suryani Nasution. Mereka juga menamakan diri Angkatan 66.<sup>30</sup>

Menghadapi aksi-aksi KAMI/KAPPI ini, Menteri Negara Syafei merencanakan tindakan balasan sebab jika dibiarkan mereka akan terus melakukan aksinya yang akan merugikan dan memakan korban yang besar. Pada tanggal 11 Maret 1966 kabinet mengadakan sidang paripurna dengan tujuan untuk mencari jalan keluar dari krisis yang sedang memuncak. Ternyata sidang ini juga diboikot oleh para demonstran.<sup>31</sup> Kesempatan ini akhirnya digunakan oleh pimpinan Angkatan Darat untuk menawarkan jasa-jasa baiknya demi

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 146.

<sup>31</sup> P.J. Suwarno, *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966*, *op.cit.*, hlm. 101.

pulihnya keadaan sehingga kemacetan roda pemerintahan dapat diakhiri. Maka Jenderal Soeharto mengutus tiga Jenderal yaitu M. Yusuf, Amir Machmud dan Basuki Rakhmat untuk menemui Presiden Soekarno guna menyampaikan tawaran itu dan pesan dari Jenderal Soeharto yang berisi: "Kalau saya masih dipercaya, saya sanggup mengatasi keadaan". Pesan tersebut membuahkan hasil yaitu dikeluarkannya keputusan Presiden yang berupa Surat Perintah Sebelas Maret 1966 yang dipopulerkan dengan nama Super Semar. Isi pokok Super Semar adalah:

"Memerintahkan kepada Letjen Soeharto sebagai Men. Pangad untuk atas nama Presiden mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenteraman serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden".<sup>32</sup>

Dengan dikeluarkannya Super Semar berarti kekuasaan yang selama ini secara *defacto* telah dipegang oleh Letjen Soeharto. Super Semar menandai awal Orde Baru. Tindakan pertama yang dijalankan oleh Jenderal Soeharto selaku pengemban Super Semar ialah pembubaran dan larangan atas PKI yang pada kenyataannya partai ini selalu didukung oleh Presiden Soekarno. Pembubaran terhadap PKI dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1966 sehari setelah dikeluarkannya Super Semar.

Tindakan Soeharto yang membubarkan PKI jelas membuat Soekarno marah sekali sehingga Ia dengan segera menghubungi Jenderal Soeharto untuk meminta pertanggungjawabannya. Sebab menurut Soekarno, Soeharto sebagai pemegang Super Semar tidak mempunyai hak untuk membubarkan PKI karena tindakan semacam itu adalah termasuk dalam wewenang Presiden. Dari sini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan interpretasi tentang ruang lingkup Super

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 147.



Semar antara Soekarno dan tokoh-tokoh Orde Baru. Bagi Soekarno Super Semar hanya mencakup aspek keamanan saja sedangkan pendukung-pendukung Orde Baru memandangnya sebagai pelimpahan pemerintahan dari Presiden kepada Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Jenderal Soeharto.<sup>33</sup> Selain itu, Super Semar adalah surat perintah yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk mengamankan keadaan dan bukan untuk mengambil alih kekuasaan.

Lahirnya Super Semar menimbulkan dualisme dalam kepemimpinan nasional yaitu adanya jabatan Presiden dan pemegang Super Semar. Keadaan ini jelas tidak membantu posisi Soekarno sama sekali dan boleh dikatakan telah memudarkan kekuasaannya.<sup>34</sup> Hal ini telah mendorong lahirnya "*peradilan*" politik yang secara tragis mengakhiri karir politik Soekarno. Maka pada bulan Juni 1966 diadakan Sidang Umum MPRS Keempat setelah dikukuhkannya Super Semar menjadi Ketetapan MPRS. Sidang ini berlangsung dari tanggal 20 Juni - 5 Juli 1966 di bawah ketuanya Jenderal Nasution dan sidang MPRS ini akhirnya menetapkan keputusan yang penting yaitu:<sup>35</sup>

1. TAP No. IX/MPRS/66 berisi pengukuhan Super Semar. Dengan demikian maka Presiden Soekarno tidak bisa mencabutnya.
2. TAP No. XXV/MPRS/66 berisi pengukuhan atas pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme - Komunisme di Indonesia.
3. TAP No. XVIII/MPRS/66 berisi pencabutan TAP No. III/MPRS/63 yang berisi pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.

<sup>33</sup> Dr. Nazaruddin Sjamsuddin (ed.), *op. cit.*, hlm. 28-29.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>35</sup> G. Moedjanto, *op.cit*, hlm. 148.

4. TAP No. XIII/MPRS/66 berisi pemberian kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera dengan tujuan pokok Dwidharma dan program Catur Karya.

Dwidharma ialah menciptakan:

- a. Kestabilan politik;
- b. Kestabilan ekonomi;

Sedangkan Catur Karya ialah:

- a. Memenuhi sandang-pangan;
- b. Pemilu;
- c. Politik luar negeri bebas-aktif;
- d. Melanjutkan perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme.

Sidang MPRS juga menetapkan bahwa gelar Pemimpin Besar Revolusi yang disandang oleh Soekarno selama ini hanyalah sebuah gelar belaka dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Dalam sidang tersebut Soekarno diingatkan untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan MPRS dan memberikan laporan atas pelaksanaannya.<sup>36</sup> Selain itu Soekarno juga dimintakan pula untuk melengkapi laporan pertanggung jawaban terutama yang menyangkut sebab-sebab terjadinya Gerakan 30 September.<sup>37</sup>

Semua ini dipandang Soekarno sebagai penghinaan atas dirinya sehingga ia menolak permintaan MPRS untuk memberikan pertanggung jawaban tentang Gerakan 30 September. Sikap ini jelas memperbesar keyakinan masyarakat pada umumnya bahwa memang Soekarno terlibat dalam Gerakan 30 September. Di

<sup>36</sup> Dr. Nazaruddin Sjamsuddin (ed.), *op. cit.*, hlm. 33.

<sup>37</sup> Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, (Ithaca dan London: Cornell University Press, 1978), hlm. 204.

lain pihak ia juga dituduh telah melanggar konstitusi sebab tidak bersedia memberikan pertanggung jawaban kepada MPRS. Hal ini akhirnya menyebabkan munculnya demonstrasi-demonstrasi mahasiswa lagi yang menuntut agar MPRS memberhentikan Soekarno dari jabatan Kepresidenan.<sup>38</sup>

Pada tanggal 6 Juli 1966 dalam penutupan Sidang Keempat MPRS, Soekarno merasa lega karena ia telah ikut membentuk Kabinet Ampera.<sup>39</sup> Awalnya Soekarno membaca di surat kabar bahwa MPRS menegaskan Jenderal Soeharto untuk membentuk kabinet sehingga pada kenyataannya suaranya tidak didengarkan lagi oleh Soeharto di mana orang-orang kepercayaannya seperti Leimena dan Roeslan Abdulgani tidak masuk dalam kabinet. Ketika Soekarno melantik Kabinet Ampera pada tanggal 28 Juli 1966, ia menyatakan bahwa Super Semar bukanlah penyerahan kekuasaan "*I repeat again it is not a transfer of authority*".<sup>40</sup>

MPRS merasa kurang puas dengan pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 2 Juni 1966 yang diberi judul Nawaksara (Sembilan Pokok Uraian) yang tidak mau mengutuk Gerakan 30 September sehingga dalam suratnya tertanggal 10 Januari 1967 Presiden memberikan pelengkap Nawaksara itu. Namun isinya ternyata tidak memuaskan karena lebih merupakan pengelakkan tanggung jawab daripada pertanggung jawaban. Hal ini mengakibatkan banyak pihak yang tidak puas. Ketidakpuasan ini akhirnya ditanggapi oleh DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong) dengan

<sup>38</sup> Dr. Nazaruddin Sjamsuddin (ed.), *op. cit.*, hlm. 33.

<sup>39</sup> MPRS juga menyatakan Pemilu akan diadakan. Rencana Pemilu 5 Juli 1968. Jadwal itu diundur oleh Soeharto menjadi tahun 1971 agar lebih "*safe*", tahun 1989 Soeharto sempat membuang ribuan Tapol Golongan B yang dianggapnya berbahaya ke Pulau Buru.

<sup>40</sup> Dr. Asvi Warman Adam (ed.), *Revolusi Belum Selesai*, *op. cit.*, hlm. xxx.

cara mengajukan resolusi pada tanggal 3 Februari 1967 yang meminta agar MPRS mengadakan Sidang Istimewa pada bulan Maret 1967.

Sidang Istimewa ini jelas merupakan suatu bahaya bagi kehidupan Soekarno, karena itu pada tanggal 20 Februari 1967 Ia menyerahkan penyerahan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto untuk menyenangkan rakyat. Dalam Sidang Istimewa tersebut Jenderal Soeharto membicarakan dan menerangkan bahwa Soekarno bukan komunis dan Soeharto juga menerangkan bahwa Soekarno hanya mempunyai keyakinan akan ajaran Nasakomnya sehingga ia seolah-olah menjadi pelindung dan membela PKI. Berdasarkan laporan dari Jenderal Soeharto beserta berbagai kebijaksanaan Presiden Soekarno yang tidak memuaskan, maka MPRS mengeluarkan TAP XXXIII/MPRS/1967 yang dinyatakan mulai berlaku tanggal 22 Februari 1967 yang isinya adalah:<sup>41</sup>

1. Mencabut kekuasaan negara dari Presiden Soekarno;
2. Melarang Ir. Soekarno melakukan kegiatan politik sampai Pemilu yang akan datang;
3. Menetapkan Jenderal Soeharto menjadi pejabat Presiden.

Setelah dikeluarkannya Super Semar dan sidang MPRS tahun 1966, maka politik luar negeri Indonesia yang pernah terputus pada masa Demokrasi Terpimpin akhirnya membuat Indonesia harus kembali ke politik bebas-aktif dan tidak mengucilkan diri terutama masalah Konfrontasi dengan Malaysia. Sehingga pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali aktif lagi dalam PBB.

Indonesia tidak akan bisa melakukan pembangunan yang berencana dan kehidupan sosial politik yang tenang jika masih dipimpin oleh Pejabat Presiden.

---

<sup>41</sup> G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 149.



Menanggapi hal tersebut, maka MPRS dalam bulan Maret 1968 merencanakan untuk mengadakan sidang lagi (Sidang Kelima). Dalam sidang ini memberikan keputusan yang penting yaitu:<sup>42</sup>

1. TAP XLIV/MPRS/68 yang menetapkan Jenderal Soeharto menjadi Presiden RI untuk 5 tahun (1968-1973).
2. TAP XLI/MPRS/68 yang menetapkan perlunya dibentuk Kabinet Pembangunan dengan tugas pokok melaksanakan program yang dikenal sebagai Panca Krida:
  - a. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi;
  - b. Menyusun dan melaksanakan Repelita;
  - c. Melaksanakan Pemilu;
  - d. Mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa Gerakan 30 September/PKI, menindas setiap penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945;
  - e. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh Aparatur Negara.
3. TAP XLII/MPRS/68 yang menetapkan penyelenggaraan Pemilu selambat-lambatnya 5 Juli 1971.

Ketetapan MPRS itu mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pemegang Super Semar menjadi Presiden dan untuk menjalankan kekuasaan yang dilepas dari Soekarno. Sejak saat itu secara praktis Soekarno terkucil dari masyarakat dan akhirnya menghilang dari panggung politik Indonesia.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 151.

Pada dasarnya hubungan antara Soekarno dan Soeharto sudah tidak berjalan dengan baik sejak sebelum tahun 1965 dan berlanjut sampai tahun 1970. Hubungan kedua tokoh ini semakin menegang ketika dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 dan dibubarkannya Partai Komunis Indonesia oleh Jenderal Soeharto yang pada saat itu sebagai pemegang Super Semar.

Kudeta yang dijalankan oleh Soeharto disebut dengan Kudeta Merangkak akhirnya dapat berhasil pada tanggal 12 Maret 1967 setelah MPRS memutuskan untuk mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno agar dijalankan oleh Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden pada saat itu sampai pemilihan umum yang sudah ditetapkan oleh MPRS tahun 1968. Tetapi hal itu baru dilaksanakan pada tahun 1971 setelah Presiden Soekarno wafat tahun 1970. Dengan demikian hubungan Soekarno dan Soeharto setelah tahun 1965-1967 tidak berjalan dengan baik.

## BAB V

### PENUTUP

Soekarno dikenal sebagai seorang negarawan ulung pada masanya dan merupakan seorang pemimpin yang berkharisma, sehingga ia disebut sebagai tokoh pemersatu bangsa. Soekarno sangat gemar mempelajari cerita-cerita wayang sejak umur 6 tahun. Sikap politiknya sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, adat-istiadat dan pendidikan yang ia peroleh. Pendidikan politiknya ia dapatkan dari para gurunya termasuk H.O.S. Tjokroaminoto. Beliau juga mulai terjun dalam dunia pergerakan sehingga ia dipilih sebagai Ketua PNI dan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, PPKI memilih Soekarno sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia dengan Hatta sebagai Wakil Presiden.

Sebagai seorang pemimpin bangsa, Soekarno ingin mewujudkan cita-cita suatu masyarakat adil dan makmur di bawah negara kesatuan dengan Demokrasi Terpimpin yang dipandang sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu, cita-cita Soekarno adalah masyarakat yang berkeadilan sosial dengan mendasarkan pada demokrasi asli Indonesia. Sehingga penolakannya terhadap Demokrasi Parlementer merupakan suatu upaya untuk mewujudkan Kabinet Gotong-Royong. Untuk mencapai cita-citanya itu Soekarno terus berusaha sampai berlakunya Demokrasi Terpimpin dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang bertujuan untuk menyelamatkan negara.

Pemerintahan berada di tangan Soekarno sejak berlakunya Demokrasi Terpimpin. Namun Demokrasi Terpimpin berakhir pada tahun 1966 karena tidak

disetujui oleh sebagian besar kekuatan politik dan kelompok yang memegang kekuasaan pada saat itu.

Soekarno yang menganut prinsip Nasakom akhirnya lebih memilih bekerja sama dengan PKI daripada PNI. Hal ini disebabkan memasuki tahun 1957 figur Soekarno sebagai Bapak Pemersatu Bangsa mulai pudar sejak Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Maka untuk mengembalikan figur tersebut Soekarno menjalin hubungan dengan PKI dan ABRI. Ini dapat dibuktikan dengan dipilihnya PKI dan ABRI sebagai kawan yang bisa diandalkan oleh Soekarno. Selain itu, Soekarno juga sangat membutuhkan dukungan dari PKI yang pada saat itu merupakan partai progresif dan terorganisir dengan baik untuk dapat mengimbangi Angkatan Darat.

Hubungan Soekarno dan PKI semakin erat, hal ini dapat dilihat pada waktu Gerakan 30 September meletus di mana Soekarno tidak menyalahkan PKI atas peristiwa tersebut. Soekarno merasa bahwa PKI tidak terlibat dalam gerakan tersebut. Hubungan yang begitu erat antara Soekarno dan PKI membuat orang beranggapan bahwa ia adalah seorang komunis. Tetapi Soekarno membantah pernyataan tersebut. Sehingga muncullah kekuatan baru yaitu Angkatan Darat.

Hubungan antara Soekarno dan ABRI pada saat Gerakan 30 September berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama antara ABRI dan Soekarno dalam menghadapi masalah yang terjadi di dalam negeri.

Tindakan Soekarno yang membela PKI mengakibatkan hubungan Soekarno dan Soeharto setelah tahun 1965-1967 menjadi tidak harmonis. Hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan penafsiran antara Soekarno dan Soeharto terhadap PKI di mana sebelum tahun 1965 Soeharto mengatakan bahwa PKI yang mendalangi



Gerakan 30 September. Tetapi Soekarno mengatakan bahwa PKI tidak terlibat dalam gerakan tersebut, karena pada kenyataannya yang berperan dalam gerakan tersebut adalah Letkol Untung dan Kolonel A. Latief yang merupakan teman lama Soeharto, sehingga Soeharto memanfaatkan kedua temannya itu untuk kepentingannya dengan cara melakukan kudeta pada tanggal 1 Oktober 1965. Sedangkan setelah tahun 1965-1967 hubungan kedua tokoh ini semakin buruk setelah dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 yang menyebabkan PKI dibubarkan oleh Soeharto. Tindakan Soeharto ini membuat Soekarno marah sehingga Soekarno menghubungi Soeharto untuk meminta pertanggungjawaban.

Lahirnya Super Semar menimbulkan terjadinya dualisme dalam kepemimpinan nasional yaitu adanya jabatan Presiden dan pemegang Super Semar. Hal ini jelas tidak membantu posisi Soekarno sama sekali. Dengan adanya hal tersebut maka MPRS mengadakan sidangnya yang keempat pada bulan Juni 1966.

Kudeta yang dijalankan oleh Soeharto disebut sebagai Kudeta Merangkak akhirnya berhasil sebab pada tanggal 12 Maret 1967 MPRS memutuskan untuk mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno untuk dijalankan oleh Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada saat itu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Alamudin,  
1991 : *Apakah Demokrasi Itu?* United States Information Agency.
- Adams, Cindy,  
1966 : "Sukarno An Autobiography as Told to Cindy Adams", diterjemahkan Abdul Barsalim, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Gunung Agung. Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution,  
1955: *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, trj. Sylvia Tiwan, Pustaka Utama Grafik, Jakarta.
- Alamsiah Rais,  
1952: *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, Mutiara Bukit Tinggi Padang, Jakarta.
- Asvi Warman Adam (ed.),  
2003: *Revolusi Belum Selesai (kumpulan pidato Presiden Soekarno 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara) Jilid I*, Mesiass, Semarang.
- 
- 2003: *Revolusi Belum Selesai (Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara)*, Jilid II, Mesiass, Semarang.
- Badri Yatim,  
1985 : *Soekarno, Islam dan Nasionalisme, Rekonstruksi Islam-Nasionalis*. Inti Sarana Askara. Jakarta.
- Crouch, Harold,  
1978: *The Army and Politics in Indonesia*, Ithaca dan London: Cornell University Press.
- 
- 1986 : *Militer dan Politik di Indonesia*, Sinar Harapan. Jakarta.
- Dahm, Berhard,  
1987 : *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. LP3ES. Jakarta.
- Feith, Herbert,  
1964 : *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca Cornell University Press. New York.

- \_\_\_\_\_,  
2000: *"Dynamics of Guided Democracy"*, Diterj Soekarno dan Militer dalam *Demokrasi Terpimpin*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Gottchalk, Louis,  
1985 : *Mengerti Sejarah*. terjemahan Nugroho Notosusanto. UI Press. Jakarta.
- Indra, Muhammad Ridhwan dan Sophian Marthabaya,  
1987 : *Peristiwa-peristiwa di Sekitar Proklamasi 17-08-1945*. Sinar Grafik. Jakarta.
- Katoppo, Aristides, (ed),  
1981 : *80 Tahun Bung Karno*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Koentowijoyo,  
1995 : *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Budaya. Yogyakarta.
- Legge, John D.,  
1985 : *Kaum Intelektual dan Perjuangan*. Sinar Harapan. Jakarta.
- \_\_\_\_\_,  
1985 : *Sukarno: Sebuah Biografi Politik*. Sinar Harapan. Jakarta.
- \_\_\_\_\_,  
2000: *"Sukarno A Political Biography"*, Diterj. Sukarno Sebuah Biografy Politik. Sinar Harapan, Jakarta.
- Moedjanto, G.,  
1988 : *Indonesia Abad ke 20 Jilid I*. Kanisius. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_,  
1989 : *Indonesia Abad ke 20 Jilid II*. Kanisius. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_,  
1988: *"Demokrasi Terpimpin"*, SPPS, seri XV no 1, Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Muhaimin, Jahja,  
1971 : *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Seri Penerbitan Skripsi Terbaik. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_,  
1982: *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Muhammad Rusli Karim,

1989 : *Peranan ABRI Dalam Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia (1965-1979)*. CV. Haji Masagung. Jakarta.

Muhammad Tito,

1979 : *Kumpulan Kata-kata Pilihan Bung Karno*. Tridaya. Jakarta.

Nazaruddin Syamsuddin,

1988 : (ed). *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*. Rajawali Press. Jakarta.

Nugroho Notosusanto,

1971 : *Norma-norma Dasar Pemikiran dan Penelitian*. Dephankam. Jakarta.

Panitia Pembina Djiwa Revolusi,

t. th: *"Lahirnya Pantjasila"*, dalam Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi Republik Indonesia, Medan.

Poerwadarminta, W.J.S.,

1976 : *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Rusadi, Kantaprawira,

1988 : *Sistem Politik Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.

Sartono Kartodirdjo,

1992 : *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*. Gramedia. Jakarta.

Sartono Kartodirjo, dkk,

1975: *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, Debdikbud, Jakarta.

Sekretariat Negara Republik Indonesia,

1994 : *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*. Jakarta.

Sitorus, L.M.,

1987: *Sejarah Pergerakan dan Kemerdekaan Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.

Soekarno,

1964 : *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I*. Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi. Jakarta.

1965 : *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid II*. Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi. Jakarta.



Solichin Salam,

1966 : *Bung Karno Putera Fajar*. Gunung Agung. Jakarta.

Suwarno, P. J.,

2004 : *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966 (Dari TKR sampai Supersemar)*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

# LAMPIRAN



Lampiran 1.

Gambar Soekarno



Sumber :

S.T. Rais Alamsjah, 1952. *"10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang"*, Mutiara Bukit Tinggi Padang, Jakarta.

Lampiran 2.

**ISI DEKRIT PRESIDEN**

**5 JULI 1959**

1. Menetapkan pembubaran konstituante
2. Menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
3. Dibentuknya MPRS dan DPRS.

Sumber :

Nugroho Notosusanto (ed)., *Pejuang dan Prajurit Konsepsi dan Implementasi Dwi Fungsi ABRI*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.



Lampiran 3.

**DEKRIT NO.1  
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN REVOLUSI INDONESIA**

- I. Demi keselamatan Negara Republik Indonesia, demi pengamanan pelaksanaan Pancasila dan Panca Azimat Revolusi seluruhnya, demi keselamatan Angkatan Darat dan Angkatan Bersenjata pada umumnya, pada waktu tengah malam hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibukota Republik Indonesia, Jakarta, telah dilangsungkan gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal yang telah merencanakan Coup menjelang Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965. Sejumlah Jenderal telah ditangkap, alat-alat komunikasi dan objek-objek vital lainnya di Ibukota telah jatuh sepenuhnya ke dalam kekuasaan "Gerakan 30 September". Gerakan 30 September adalah gerakan semata-mata dalam tubuh Angkatan Darat untuk mengakhiri perbuatan sewenang-wenang jenderal-jenderal Anggota Dewan Jenderal serta perwira-perwira lainnya yang menjadi kaki tangan dan simpatisan anggota Dewan Jenderal. Gerakan ini dibantu oleh pasukan-pasukan bersenjata di luar Angkatan Darat.
- II. Untuk melancarkan tindak lanjut daripada Gerakan 30 September 1965, maka oleh Pimpinan Gerakan 30 September akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia yang anggotanya terdiri dari orang-orang sipil dan orang-orang militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Untuk sementara waktu, menjelang pemilihan umum Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Revolusi Indonesia menjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia. Dewan Revolusi Indonesia adalah alat bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkan Pancasila dan Panca Azimat Revolusi seluruhnya. Dewan Revolusi Indonesia dalam kegiatannya sehari-hari akan diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari komandan dan wakil-wakil komandan Gerakan 30 September.
- III. Dengan jatuhnya segenap kekuasaan Negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Dwikora dengan sendirinya berstatus demisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri baru oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas Menteri diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan routine, menjaga ketertiban dalam Departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bisa berakibat luas. Semua bekas menteri berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada Dewan Revolusi Indonesia c.q. menteri-menteri baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Revolusi Indonesia.
- IV. Sebagai alat daripada Dewan Revolusi Indonesia, di daerah dibentuk Dewan Revolusi Propinsi (paling banyak 25 orang), Dewan Revolusi Kabupaten (paling banyak 15 orang), Dewan Revolusi Kecamatan (paling banyak 10 orang) dan Dewan Revolusi Desa (paling banyak 7 orang), terdiri dari orang-

orang sipil dan militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Dewan-dewan Revolusi Daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan, dan yang di propinsi dan kabupaten pekerjaannya dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH) masing-masing, sedangkan di kecamatan dan desa dibantu oleh pimpinan Front Nasional setempat yang terdiri dari orang-orang yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve.

- V. Presidium Dewan Revolusi Indonesia terdiri dari Komandan dan Wakil-wakil Komandan Gerakan 30 September. Komandan dan wakil-wakil Komandan Gerakan 30 September adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Revolusi Indonesia.
- VI. Segera sesudah pembentukan Dewan Revolusi Daerah, Ketua Dewan Revolusi yang bersangkutan harus melaporkan kepada Dewan Revolusi setingkat di atasnya tentang susunan lengkap anggota Dewan. Dewan-dewan Revolusi Propinsi harus mendapat pengesahan tertulis dari Presidium Dewan Revolusi Indonesia, Dewan Revolusi Kabupaten harus mendapat pengesahan tertulis dari Dewan Revolusi Propinsi. Dewan Revolusi Kecamatan dan Desa harus mendapat pengesahan tertulis dari Dewan Revolusi Kabupaten.

Jakarta, 1 Oktober 1965

KOMANDO GERAKAN 30 SEPTEMBER

Komandan : Letnan Kolonel Untung  
Wakil Komandan : Brigjen Supardjo  
Wakil Komandan : Letnan Kolonel Udara Heru  
Wakil Komandan : Kolonel Laut Sunardi  
Wakil Komandan : Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas  
Diumumkan oleh Bagian Penerangan Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965.

(Disiarkan RRI Jakarta tanggal 1 Oktober 1965,  
sekitar jam 13.00)

Sumber :

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan PKI : Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*, Jakarta, 1994.

Lampiran 4.

**KEPUTUSAN NO. 1  
TENTANG SUSUNAN DEWAN REVOLUSI INDONESIA**

- I. Memenuhi isi Dekrit No.1 tentang Pembentukan Dewan Revolusi Indonesia, maka dengan ini diumumkan anggota-anggota lengkap dari Dewan Revolusi Indonesia :
1. Letnan Kolonel Untung, Ketua Dewan
  2. Brigjen Supardjo, Wakil Ketua Dewan
  3. Letnan Kolonel Udara Heru, Wakil Ketua Dewan
  4. Kolonel Laut Sunardi, Wakil Ketua Dewan
  5. Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas, Wakil Ketua Dewan
  6. Omar Dhani, Laksamana Madya Udara
  7. Sutjipto Judodihardjo, Inspektur Jenderal Polisi
  8. E. Martadinata, Laksamana Madya Laut
  9. Dr. Subandrio
  10. Dr. J. Leimena
  11. Ir. Surachman (golongan Nasionalis)
  12. Fattah Jassin (golongan Agama)
  13. K.H. Siradjuddin Abas (golongan Agama)
  14. Tjugito (golongan Komunis)
  15. Arudji Kartawinata
  16. Sjiwau Giok Tjan
  17. Sumarno, S.H.
  18. Hartono, Mayjen KKO
  19. Sutarto, Brigjen Polisi
  20. Zaini Mansjur (Front Pemuda Pusat)
  21. Jahja, S.H. (Front Pemuda Pusat)
  22. Sukatno (Front Pemuda Pusat)
  23. Bambang Kusnohadi (PPM)
  24. Rachman (Wakil Sekjen Front Nasionalis)
  25. Hardojo (Mahasiswa)
  26. Basuki Rachmat, Mayjen
  27. Ryacudu, Brigjen
  28. Solichin, Brigjen
  29. Amir Mahmud, Brigjen
  30. Andi Rivai, Brigjen
  31. Sujono, Mayor Udara
  32. Leo Wattimena, Komodor Udara
  33. Dr. Utami Surjadarma
  34. A. Latief, Kolonel
  35. Umar Wirahadikusumah, Mayjen
  36. Ny. Supeni
  37. Ny. Mahmudah Mawardi

38. Ny. Suharti Suwarno
  39. Fatah, Kolonel
  40. Suherman, Kolonel
  41. Samsu Sutjipto, Kolonel Laut
  42. Suhardi (Wartawan)
  43. Drs. Sumartono, Komisaris Besar Polisi
  44. Djunta Suwardi
  45. Karim D. P. (Persatuan Wartawan Indonesia)
- II. Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan merupakan Presidium Dewan Revolusi Indonesia yang di antara dua sidang lengkap Dewan bertindak atas nama Dewan.
- III. Semua Anggota Dewan Revolusi Indonesia dari kalangan sipil diberi hak memakai tanda pangkat militer Letnan Kolonel atau yang setingkat. Anggota Dewan Revolusi dari kalangan Angkatan Bersenjata tetap dengan pangkat yang lama, kecuali yang lebih tinggi dari Letnan Kolonel diharuskan memakai yang sama dengan pangkat Komandan Gerakan 30 September, yaitu Letnan Kolonel atau yang setingkat.

KOMANDAN GERAKAN 30 SEPTEMBER

Ketua Dewan Revolusi Indonesia

Ttd

(Letnan Kolonel Untung)

Jakarta, 1 Oktober 1965

Diumumkan oleh Bagian Penerangan Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965.

(Disiarkan RRI Jakarta tanggal 1 Oktober 1965 sekitar jam 13.00)

Sumber :

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan PKI : Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*, Jakarta, 1994.



Lampiran 5.

**KEPUTUSAN NO. 2  
TENTANG PENURUNAN DAN PENAIKAN PANGKAT**

- I. Berhubung segenap kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia pada tanggal 30 September 1965 diambil alih oleh Gerakan 30 September yang komandannya adalah perwira dengan pangkat Letnan Kolonel, maka dengan ini dinyatakan tidak berlaku lagi pangkat dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang di atas Letnan Kolonel atau setingkat. Semua perwira yang tadinya berpangkat di atas Letnan Kolonel harus menyatakan kesetiaan secara tertulis kepada Dewan Revolusi Indonesia dan baru sesudah itu berhak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel. Letnan Kolonel adalah pangkat yang tertinggi dalam Angkatan Bersenjata Negara Republik Indonesia.
- II. Karena Gerakan 30 September pada dasarnya adalah gerakan daripada prajurit bawahan, terutama daripada tamtama dan bintangara, maka dengan ini dinyatakan bahwa semua tamtama dan bintangara dari semua Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang mendukung Gerakan 30 September dinaikkan satu tingkat lebih tinggi daripada sebelum tanggal 30 September 1965.
- III. Semua tamtama dan bintangara yang langsung ambil bagian dalam gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota Dewan Jenderal pada tanggal 30 September malam di Jakarta, dinaikkan pangkatnya 2 tingkat lebih tinggi daripada sebelum tanggal 30 September 1965.

Komandan Gerakan 30 September/Ketua

Dewan Revolusi Indonesia

ttd

(Letnan Kolonel Untung)

Jakarta, 1 Oktober 1965

Diumumkan oleh Bagian Penerangan Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965.

(Disiarkan RRI Jakarta tanggal 1 Oktober 1965 sekitar jam 13.00)

Sumber :

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan PKI : Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*, Jakarta, 1994.



Lampiran 6.

**PRESIDEN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**SURAT – PERINTAH**

I. Mengingat :

1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik Nasional maupun Internasional.

Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi/pada tanggal 6 Maret 1966.

II. Menimbang :

2.1. Perlu adanya keteangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannja Revolusi.

2.2. Perlu adanya djaminan keutuhan Pimpinan Besar Revolusi/ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi Pimpinan Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja.

III. Memutuskan/Memerintahkan :

Kepada : LETNAN DJENDERAL SUHARTO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Untuk : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi :

1. Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjammnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan

Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan Panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
3. Supaja melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan-paut dalam tugas dan tanggung jawabnya.

IV. Selesai.

Djakarta, 11 Maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA

TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR

REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S.

SUKARNO

Sumber :

P.J. Suwarno, *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966 (Dari TKR sampai Supersemar)*, Sanata Dharma, Yogyakarta, 2004.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN BERBASIS KOMPETENSI

Nama Sekolah : SMU  
 Mata Pelajaran : Sejarah  
 Kelas : XII  
 Semester : Ganjil  
 Pendekatan : Berbasis Kerja Kelompok  
 Metode : Diskusi, Studi Pustaka, Presentasi dan Observasi  
 Standar Kompetensi : Kemampuan memahami perjalanan bangsa Indonesia sejak masa awal kemerdekaan sampai dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Alokasi Waktu	Penilaian			Sumber dan media
					Jenis Tagihan	Bentuk tagihan	Contoh tagihan	
1. Kemampuan menganalisis peranan Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1967.	Menganalisis perkembangan politik pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1967 serta pengaruh yang ditimbulkan.	Latar belakang Soekarno menjalin hubungan dengan PKI dan ABRI.	Mendeskripsikan tentang biografi Soekarno, PKI dan latar belakang Soekarno menjalin hubungan dengan PKI dan ABRI serta kedudukan ABRI masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966.	2 x 45'	Tes  Tugas kelompok  Proses	Lisan  Laporan  Hasil observasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Uraian secara singkat biografi Soekarno.</li> <li>Deskripsikanlah latar belakang Soekarno menjalin hubungan dengan PKI.</li> <li>Bagaimana peranan Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin.</li> <li>Bandingkan sistem dan struktur politik pada masa demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin.</li> <li>Jelaskan kedudukan ABRI masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966.</li> </ol>	- Sumber : <ol style="list-style-type: none"> <li>Crouch, Harold; 1986, <i>Militer dan Politik Indonesia</i>, Jakarta: Sinar Harapan.</li> <li>G. Moedjanto; 1988, <i>Demokrasi Terpimpin</i>, SPPS, Seri XV No.1, Yogyakarta: Sanata Dharma.</li> <li>G. Moedjanto; 1989, <i>Indonesia Abad ke 20 Jilid 2</i>, Yogyakarta: Kanisius.</li> </ol>

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<p>▪ Merekonstruksi terjadinya peristiwa Gerakan 30 September.</p> <p>▪ Mendeskripsikan proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa Gerakan 30 September.</p>	<p>▪ Hubungan Soekarno dengan PKI waktu Gerakan 30 September meletus.</p> <p>▪ Hubungan Soekarno dan Soeharto setelah tahun 1965-1967.</p>	<p>▪ Menjelaskan pengertian Demokrasi Terpimpin.</p> <p>▪ Menjelaskan sikap Soekarno terhadap Gerakan 30 September.</p> <p>▪ Mendeskripsikan hubungan Soekarno dengan ABRI (TNI-AD) waktu Gerakan 30 September meletus.</p> <p>▪ Mendeskripsikan hubungan Soekarno dengan PKI waktu Gerakan 30 September meletus.</p> <p>▪ Mendeskripsikan hubungan Soekarno dan Soeharto sebelum tahun 1965 dan setelah tahun 1965-1967.</p> <p>▪ Mendeskripsikan hubungan Soekarno dan ABRI (TNI-AD) sebelum tahun 1965 dan setelah 1965-1967.</p>	<p>2 x 45'</p> <p>2 x 45'</p>	<p>Tes</p> <p>Tugas kelompok</p> <p>Proses</p> <p>Post Tes</p> <p>Proses</p>	<p>Tertulis</p> <p>Laporan</p> <p>Hasil observasi</p> <p>Tertulis</p> <p>Hasil observasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan pengertian Demokrasi Terpimpin.</li> <li>2. Jelaskan sikap dan tindakan Soekarno terhadap Gerakan 30 September.</li> <li>3. Uraikan secara singkat hubungan Soekarno dengan ABRI (TNI-AD) waktu Gerakan 30 September meletus.</li> <li>4. Deskripsikan hubungan Soekarno dan PKI waktu Gerakan 30 September meletus.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deskripsikan hubungan Soekarno dan Soeharto sebelum tahun 1965.</li> <li>2. Jelaskan hubungan Soekarno dan ABRI (TNI-AD) sebelum tahun 1965.</li> <li>3. Deskripsikan hubungan Soekarno dan ABRI (TNI-AD) setelah tahun 1965-1967.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Muhammad Rusli Karim; 1989, <i>Peranan ABRI Dalam Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia(1965-1979)</i>, Jakarta: CV. Haji Masagung.</li> <li>5. P.J. Suwarno; 2004, <i>Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966 (Dari TKR Sampai Super Semar)</i>, Yogyakarta: Sanata Dharma.</li> <li>6. Sartono Kartodirdjo, dkk; 1975, <i>Sejarah Nasional Indonesia Jilid V</i>, Jakarta: Depdikbud.</li> <li>7. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994, <i>Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan</i></li> </ol>
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

				Tugas Kelompok	Laporan	4. Jelaskan hubungan Soekarno dan Soeharto setelah tahun 1965-1967.	<p><i>Penutupannya, Jakarta.</i></p> <p>8. Solichin Salam; 1966, <i>Bung Karno Putera Fajar</i>, Jakarta: Gunung Agung.</p> <p>9. Yahya A. Muhaimin; 1982, <i>Perkembangan Militer dan Politik di Indonesia 1945-1966</i>, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.</p> <p>- Media : Gambar, OHP, <i>Time chart</i>.</p>

Mengetahui  
Kepala Sekolah

(.....)

Yogyakarta, 7 Oktober 2005  
Guru Mata Pelajaran

Desri Sermiyati Meda  
001314044



## RENCANA PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Sejarah  
Materi Pokok : Latar Belakang Soekarno Menjalin  
Hubungan dengan PKI dan ABRI  
Kelas : XII  
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

### PERTEMUAN KE I

#### I. Standar Kompetensi

Kemampuan memahami perjalanan bangsa Indonesia sejak masa awal kemerdekaan sampai dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru.

#### II. Kompetensi Dasar

Kemampuan menganalisis peranan Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1967.

#### III. Indikator

Menganalisis perkembangan politik pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1967 serta pengaruh yang ditimbulkan.

#### IV. Materi Pembelajaran

Perkembangan politik pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1967 serta pengaruh yang ditimbulkan.

#### V. Uraian Materi (Ringkasan)

Latar belakang Soekarno menjalin hubungan dengan PKI dan ABRI :

- Biografi Soekarno
- PKI
- Latar belakang menjalin hubungan
- Kedudukan ABRI masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966



Keterangan : Skala nilai

4 = Sangat Baik

3 = Baik

2 = Cukup

1 = Kurang

• Penilaian Hasil

Alat penilaian : Tes

Bentuk tes : Esay berstruktur

Butir-butir tes :

1. Uraikan secara singkat biografi Soekarno!
2. Deskripsikanlah latar belakang Soekarno menjalin hubungan dengan PKI dan ABRI!
3. Bagaimana peranan Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin?
4. Bandingkan sistem dan struktur politik pada masa Demokrasi Liberal dengan Demokrasi Terpimpin!
5. Jelaskan Kedudukan ABRI masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966!

**VIII. Sumber**

Crouch, Harold; 1986, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.

G. Moedjanto; 1988, *Demokrasi Terpimpin*, SPPS, Seri XV No.1, Yogyakarta: Sanata Dharma.

\_\_\_\_\_ ; 1989, *Indonesia Abad ke 20 Jilid 2*, Yogyakarta: Kanisius.

Muhammad Rusli Karim; 1989, *Peranan ABRI Dalam Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia (1965-1979)* Jakarta: CV. Haji Masagung.

P.J. Suwarno; 2004, *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966 (Dari TKR Sampai Super Semar)*, Yogyakarta: Sanata Dharma.

Sartono Kartodirdjo, dkk; 1975, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, Jakarta: Depdikbud.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penupasannya*, Jakarta.

Solichin Salam; 1966, *Bung Karno Putera Fajar*, Jakarta: Gunung Agung.

Yahya A. Muhaimin; 1982, *Perkembangan Militer dan Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

**IX. Media**

Gambar/Foto, OHP, Time Chart.

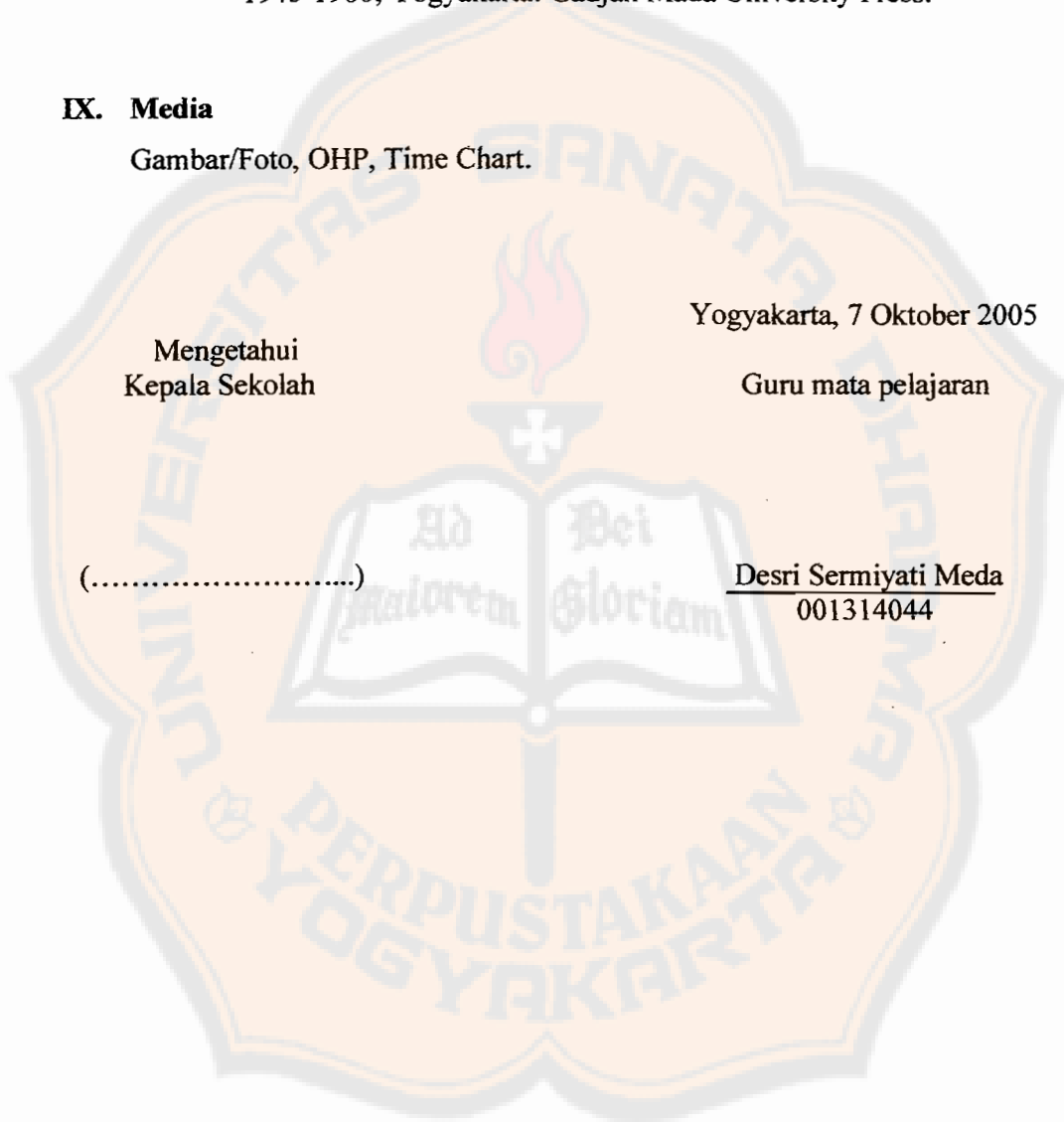
Mengetahui  
Kepala Sekolah

(.....)

Yogyakarta, 7 Oktober 2005

Guru mata pelajaran

Desri Sermiyati Meda  
001314044



## RENCANA PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Sejarah  
Materi Pokok : Hubungan Soekarno dengan PKI Waktu  
Gerakan 30 September Meletus.  
Kelas : XII  
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

### PERTEMUAN KE II

#### I. Standar Kompetensi

Kemampuan memahami perjalanan bangsa Indonesia sejak masa awal kemerdekaan sampai dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru.

#### II. Kompetensi Dasar

Kemampuan menganalisis peranan Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1967.

#### III. Indikator

Merekonstruksi terjadinya peristiwa Gerakan 30 September.

#### IV. Materi Pembelajaran

Rekonstruksi peristiwa Gerakan 30 September.

#### V. Uraian Materi (Ringkasan)

Hubungan Soekarno dengan PKI waktu Gerakan 30 September :

- Demokrasi Terpimpin
- Sikap Soekarno terhadap Gerakan 30 September : Soekarno mengutuk keras orang yang melakukan Gerakan 30 September.
- Hubungan Soekarno dengan ABRI (TNI-AD) waktu Gerakan 30 September, terjalin dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama antara ABRI khususnya Angkatan Darat dengan Panglima



Tertinggi yaitu Soekarno dalam menghadapi persoalan politik yang terjadi di Indonesia tahun 1965.

- Hubungan Soekarno dengan PKI waktu Gerakan 30 September, terjalin dengan baik sehingga mengakibatkan munculnya TNI Angkatan Darat.

## **VI. Langkah Pembelajaran**

### **1. Pendahuluan**

- **Apersepsi** : Tanya jawab tentang materi yang akan dibahas
- **Motivasi** : Memberi penguatan atas jawaban siswa dan memberikan gambaran mengenai materi yang akan disampaikan

### **2. Kegiatan Inti**

- **Orientasi** : Guru menjelaskan materi dan dilanjutkan tanya jawab
- **Latihan** : Siswa secara individu menganalisis hubungan Soekarno dengan PKI waktu Gerakan 30 September meletus.
- **Umpan Balik** : Siswa mempresentasikan hasil diskusi dan dilanjutkan dengan penjelasan guru dan tanya jawab.  
Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa.

### **3. Penutup**

- Guru menyimpulkan materi pelajaran
- Siswa membuat resume
- Guru memberikan tugas lanjutan (PR) berupa soal analisis.

## **VII. Penilaian**

- **Penilaian proses**
  - **Alat penilaian** : Skala nilai
  - **Bentuk** : Format penilaian

Nama \ Kegiatan yang diamati	orientasi	Mengemukakan pendapat	Kerjasama	Mempresentasikan hasil	Mengajukan pertanyaan	Menjawab Pertanyaan	Tanggung Jawab	Jmlh Skor	Keterangan

Keterangan : Skala nilai

- 4 = Sangat Baik
- 3 = Baik
- 2 = Cukup
- 1 = Kurang

• Penilaian Hasil

Alat penilaian : Tes

Bentuk tes : Esay berstruktur

Butir-butir tes :

1. Jelaskan pengertian Demokrasi Terpimpin!
2. Jelaskan sikap Soekarno terhadap Gerakan 30 September !
3. Uraian secara singkat hubungan Soekarno dengan ABRI (TNI-AD) waktu Gerakan 30 September meletus!
4. Deskripsikan hubungan Soekarno dengan PKI waktu Gerakan 30 September meletus!

**VIII. Sumber**

Crouch, Harold; 1986, *Militer dan Politik Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.

G. Moedjanto; 1988, *Demokrasi Terpimpin*, SPPS, Seri XV No.1, Yogyakarta: Sanata Dharma.

\_\_\_\_\_ ; 1989, *Indonesia Abad ke 20 Jilid 2*, Yogyakarta: Kanisius.

Muhammad Rusli Karim; 1989, *Peranan ABRI Dalam Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia (1965-1979)*, Jakarta: CV. Haji Masagung.

P.J. Suwarno; 2004, *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966 (Dari TKR Sampai Super Semar)*, Yogyakarta: Sanata Dharma.

Sartono Kartodirdjo, dkk; 1975, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, Jakarta: Depdikbud.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penupasannya*, Jakarta.

Solichin Salam; 1966, *Bung Karno Putera Fajar*, Jakarta: Gunung Agung.

Yahya A. Muhaimin; 1982, *Perkembangan Militer dan Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

**IX. Media**

Gambar/Foto, OHP, Time Chart.

Yogyakarta, 7 Oktober 2005

Mengetahui  
Kepala Sekolah

Guru mata pelajaran

(.....)

Desri Sermiyati Meda  
001314044

**RENCANA PEMBELAJARAN**

Mata Pelajaran : Sejarah  
Materi Pokok : Hubungan Soekarno dan Soeharto Setelah  
Tahun 1965-1967.  
Kelas : XII  
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

**PERTEMUAN KE III****I. Standar Kompetensi**

Kemampuan memahami perjalanan bangsa Indonesia sejak masa awal kemerdekaan sampai dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru.

**II. Kompetensi Dasar**

Kemampuan menganalisis peranan Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1967.

**III. Indikator**

Mendeskripsikan proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa Gerakan 30 September.

**IV. Materi Pembelajaran**

Proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa Gerakan 30 September.

**V. Uraian Materi (Ringkasan)**

Hubungan Soekarno dan Soeharto setelah tahun 1965-1967:

- Sebelum tahun 1965 :
  - Hubungan Soekarno dan Soeharto sebelum tahun 1965 tidak berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena Soeharto menyalahkan PKI.
  - Hubungan Soekarno dan ABRI (TNI-AD) sebelum tahun 1965 terjalin dengan baik karena Soekarno dan ABRI dapat bekerja sama.

- Setelah tahun 1965-1967 :
  - Hubungan Soekarno dan ABRI (TNI-AD) setelah tahun 1965-1967 berjalan dengan baik.
  - Hubungan Soekarno dan Soeharto setelah tahun 1965-1967 tidak berjalan dengan baik karena Soeharto membubarkan PKI pada tahun 1966.

## **VI. Langkah Pembelajaran**

### **1. Pendahuluan**

- **Apersepsi** : Tanya jawab tentang materi yang akan dibahas
- **Motivasi** : Memberi penguatan atas jawaban siswa dan memberikan gambaran mengenai materi yang akan disampaikan

### **2. Kegiatan Inti**

- **Orientasi** : Guru menjelaskan materi dan dilanjutkan tanya jawab
- **Latihan** : Siswa secara individu menganalisis hubungan Soekarno dan Soeharto setelah tahun 1965-1967 dilanjutkan dengan diskusi kelompok.
- **Umpan Balik** : Siswa mempresentasikan hasil diskusi dan dilanjutkan dengan penjelasan guru dan tanya jawab.  
Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa.

### **2. Penutup**

- Guru menyimpulkan materi pelajaran
- Siswa membuat resume
- Guru memberikan tugas lanjutan berupa soal analisis.

## **VII. Penilaian**

- **Penilaian proses**
  - **Alat penilaian** : Skala nilai
  - **Bentuk** : Format penilaian



Nama	Kegiatan yang diamati								
	orientasi	Mengemukakan pendapat	Kerjasama	Mempresentasikan hasil	Mengajukan pertanyaan	Menjawab Pertanyaan	Tanggung Jawab	Jmlh Skor	Keterangan

Keterangan : Skala nilai

4 = Sangat Baik

3 = Baik

2 = Cukup

1 = Kurang

• Penilaian Hasil

Alat penilaian : Tes

Bentuk tes : Esay berstruktur

Butir-butir tes :

1. Deskripsikan hubungan Soekarno dan Soeharto sebelum tahun 1965!
2. Jelaskan hubungan Soekarno dan ABRI (TNI-AD) sebelum tahun 1965!
3. Deskripsikan hubungan Soekarno dan ABRI (TNI-AD) setelah tahun 1965-1967!
4. Jelaskan hubungan Soekarno dan Soeharto setelah tahun 1965-1967!

**VIII. Sumber**

Crouch, Harold; 1986, *Militer dan Politik Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.

G. Moedjanto; 1988, *Demokrasi Terpimpin*, SPPS, Seri XV No.1, Yogyakarta: Sanata Dharma.

\_\_\_\_\_ ; 1989, *Indonesia Abad ke 20 Jilid 2*, Yogyakarta: Kanisius.

Muhammad Rusli Karim; 1989, *Peranan ABRI Dalam Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia (1965-1979)*, Jakarta: CV. Haji Masagung.

P.J. Suwarno; 2004, *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966 (Dari TKR Sampai Super Semar)*, Yogyakarta: Sanata Dharma.

Sartono Kartodirdjo, dkk; 1975, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, Jakarta: Depdikbud.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*, Jakarta.

Solichin Salam; 1966, *Bung Karno Putera Fajar*, Jakarta: Gunung Agung.

Yahya A. Muhaimin; 1982, *Perkembangan Militer dan Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

**IX. Media**

Gambar/Foto, OHP, Time Chart.

Yogyakarta, 7 Oktober 2005

Mengetahui  
Kepala Sekolah

Guru mata pelajaran

(.....)

Desri Sermiyati Meda  
001314044

